



DIGITAL

COMPUTER ASSISTED TEST

CAT

CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

CPNS

TES WAWASAN KEBANGSAAN

**PANCASILA
UNDANG-UNDANG DASAR 1945
BHINEKA TUNGGAL IKA
NKRI
BAHASA INDONESIA**



SESI 2014
DIGITAL ARCHIVE

TWK

Tes Wawasan Kebangsaan

- **Pancasila**
- **Undang-Undang Dasar 1945**
- **Bhineka Tunggal Ika**
- **NKRI**
- **Bahasa Indonesia**

TWK

Tes Wawasan Kebangsaan

Tes Wawasan kebangsaan (TWK) merupakan, salah satu Tes Kompetensi Dasar yang wajib diikuti oleh para peserta dalam uji seleksi penerimaan CPNS. Tujuan diberlakukannya Tes Wawasan Kebangsaan adalah untuk menguji kemampuan penguasaan materi kebangsaan Indonesia dari para peserta tes yang terdiri atas Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang meliputi:

- a. Sistem test negara Indonesia, baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- b. Sejarah perjuangan bangsa.
- c. Peranan Bangsa Indonesia dalam tatanan regional maupun global.
- d. Kemampuan berbahasa Indonesia secara baik dan benar.

PANCASILA

Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Kata Pancasila terdiri dari dua kata yang diambil dari bahasa Sanskerta, yaitu *panca* yang berarti lima dan *sila* yang berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia.

Lima sendi utama penyusun Pancasila atau yang biasa dikenal dengan lima sila dalam Pancasila adalah:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kelima sila tersebut tercantum pada paragraf ke-4 Preambule (Pembukaan) Undang-undang Dasar 1945.

Meskipun terjadi perubahan kandungan dan urutan lima sila Pancasila yang berlangsung dalam beberapa tahap selama masa perumusan Pancasila pada tahun 1945, tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila.

SEJARAH PERUMUSAN

Perumusan Pancasila sebagai dasar negara yang resmi diawali dari usulan-

usulan pribadi yang dikemukakan dalam Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yaitu:

1. Lima Dasar oleh Muhammad Yamin dalam pidatonya pada tanggal 29 Mei 1945, yaitu:
 - a. Peri Kebangsaan
 - b. Peri Kemanusiaan
 - c. Peri Ketuhanan
 - d. Peri Kerakyatan
 - e. Kesejahteraan Rakyat.

Dia menyatakan bahwa kelima sila yang dirumuskan itu berakar pada sejarah, peradaban, agama, dan hidup ketatanegaraan yang telah lama berkembang di Indonesia.

2. Panca Sila oleh Soekarno yang dikemukakan pada tanggal 1 Juni 1945 dalam pidato spontannya yang kemudian dikenal dengan judul "Lahirnya Pancasila", yaitu
 - a. Kebangsaan
 - b. Internasionalisme
 - c. Mufakat
 - d. Kesejahteraan
 - e. Ketuhanan

Setelah Rumusan Pancasila diterima sebagai dasar negara secara resmi beberapa dokumen penetapannya ialah:

- Rumusan pertama: Piagam Jakarta (Jakarta Charter) - tanggal 22 Juni 1945.
- Rumusan kedua: Pembukaan Undang-undang Dasar - tanggal 18 Agustus 1945
- Rumusan ketiga: Mukaddimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat - tanggal 27 Desember 1949.
- Rumusan keempat: Mukaddimah Undang-undang Dasar Sementara - tanggal 15 Agustus 1950
- Rumusan kelima: Rumusan kedua yang dijiwai oleh rumusan pertama (merujuk Dekrit Presiden 5 Juli 1959).

Pancasila yang digali dari bumi Indonesia merupakan:

1. Dasar negara yang merupakan sumber sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di negara kita.
2. Pandangan hidup bangsa Indonesia yang dapat mempersatukan serta memberi petunjuk bagi masyarakat yang beraneka ragam sifatnya.
3. Jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia, karena Pancasila memberikan corak yang khas kepada bangsa Indonesia dan tak dapat dipisahkan dari bangsa Indonesia, serta merupakan ciri khas yang dapat membedakan bangsa Indonesia dari bangsa yang lain.
4. Tujuan yang akan dicapai oleh bangsa Indonesia, yakni suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual

berdasarkan Pancasila di dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib, dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai.

5. Perjanjian luhur rakyat Indonesia yang disetujui oleh wakil-wakil rakyat Indonesia menjelang dan sesudah Proklamasi Kemerdekaan yang dijunjung tinggi, bukan sekedar karena ditemukan dari kandungan kepribadian dan cita-cita bangsa Indonesia yang terpendam sejak berabad-abad yang lalu, melainkan karena Pancasila itu telah mampu membuktikan kebenarannya setelah diuji oleh sejarah perjuangan bangsa.

Apabila dibicarakan mengenai Pancasila, maka yang dimaksud adalah Pancasila yang dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Rumusan Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 itulah yang digunakan, sebab rumusan yang demikian itulah yang ditetapkan oleh wakil-wakil bangsa Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

Seperti yang telah ditunjukkan oleh Ketetapan MPR No. XI/MPR/1978, Pancasila itu merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh dari kelima silanya. Dikatakan sebagai kesatuan yang bulat dan utuh, karena masing-masing sila dari Pancasila itu tidak dapat dipahami dan diberi arti secara sendiri-sendiri, terpisah dari keseluruhan sila-sila lainnya. Memahami atau memberi arti setiap sila-sila secara terpisah dari silasila lainnya akan mendatangkan pengertian yang keliru tentang Pancasila.

FALSAFAH PANCASILA SEBAGAI DASAR FALSAFAH NEGARA INDONESIA

Falsafah Pancasila sebagai dasar falsafah negara Indonesia, dapatlah ditemukan dalam beberapa dokumen historis dan di dalam perundang-undangan negara Indonesia sebagai berikut:

1. Dalam Pidato Ir. Soekarno tanggal 1 Juni 1945
2. Dalam Naskah Politik yang bersejarah, tanggal 22 Juni 1945 alinea IV yang kemudian dijadikan naskah rancangan Pembukaan UUD 1945 (terkenal dengan sebutan Piagam Jakarta)
3. Dalam naskah Pembukaan UUD Proklamasi 1945, alinea IV
4. Dalam Mukadimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) tanggal 27 Desember 1945, alinea IV

5. Dalam Mukadimah UUD Sementara Republik Indonesia (UUDS RI) tanggal 17 Agustus 1950
6. Dalam Pembukaan UUD 1945, alinea IV setelah Dekrit Presiden RI tanggal 5 Juli 1959 di

UUD 1945 DAN AMANDEMEN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, atau disingkat UUD 1945 atau UUD '45, adalah hukum dasar tertulis (*basic law*), konstitusi pemerintahan negara Republik Indonesia saat ini.

UUD 1945 disahkan sebagai undang-undang dasar negara oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Sejak tanggal 27 Desember 1949, di Indonesia berlaku Konstitusi RIS, dan sejak tanggal 17 Agustus 1950 di Indonesia berlaku UUDS 1950. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 kembali memberlakukan UUD 1945, dengan dikukuhkan secara aklamasi oleh DPR pada tanggal 22 Juli 1959.

Pada kurun waktu tahun 1999-2002, UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan (amandemen), yang mengubah susunan lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.

Sebelum dilakukan Perubahan, UUD 1945 terdiri atas Pembukaan, Batang Tubuh (16 bab, 37 pasal, 65 ayat (16 ayat berasal dari 16 pasal yang hanya terdiri dari 1 ayat dan 49 ayat berasal dari 21 pasal yang terdiri dari 2 ayat atau lebih), 4 pasal Aturan Peralihan, dan 2 ayat Aturan Tambahan), serta Penjelasan

Setelah dilakukan 4 kali perubahan, UUD 1945 memiliki 16 bab, 37 pasal, 194 ayat, 3 pasal Aturan Peralihan, dan 2 pasal Aturan Tambahan.

Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang dibentuk pada tanggal 29 April 1945 adalah badan yang menyusun rancangan UUD 1945. Naskah rancangan UUD 1945 Indonesia disusun pada masa Sidang Kedua Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI) tanggal 10-17 Juli 1945. Tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan UUD 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.

1. Periode berlakunya UUD 1945 (18 Agustus 1945 - 27 Desember 1949). Dalam kurun waktu 1945-1950, UUD 1945 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena Indonesia sedang disibukkan dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan.
2. Periode berlakunya Konstitusi RIS 1949 (27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950). Pada masa ini sistem pemerintahan Indonesia adalah parlementer.
3. Periode UUDS 1950 (17 Agustus 1950 - 5 Juli 1959). Pada periode

UUDS 1950 ini diberlakukan sistem Demokrasi Parlementer yang sering disebut Demokrasi Liberal. Sehingga pada tanggal 5 Juli 1959 mengumumkan dekrit mengenai pembubaran Konstituante dan berlakunya kembali UUD 1945 serta tidak berlakunya UUDS 1950.

4. Periode kembalinya ke UUD 1945 (5 Juli 1959 - 1966). Karena situasi politik pada Sidang Konstituante 1959 dimana banyak saling tarik ulur kepentingan partai politik sehingga gagal menghasilkan UUD baru, maka pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang salah satu isinya memberlakukan kembali UUD 1945 sebagai undang-undang dasar.

Pada masa ini, terdapat berbagai penyimpangan UUD 1945, diantaranya:

- Presiden mengangkat Ketua dan Wakil Ketua MPR/DPR dan MA serta Wakil Ketua DPA menjadi Menteri Negara.
- MPRS menetapkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup.
- Pemberontakan Partai Komunis Indonesia melalui Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia.

4. Periode kembalinya ke UUD 1945 (5 Juli 1959 - 1966)

Pada masa Orde Baru (1966-1998), Pemerintah menyatakan akan menjalankan UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Pada masa Orde Baru, UUD 1945 juga menjadi konstitusi yang sangat "sakral", di antara melalui sejumlah peraturan:

- Ketetapan MPR Nomor I/MPR/1983 yang menyatakan bahwa MPR berketetapan untuk mempertahankan UUD 1945, tidak berkehendak akan melakukan perubahan terhadapnya
- Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1983 tentang Referendum yang antara lain menyatakan bahwa bila MPR berkehendak mengubah UUD 1945, terlebih dahulu harus minta pendapat rakyat melalui referendum.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum, yang merupakan pelaksanaan TAP MPR Nomor IV/MPR/1983.

5. Periode 21 Mei 1998 - 19 Oktober 1999. Pada masa ini dikenal masa transisi. Yaitu masa sejak Presiden Soeharto digantikan oleh B.J.Habibie sampai dengan lepasnya Provinsi Timor Timur dari NKRI.

6. Periode Perubahan UUD 1945 (1999 - 2002). Salah satu tuntutan Reformasi 1998 adalah dilakukannya perubahan (amandemen) terhadap UUD 1945. Latar belakang tuntutan perubahan UUD 1945 antara lain karena pada masa Orde Baru, kekuasaan tertinggi di tangan MPR (dan pada kenyataannya bukan di tangan rakyat), kekuasaan yang sangat besar pada Presiden, adanya pasal-pasal yang terlalu "luwes" (sehingga dapat menimbulkan multitafsir), serta kenyataan rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggara negara yang belum cukup didukung ketentuan konstitusi.

Tujuan perubahan UUD 1945 waktu itu adalah menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi dan negara hukum, serta hal-hal lain yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa. Perubahan UUD 1945 dengan kesepakatan di antaranya tidak mengubah Pembukaan UUD 1945, tetap mempertahankan susunan kenegaraan (staat structuur) kesatuan atau selanjutnya lebih dikenal sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta mempertegas sistem pemerintahan presidensial.

Dalam kurun waktu 1999-2002, UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan (amandemen) yang ditetapkan dalam Sidang Umum dan Sidang Tahunan MPR, yaitu:

1. Sidang Umum MPR 1999, tanggal 14-21 Oktober 1999: Perubahan pertama UUD 1945.
2. Sidang Tahunan MPR 2000, tanggal 7-18 Agustus 2000: Perubahan kedua UUD 1945.
3. Sidang Tahunan MPR 2001, tanggal 1-9 November 2001: Perubahan ketiga UUD 1945.
4. Sidang Tahunan MPR 2002, tanggal 1-11 Agustus 2002: Perubahan keempat UUD 1945.

BHINNEKA TUNGGAL IKA

Bhinneka Tunggal Ika adalah moto atau semboyan Indonesia yang berasal dari bahasa Jawa Kuna dan seringkali diterjemahkan dengan kalimat "Berbeda-beda tetapi tetap satu".

Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama dan kepercayaan.

Kalimat ini merupakan kutipan dari kitab Sutasoma, karangan Mpu Tantular semasa kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14.

PENTINGNYA SEMBOYAN BHINNEKA TUNGGAL IKA

Secara mendalam Bhinneka Tunggal Ika memiliki makna walaupun di Indonesia terdapat banyak suku, agama, ras, kesenian, adat, bahasa, dan lain sebagainya namun tetap satu kesatuan yang sebangsa dan setanah air. Dipersatukan dengan benders, lagu kebangsaan, mata uang, bahasa dan lain-lain yang sama.

Kata-kata Bhinneka Tunggal Ika juga terdapat pada lambang negara Republik Indonesia yaitu Burung Garuda Pancasila. Di kaki Burung Garuda

Pancasila mencengkram sebuah pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika.

Makna Bhinneka Tunggal Ika yaitu meskipun bangsa dan negara Indonesia terdiri atas beraneka ragam suku bangsa yang memiliki kebudayaan dan adat-istiadat yang bermacam-macam serta beraneka ragam kepulauan wilayah negara Indonesia namun keseluruhannya itu merupakan suatu persatuan yaitu bangsa dan negara Indonesia. Keanekaragaman tersebut bukanlah merupakan perbedaan yang bertentangan namun justru bersatu dalam satu kesatuan yang justru memperkaya sifat dan makna persatuan bangsa dan negara Indonesia.

Prinsip-prinsip nasionalisme Indonesia (Persatuan Indonesia) tersusun dalam kesatuan majemuk tunggal yaitu:

- a. Kesatuan sejarah, yaitu bangsa Indonesia tumbuh dan berkembang dalam suatu proses sejarah
- b. Kesatuan nasib, yaitu berada dalam satu proses sejarah yang sama dan mengalami nasib yang sama yaitu dalam penderitaan penjajah dan kebahagiaan bersama
- c. Kesatuan kebudayaan, yaitu keanekaragaman kebudayaan tumbuh menjadi suatu bentuk kebudayaan nasional
- d. Kesatuan asas kerohanian, yaitu adanya ide, cita-cita dan nilai-nilai kerohanian yang secara keseluruhan tersimpul dalam Pancasila. Berdasarkan prinsip-prinsip nasionalisme yang tersimpul dalam sila ketiga tersebut dapat disimpulkan bahwa nasionalisme (Persatuan Indonesia) pada masa perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia memiliki peranan historis yaitu mampu mewujudkan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Jadi "Persatuan Indonesia" sebagai jiwa dan semangat perjuangan kemerdekaan RI.

Cita-cita untuk mencapai Indonesia merdeka dalam bentuk organisasi modern baik berdasarkan agama Islam, paham kebangsaan ataupun sosialisme itu dipelopori oleh berdirinya:

1. Serikat Dagang Islam (1900).
2. Budi Utomo (1908).
3. Serikat Islam (1911).
4. Muhammadiyah (1912).
5. Indische Partij (1911).
6. Perhimpunan Indonesia (1924).
7. Partai Nasional Indonesia (1929).
8. Partindo (1933).
9. dan sebagainya.

Integrasi pergerakan dalam mencapai cita-cita itu pertama kali tampak dalam bentuk federasi seluruh organisasi politik/organisasi masyarakat yang ada yaitu permufakatan perhimpunan-perhimpunan Politik Kemerdekaan Indonesia (1927). Kebulatan tekad untuk mewujudkan "Persatuan Indonesia" kemudian tercermin dalam ikrar "Sumpah Pemuda" yang dipelopori

oleh pemuda perintis kemerdekaan pada tanggal 28 Oktober 1928 di Jakarta yang berbunyi:

1. PERTAMA, Kami Putra dan Putri Indonesia Mengaku Bertumpah darah Satu Tanah Air Indonesia.
2. KEDUA, Kami Putra dan Putri Indonesia Mengaku Berbangsa Satu Bangsa Indonesia.
3. KETIGA, Kami Putra dan Putri Indonesia Menjunjung Bahasa Persatuan Bahasa Indonesia.

Berdasarkan Sumpah Pemuda terdapat tiga aspek Persatuan Indonesia, yaitu:

1. Aspek Satu Nusa, yaitu aspek wilayah. Wilayah yang dilambangkan untuk disatukan adalah wilayah pulau-pulau yang tadinya bernama Hindia Belanda yang saat itu dijajah oleh Belanda. Ini untuk pertama kali secara tegas para pejuang kemerdekaan mengklaim wilayah yang akan dijadikan wilayah Indonesia merdeka
2. Aspek Satu Bangsa, yaitu nama baru dari suku-suku bangsa yang berada di wilayah yang tadinya bernama Hindia Belanda yang tadinya dijajah oleh Belanda mempromosikan satu nama baru sebagai Bangsa Indonesia. Ini adalah awal mula dari rasa nasionalisme sebagai kesatuan bangsa yang berada di wilayah Sabang sampai Merauke
3. Aspek Satu Bahasa, yaitu agar wilayah dan bangsa baru yang berdiri dari berbagai suku dan bahasa bisa berkomunikasi dengan baik maka dipakailah sarana bahasa Indonesia yang ditarik dari bahasa Melayu dengan pembaharuan yang bernuansakan pergerakan ke arah Indonesia yang Merdeka. Untuk pertama kali para pejuang kemerdekaan mempromosikan bahasa yang akan dipakai negara Indonesia merdeka yaitu bahasa Indonesia.

SEJARAH INDONESIA

Sejarah Indonesia selama 1945-1949 dimulai dengan masuknya Sekutu diboncengi oleh Belanda (NICA) ke berbagai wilayah Indonesia setelah kekalahan Jepang, dan diakhiri dengan penyerahan kedaulatan kepada Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949. Terdapat banyak sekali peristiwa sejarah pada masa itu, pergantian berbagai posisi kabinet, Aksi Polisionil oleh Belanda, berbagai perundingan, dan peristiwa-peristiwa sejarah lainnya.

1945

Kembalinya Belanda Bersama Sekutu

Sesuai dengan perjanjian Wina pada tahun 1942, negara-negara sekutu

bersepakat untuk mengembalikan wilayah-wilayah yang kini diduduki Jepang pada pemilik koloninya masing-masing bila Jepang berhasil diusir dari daerah pendudukannya.

Menjelang akhir perang, tahun 1945, sebagian wilayah Indonesia telah dikuasai oleh tentara sekutu. Satuan tentara Australia telah mendaratkan pasukannya di Makasar dan Banjarmasin, sedangkan Balikpapan telah diduduki oleh Australia sebelum Jepang menyatakan menyerah kalah. Sementara Pulau Morotai dan Irian Barat bersama-sama dikuasai oleh satuan tentara Australia dan Amerika Serikat di bawah pimpinan Jenderal Douglas MacArthur, Panglima Komando Kawasan Asia Barat Daya (*South West Pacific Area Command/SWPAC*).

Setelah perang usai, tentara Australia bertanggung jawab terhadap Kalimantan dan Indonesia bagian Timur, Amerika Serikat menguasai Filipina dan tentara Inggris dalam bentuk komando SEAC (South East Asia Command) bertanggung jawab atas India, Burma, Srilanka, Malaya, Sumatra, Jawa dan Indocina. SEAC dengan panglima Lord Mountbatten sebagai Komando Tertinggi Sekutu di Asia Tenggara bertugas melucuti bala tentara Jepang dan mengurus pengembalian tawanan perang dan tawanan warga sipil sekutu (*Recovered Allied Prisoners of War and Internees/RAPWI*).

Mendaratnya Belanda Diwakili NICA

Berdasarkan *Civil Affairs Agreement*, pada 23 Agustus 1945 Inggris bersama tentara Belanda mendarat di Sabang, Aceh. 15 September 1945, tentara Inggris selaku wakil Sekutu tiba di Jakarta, dengan didampingi Dr. Charles van der Plas, wakil Belanda pada Sekutu. Kehadiran tentara Sekutu ini, diboncengi NICA (Netherland Indies Civil Administration - pemerintahan sipil Hindia Belanda) yang dipimpin oleh Dr. Hubertus J van Mook, ia dipersiapkan untuk membuka perundingan atas dasar pidato siaran radio Ratu Wilhelmina tahun 1942 (*statkundige concepti* atau konsepsi kenegaraan), tetapi ia mengumumkan bahwa ia tidak akan berbicara dengan Soekarno yang dianggapnya telah bekerja sama dengan Jepang. Pidato Ratu Wilhemina itu menegaskan bahwa di kemudian harp akan dibentuk sebuah persemakmuran yang diantara anggotanya adaiah Kerajaan Belanda dan Hindia Belanda, di bawah pimpinan Ratu Belanda.

Pertempuran Melawan Sekutu dan NICA

Terdapat berbagai pertempuran yang terjadi pada saat masuknya Sekutu dan NICA ke Indonesia, yang saat itu baru menyatakan kemerdekaannya. Pertempuran yang terjadi di antaranya adalah:

1. Peristiwa 10 November, di daerah Surabaya dan sekitarnya
2. Palagan Ambarawa, di daerah Ambarawa, Semarang dan sekitarnya
3. Perjuangan Gerilya Jenderal Soedirman, meliputi Jawa Tengah dan

Jawa Timur

4. Bandung Lautan Api, di daerah Bandung dan sekitarnya
5. Pertempuran Medan Area, di daerah Medan dan sekitarnya
6. Pertempuran Margarana, di Bah
7. Serangan Umum 1 Maret 1949, di Yogyakarta
8. Pertempuran Lima Hari Lima Malam, di Palembang
9. Pertempuran Lima Hari, di Semarang
10. Ibukota pindah ke Yogyakarta

Karena situasi keamanan ibukota Jakarta (Batavia saat itu) yang makin memburuk, maka pada tanggal 4 Januari 1946, Soekarno dan Hatta pindah ke Yogyakarta sekaligus memindahkan ibukota.

1946

Perubahan Sistem Pemerintahan

Pernyataan van Mook untuk tidak berunding dengan Soekarno adalah salah satu faktor yang memicu perubahan sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer. Pada tanggal 14 November 1945, Soekarno sebagai kepala pemerintahan republik diganti oleh Sutan Sjahrir sebagai Perdana Menteri.

Diplomasi Sjahrir

Ketika Sjahrir mengumumkan kabinetnya, 15 November 1945, Letnan Gubernur Jendral van Mook mengirim kawat kepada Menteri Urusan Tanah Jajahan (*Minister of Overseas Territories, Overzeese Gebiedsdelen*), J H.A. Logemann, yang berkantor di Den Haag: "Mereka sendiri (Sjahrir dan Kabinetnya) dan bukan Soekarno yang bertanggung jawab atas jalannya keadaan".

Tanggal 10 Februari 1946, pemerintah Belanda membuat pernyataan memperinci tentang politiknya dan menawarkan mendiskusikannya dengan wakil-wakil Republik yang diberi kuasa. Tujuannya hendak mendirikan persemakmuran Indonesia, yang terdiri dari daerah-daerah dengan bermacam-macam tingkat pemerintahan sendiri, dan untuk menciptakan warga negara Indonesia bagi semua orang yang dilahirkan di sana.

Pada bulan April dan Mei 1946, Sjahrir mengepalai delegasi kecil Indonesia yang pergi berunding dengan pemerintah Belanda di Hoge Veluwe. Lagi, ia menjelaskan bahwa titik tolak perundingan haruslah berupa pengakuan atas Republik sebagai negara berdaulat. Atas dasar itu Indonesia baru mau berhubungan erat dengan Kerajaan Belanda dan akan bekerja sama dalam segala bidang. Karena itu Pemerintah Belanda menawarkan suatu kompromi yaitu "Mau mengakui Republik sebagai salah satu unit negara federasi yang akan dibentuk sesuai dengan Deklarasi 10 Februari".

Sebagai tambahan ditawarkan untuk mengakui pemerintahan de facto Republik atas bagian Jawa dan Madura yang belum berada di bawah perlindungan pasukan Sekutu. Karena Sjahrir tidak dapat menerima syarat-syarat ini, konferensi itu bubar dan ia beserta lamateman-temannya kembali pulang Tanggal 17 Juni 1946, Sjahrir mengirimkan surat rahasia kepada van Mook, menganjurkan bahwa mungkin perundingan yang sungguh-sungguh dapat dimulai kembali. Tanggal 17 Juni 1946, sesudah Sjahrir mengirimkan surat rahasianya kepada van Mook, surat itu dibocorkan kepada pers oleh surat kabar di Negeri Belanda. Pada tanggal 24 Juni 1946, surat kabar Indonesia menuntut dijelaskan desas desus tentang Sjahrir bersedia menerima pengakuan de facto Republik Indonesia terbatas pada Jawa dan Sumatra.

Penculikan Terhadap PM Sjahrir

Tanggal 27 Juni 1946, dalam Pidato Peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW Wakil Presiden Hatta menjelaskan isi usulan balasan di depan rakyat banyak di alun-alun utama Yogyakarta, dihadiri oleh Soekarno dan sebagian besar pucuk pimpinan politik. Dalam pidatonya, Hatta menyatakan dukungannya kepada Sjahrir, akan tetapi menurut sebuah analisis, publisitas luas yang diberikan Hatta terhadap surat itu, menyebabkan kudeta dan penculikan terhadap Sjahrir.

Pada malam itu terjadi peristiwa penculikan terhadap Perdana Menteri Sjahrir, yang sudah terlanjur dicap sebagai "pengkhianat yang menjual tanah airnya". Sjahrir diculik di Surakarta, ketika ia berhenti dalam perjalanan politik menelusuri Jawa. Kemudian ia dibawa ke Paras, kota dekat Solo, di rumah peristirahatan seorang pangeran Solo dan ditahan di sana dengan pengawasan Komandan Batalyon setempat.

Pada malam tanggal 28 Juni 1946, Ir Soekarno berpidato di radio Yogyakarta. Ia mengumumkan, "Berhubung dengan keadaan di dalam negeri yang membahayakan keamanan negara dan perjuangan kemerdekaan kita, saya, Presiden Republik Indonesia, dengan persetujuan Kabinet dan sidangnya pada tanggal 28 Juni 1946, untuk sementara mengambil alih semua kekuasaan pemerintah". Selama sebulan lebih, Soekarno mempertahankan kekuasaan yang luas yang dipegangnya. Tanggal 3 Juli 1946, Sjahrir dibebaskan dari penculikan. Namun, baru tanggal 14 Agustus 1946, Sjahrir diminta kembali untuk membentuk kabinet dan tanggal 2 Oktober 1946, Sjahrir kembali menjadi Perdana Menteri.

Konferensi Malino - Terbentuknya "Negara" Baru

Bulan Juni 1946 suatu krisis terjadi dalam pemerintahan Republik Indonesia, keadaan ini dimanfaatkan oleh pihak Belanda yang telah menguasai sebelah Timur Nusantara. Dalam bulan Juni diadakan konferensi wakil-wakil daerah di Malino, Sulawesi, di bawah Dr. Van Mook dan minta organisasiorganisasi di seluruh Indonesia masuk federasi dengan 4 bagian;

Jawa, Sumatra, Kalimantan dan Timur Raya.

1946 -1947

Peristiwa Westerling

Pembantaian Westerling adalah sebutan untuk peristiwa pembunuhan ribuan rakyat sipil di Sulawesi Selatan yang dilakukan oleh pasukan Belanda Depot *Speciale Troepen* pimpinan Westerling. Peristiwa ini terjadi pada Desember 1946 - Februari 1947 selama operasi militer *Counter Insurgency* (penumpasan pemberontakan).

Perjanjian Linggarjati

Konferensi antara Indonesia dan Belanda diadakan di bulan Oktober dan November di bawah pimpinan netral, seorang komisi khusus Inggris, Lord Killearn. Bertempat di bukit Linggariati dekat Cirebon. Dalam pertemuan ini, tercapai suatu persetujuan pada tanggal 15 November 1946 yang pokok-pokoknya adalah sebagai berikut:

- Belanda mengakui secara *de facto* Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan yang meliputi Sumatra, Jawa dan Madura. Belanda harus meninggalkan wilayah *de facto* paling lambat 1 Januari 1949
- Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama dalam membentuk Negara Indonesia Serikat, dengan nama Republik Indonesia Serikat yang salah satu bagiannya adalah Republik Indonesia
- Republik Indonesia Serikat dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya

Untuk ini Kalimantan dan Timur Raya akan menjadi komponennya. Sebuah Majelis Konstituante didirikan, yang terdiri dari wakil-wakil yang dipilih secara demokratis dan bagian-bagian komponen lain. Indonesia Serikat pada gilirannya menjadi bagian Uni Indonesia-Belanda bersama dengan Belanda, Suriname dan Curasao.

Kedua delegasi pulang ke Jakarta, dan Soekarno-Hatta kembali ke pedalaman dua hari kemudian, pada tanggal 15 November 1946, di rumah Sjahrir di Jakarta, berlangsung pamarafan secara resmi Perundingan Linggarjati. Sebenarnya Soekarno yang tampil sebagai kekuasaan yang memungkinkan tercapainya persetujuan, namun, Sjahrir yang diidentifikasi dengan rancangan, dan yang bertanggung jawab bila ada yang tidak beres.

Peristiwa yang Terjadi Terkait dengan Hasil Perundingan Linggarjati

Pada bulan Februari dan Maret 1947 di Malang, S.M. Kartosuwiryo ditunjuk sebagai salah seorang dari lima anggota Masyumi dalam komite Eksekutif, yang terdiri dari 47 anggota untuk mengikuti sidang KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat). Sidang tersebut membahas apakah

Persetujuan Linggarjati yang telah diparaf oleh Pemerintah Republik dan Belanda pada bulan November 1946 akan disetujui atau tidak.

Van. Mook kepala Netherland Indies Civil Administration (NICA) yang kemudian diangkat sebagai Gubernur Jendral Hindia Belanda, dengan gigih memecah RI yang tinggal 3 pulau ini. Bahkan sebelum naskah itu ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1947, ia telah memaksa terwujudnya Negara Indonesia Timur, dengan presiden Sukowati, lewat Konferensi Denpasar tanggal 18 - 24 Desember 1946.

Pada bulan tanggal 25 Maret 1947 hasil perjanjian Linggarjati ditandatangani di Batavia. Partai Masyumi menentang hasil perjanjian tersebut, banyak unsur perjuang Republik Indonesia yang tak dapat menerima pemerintah Belanda merupakan kekuasaan berdaulat di seluruh Indonesia. Dengan seringnya pecah kekacauan, maka pada prakteknya perjanjian tersebut sangat sulit sekali untuk dilaksanakan.

Proklamasi Negara Pasundan

Usaha Belanda tidak berakhir sampai di NIT. Dua bulan setelah itu, Belanda berhasil membujuk Ketua Partai Rakyat Pasundan, Soeria Kartalegawa, memproklamasikan Negara Pasundan pada tanggal 4 Mei 1947

Agresi Militer I

Pada tanggal 27 Mei 1947, Belanda mengirimkan Nota Ultimatum, yang harus dijawab dalam 14 hari, yang berisi:

1. Membentuk pemerintahan ad interim bersama
2. Mengeluarkan uang bersama dan mendirikan lembaga devisa bersama.
3. Republik Indonesia harus mengirimkan beras untuk rakyat di daerah-daerah yang diduduki Belanda.
4. Menyelenggarakan keamanan dan ketertiban bersama, termasuk daerah daerah Republik yang memerlukan bantuan Belanda (gendarmerie bersama).
5. Menyelenggarakan penilikan bersama atas impor dan ekspor.

Perdana Menteri Sjahrir menyatakan kesediaan untuk mengakui kedaulatan Belanda selama masa peralihan, tetapi menolak gendarmerie bersama Jawaban ini mendapatkan reaksi kers dari kalangan parpol-parpol di Republik.

Ketika jawaban yang memuaskan tidak kunjung tiba, Belanda terus mengembalikan ketertiban" dengan "tindakan kepolisian". Pada tanggal 20 Juli 1947 tengah malam (tepatnya 21 1947) mulailah pihak Belanda melancarkan 'aksi polisionil' mereka yang pertama.

Aksi Belanda rnenguasai semua pelabuhan perairan-dalam di Jawa di Sumatera perkebunan-perkebunan di sekitar Medan, instalasi-instalasi

minyak dan batubara di sekitar Palembang, dan daerah Padang diamankan. Melihat aksi Belanda yang tidak mematuhi perjanjian Linggarjati membuat Sjahrir bingung dan putus asa, maka pada bulan Juli 1947 dengan terpaksa mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Perdana Menteri, karena sebelumnya dia sangat menyetujui tuntutan Belanda dalam menyelesaikan konflik antara pemerintah RI dengan Belanda.

Naiknya Amir Syarifudin sebagai Perdana Menteri

Setelah terjadinya Agresi Militer Belanda I, pengganti Sjahrir adalah Aram Syarifudin yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Dalam kapasitasnya sebagai Perdana Menteri, dia mennggaet anggota PSII yang dulu untuk duduk dalam Kabinetnya. Termasuk menawarkan kepada S.M. Kartosoewirjo untuk turut serta duduk dalam kabinetnya menjadi Wakil Menteri Pertahanan kedua.

Perjanjian Renville

Sementara peper-angan sedang berlangsung, Dewan Keamanan PBB, atas desakan Australia dan mengeluarkan perintah peletakan senjata tanggal 1 Agustus 1947, dan segera setelah itu mendirikan suatu Komisi Jasa-jasa Baik, yang terdiri dari wakil wakil Australia, Belgia dan Amerika Serikat, untuk menengahi perselisihan.

Tanggal 17 Januari 1948 berlangsung konferensi di atas kapal perang Amerika Serikat, Renville ternyata rnenghasilkan persetujuan lain yang bisa diterima oleh yang kedua belan pihak yang berselisih pada tanggal 19 lanuari ditandatangani persetujuan Renville Wilayah Republik selama masa peralihan sampai penyelesaian akhir dicapai, bahkan lebih terbatas lagi ketimbang persetujuan Linggariati: hanya meliputi sebagian kecil Jawa Tengah (Jogja dan delapan Keresidenan) dan ujung barat pulau Jawa - Banten tetap daerah Republik Plebisit akan diselenggarakan untuk menentukan masa depan wilayah yang baru diperoleh Belanda lewat aksi Runtuhnya Kabinet Amir dan naiknya Hatta sebagai Perdana Menteri.

Hanya empat hari sesudah Perianjian Renville ditandatangani, pada tanggal 23 Januari1948, Arnir Syarifudin dan seluruh kabinetnya berhenti. Kabinet baru dibentuk dan susunannya diumumkan tanggal 29 Januari1948. Hatta menjadi Perdana Menteri sekaligus tetap rnemangku jabatan sebagai Wakil Presiden.

1948 – 1949

Agresi Militer II

Agresi Militer II terjadi pada 19 Desember 1948 yang dimulai dengan serangan terhadap Yogyakarta, ibu kota Indonesia saat itu, serta penangkapan Soekarno, Mohammad Hatta, Sjahrir dan beberapa tokoh

lainnya. Jatuhnya ibu kota negara ini menyebabkan dibentuknya Pemerintah Darurat Republik Indonesia di Sumatra yang dipimpin oleh Sjafruddin Prawiranegara.

Serangan Umum 1 Maret 1949 atas Yogyakarta

Serangan yang dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 1949 terhadap kota Yogyakarta secara besar-besaran yang direncanakan dan dipersiapkan oleh jajaran tertinggi militer di wilayah Divisi III/GM III berdasarkan instruksi dari Panglima Besar Sudirman, untuk membuktikan kepada dunia internasional bahwa TNI masih ada dan cukup kuat, sehingga dengan demikian dapat memperkuat posisi Indonesia dalam perundingan yang sedang berlangsung di Dewan Keamanan PBB dengan tujuan utama untuk mematahkan moral pasukan Belanda. Soeharto pada waktu itu sebagai komandan brigade X/Wehrkreis III turut serta sebagai pelaksana lapangan di wilayah Yogyakarta.

Perjanjian Roem Royen

Akibat dari Agresi Militer tersebut, pihak internasional melakukan tekanan kepada Belanda, terutama dari pihak Amerika Serikat yang mengancam akan menghentikan bantuannya kepada Belanda, akhirnya dengan terpaksa Belanda bersedia untuk kembali berunding dengan RI. Pada tanggal 7 Mei 1949, Republik Indonesia dan Belanda menyetujui Perjanjian Roem Royen.

Serangan Umum Surakarta

Serangan Umum Surakarta berlangsung pada tanggal 7-10 Agustus 1949 secara gerilya oleh Para pejuang, pelajar, dan mahasiswa. Pelajar dan mahasiswa yang berjuang tersebut kemudian dikenal sebagai tentara pelajar. Mereka berhasil membunuh dan menduduki markas-markas Belanda di Solo dan sekitarnya.

Konferensi Meja Bundar (KMB)

KMB adalah sebuah pertemuan antara pemerintah Republik Indonesia dan Belanda yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda dari 23 Agustus hingga 2 November 1949, yang menghasilkan kesepakatan:

- Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat.
- Irian Barat akan diselesaikan setahun setelah pengakuan kedaulatan.

Penyerahan kedaulatan oleh Belanda kepada Indonesia pada 2 Desember 1949, selang empat tahun setelah proklamasi kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945. Pengakuan ini dilakukan ketika *coeveriniteitsoverdracht* (penyerahan kedaulatan) ditandatangani di Istana Dam, Amsterdam. Di Belanda selama ini juga ada kekhawatiran bahwa

mengakui Indonesia merdeka pada tahun 1945 sama saja mengakui tindakan politionele actiec (aksi polisionil) pada 1945-1949 adalah ilegal.

TATA NEGARA

Lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut.

Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah salah satu lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yang terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah. Dahulu sebelum Reformasi MPR merupakan Lembaga Negara Tertinggi, yang terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Utusan Daerah, dan Utusan Golongan. Jumlah anggota MPR periode 2009-2014 adalah 692 orang, terdiri atas 560 Anggota DPR dan 132 anggota DPD. Masa jabatan anggota MPR adalah 5 tahun.

Tugas dan wewenang MPR antara lain:

1. Mengubah dan menetapkan (Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945), (Undang-Undang Dasar).
2. Melantik Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan hasil pemilihan umum.
3. Memutuskan usul DPR berdasarkan putusan (Mahkamah Konstitusi) untuk memberhentikan Presiden/Wakil Presiden dalam masa jabatannya.
4. Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya.
5. Memilih Wakil Presiden dari 2 calon yang diajukan Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya.
6. Memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya.

Anggota MPR memiliki hak mengajukan usul perubahan pasal-pasal UUD, menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan putusan, hak imunitas, dan hak protokoler. Setelah Sidang MPR 2003, Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat tidak lagi oleh MPR. MPR bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara.

Sidang MPR sah apabila dihadiri:

1. Sekurang-kurangnya 3/4 % dari jumlah Anggota MPR untuk memutus usul DPR untuk memberhentikan Presiden/Wakil Presiden.
2. Sekurang-kurangnya 2/3 % dari jumlah Anggota MPR untuk mengubah dan menetapkan UUD.
3. Sekurang-kurangnya 50% + 1 dari jumlah Anggota MPR sidang-sidang lainnya.

Putusan MPR sah apabila disetujui:

1. Sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Anggota MPR yang hadir untuk memutus usul DPR untuk memberhentikan Presiden/Wakil Presiden.
2. Sekurang-kurangnya 50% + 1 dari seluruh jumlah Anggota MPR untuk memutus perkara lainnya.

Sebelum mengambil putusan dengan suara yang terbanyak, terlebih dahulu diupayakan pengambilan putusan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Alat kelengkapan MPR terdiri atas:

1. Pimpinan
2. Panitia Ad Hoc
3. Badan Kehormatan.

Pimpinan MPR terdiri atas seorang ketua dan 4 orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh Anggota MPR dalam Sidang Paripurna MPR.

Pimpinan MPR periode 2009-2014 adalah:

1. Ketua: Taufiq Kiemas digantikan Sidarto Danusubroto pada 8 Juli 2013 (F-PDIP)
2. Wakil Ketua: Hajriyanto Y. Thohari (F-PG)
3. Wakil Ketua: Melani Leimena Suharli (F-PD)
4. Wakil Ketua : Lukman Hakim Saifudin (F-PPP)
5. Wakil Ketua : Ahmad Farhan Hamid (Kelompok DPD)

Berdasarkan UUD 1945 (sebelum perubahan), MPR merupakan lembaga tertinggi negara sebagai pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat. Perubahan UUD 1945 membawa implikasi terhadap kedudukan, tugas, dan wewenang MPR. Kini MPR berkedudukan sebagai lembaga tinggi negara yang setara dengan lembaga tinggi negara lainnya seperti Lembaga Kepresidenan, DPR, DPD, BPK, MA, dan MK

MPR juga tidak lagi memiliki kewenangan untuk menetapkan GBHN. Selain itu, MPR tidak lagi mengeluarkan Ketetapan MPR (TAP MPR), kecuali yang berkenaan dengan menetapkan Wapres menjadi Presiden, memilih Wapres apabila terjadi kekosongan Wapres, atau memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila Presideh dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamasama.

Undang-undang yang mengatur susunan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dewasa ini ialah Undang-Undang No. 16 tahun 1969 jo. UU No. 5 Tahun 1975, tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Tugas Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebelum amandemen adalah:

1. Menetapkan Undang-Undang Dasar.
2. Menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara.
3. Memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden.
4. MPR dapat memberhentikan Presiden sebelum habis masa jabatannya.

PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD, dan dalam melakukan kewajibannya dibantu oleh Wakil Presiden. (Pasal 4) Presiden berhak mengajukan RUU, dan menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan UU (Pasal 5).

Tugas dan wewenang Presiden antara lain:

1. Memegang kekuasaan tertinggi atas AD, AL dan AU (Pasal 10).
2. Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan Negara lain dengan persetujuan DPR, terutama yang menimbulkan akibat yang lugs dan mendasar bagi Negara (Pasal 11).
3. Menyatakan keadaan bahaya, yang syarat dan akibatnya ditetapkan dengan UU (Pasal 12)
4. Mengangkat dan menerima duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 13).
5. Presiden memberikan grasi dengan pertimbangan MA, dan memberikan amnesti dan abolisi dengan pertimbangan DPR (Pasal 14).
6. Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan menurut UU (Pasal 15).
7. Presiden membentuk dewan pertimbangan yang bertugas memberi nasehat dan pertimbangan kepada Presiden (Pasal 16).
8. Presiden juga berhak mengangkat menteri-menteri sebagai pembantu Presiden (Pasal 17).

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR)

Dewan Perwakilan Rakyat adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat dan memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang. DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum, yang dipilih berdasarkan hasil Pemilihan Umum. Anggota DPR periode 2009-2014 berjumlah 560 orang. Masa jabatan anggota DPR adalah 5 tahun, dan berakhir bersamaan pada saat anggota DPR yang Baru mengucapkan sumpah/janji.

Sejarah DPR RI dimulai sejak dibentuknya Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) oleh Presiden pada tanggal 29 Agustus 1945 di Gedung Kesenian, Pasar Baru Jakarta yang kemudian dijadikan sebagai hari lahir DPR RI. Dalam Sidang KNIP yang pertama dipilih Mr. Kasman

Singodimedjo sebagai Ketua

Tugas dan wewenang DPR antara lain:

1. Membentuk Undang-Undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
2. Membahas dan memberikan persetujuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
3. Menerima dan membahas usulan RUU yang diajukan DPD yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikutsertakannya dalam pembahasan.
4. Menetapkan APBN bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD.
5. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN, serta kebijakan pemerintah.
6. Memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan dengan memperhatikan pertimbangan DPD.
7. Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan negara yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
8. Memberikan persetujuan kepada Presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial.
9. Memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.
10. Memilih tiga orang calon anggota hakim konstitusi dan mengajukannya kepada Presiden untuk ditetapkan.
11. Memberikan pertimbangan kepada Presiden untuk mengangkat duta, menerima penempatan duta negara lain, dan memberikan pertimbangan dalam pemberian amnesti dan abolisi.
12. Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang, membuat peramaian, dan perjanjian dengan negara lain.
13. Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
14. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.
15. Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang diajukan oleh DPD terhadap pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama.

Pada anggota DPP melekat hak judikasi dan legislasi yakni berupa hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Anggota DPR juga memiliki hak mengajukan RUU mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, membela diri, hak imunitas, serta hak protokoler.

Menurut Undang Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, DPR berhak

meminta pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan.

Alat kelengkapan DPR terdiri atas:

1. Pimpinan

Kedudukan Pimpinan dalam DPR dapat dikatakan sebagai Juru Bicara Parlemen. Fungsi pokoknya secara umum adalah mewakili DPR secara simbolis dalam berhubungan dengan lembaga eksekutif, lembaga-lembaga tinggi negara lain, dan lembaga-lembaga internasional, serta memimpin jalannya administratif kelembagaan secara umum, termasuk memimpin rapat-rapat paripurna dan menetapkan sanksi atau rehabilitasi. Pimpinan DPR bersifat kolektif kolegial, terdiri dari seorang ketua dan 4 orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh Anggota DPR dalam Sidang Paripurna DPR.

2. Komisi

Komisi adalah unit kerja utama di dalam DPR. Hampir seluruh aktivitas yang berkaitan dengan fungsi-fungsi DPR, substansinya dikerjakan di dalam komisi. Setiap anggota DPR (kecuali pimpinan) harus menjadi anggota salah satu komisi. Pada umumnya, pengisian keanggotaan komisi terkait erat dengan latar belakang keilmuan atau penguasaan anggota terhadap masalah dan substansi pokok yang digeluti oleh komisi.

Pada periode 2009-2014, DPR mempunyai 11 komisi dengan ruang lingkup tugas dan pasangan kerja masing-masing:

1. Komisi I, membidangi pertahanan, luar negeri, dan informasi.
2. Komisi II, membidangi pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, aparatur negara, dan agraria.
3. Komisi III, membidangi hokum dan perundang-undangan, hak asasi manusia, dan keamanan.
4. Komisi IV, membidangi pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan, dan pangan.
5. Komisi V, membidangi perhubungan, telekomunikasi, pekerjaan umum, perumahan rakyat, pembangunan pedesaan dan kawasan tertinggal.
6. Komisi VI, membidangi perdagangan, perindustrian, investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah), dan badan usaha milik negara.
7. Komisi VII membidangi energi, sumber daya mineral, riset dan teknologi, dan lingkungan.
8. Komisi VIII membidangi agama, social dan pemberdayaan perempuan.
9. Komisi IX, membidangi kependudukan, kesehatan, tenaga kerja

dan transmigrasi.

10. Komisi X, membidangi pendidikan, pemuda, Olah Raga, pariwisata, kesenian, dan kebudayaan.
11. Komisi XI, membidangi keuangan, perencanaan pembangunan nasional, perbankan, dan lembaga keuangan bukan bank.

3. Badan Musyawarah

Bamus merupakan miniatur DPR. Sebagian besar keputusan penting DPR digodok terlebih dahulu di Bamus, sebelum dibahas dalam Rapat Paripurna sebagai forum tertinggi di DPR yang dapat mengubah putusan Bamus. Bamus antara lain memiliki tugas menetapkan acara DPR, termasuk mengenai perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, serta jangka waktu penyelesaian dan prioritas RUU).

Pembentukan Bamus sendiri dilakukan oleh DPR melalui Rapat Paripurna pada permulaan masa keanggotaan DPR. Anggota Bamus berjumlah sebanyak-banyaknya sepersepuluh dari anggota DPR, berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi. Pimpinan Bamus langsung dipegang oleh Pimpinan DPR

4. Badan Anggaran

Badan Anggaran DPR dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap yang memiliki tugas pokok melakukan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Susunan keanggotaan Badan Anggaran ditetapkan pada permulaan masa keanggotaan DPR. Susunan keanggotaan Badan Anggaran terdiri atas anggota-anggota seluruh unsur Komisi dengan memperhatikan perimbangan jumlah anggota fraksi.

5. Badan Kehormatan

BK DPR melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota DPR, dan pada akhirnya memberikan laporan akhir berupa rekomendasi kepada pimpinan DPR sebagai bahan pertimbangan untuk menjatuhkan sanksi atau merehabilitasi nama baik anggota. Rapat-rapat Dewan Kehormatan bersifat tertutup. Tugas Dewan Kehormatan dianggap selesai setelah menyampaikan rekomendasi kepada Pimpinan DPR.

6. Badan Legislasi

Badan Legislasi (Baleg) merupakan alat kelengkapan DPR yang lahir pasca Perubahan Pertama UUD 1945, dan dibentuk pada tahun 2000. Tugas pokok Baleg antara lain: merencanakan dan menyusun program serta urutan prioritas pembahasan RUU untuk satu masa keanggotaan

DPR dan setiap tahun anggaran. Baleg juga melakukan evaluasi dan penyempurnaan tata tertib DPR dan kode etik anggota DPR.

Badan Legislasi dibentuk DPR dalam Rapat paripurna, dan susunan keanggotaannya ditetapkan pada permulaan masa keanggotaan DPR berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi. Keanggotaan Badan Legislasi tidak dapat dirangkap dengan keanggotaan Pimpinan Komisi, keanggotaan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), dan keanggotaan Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP).

7. Badan Urusan Rumah Tangga

Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR bertugas menentukan kebijakan kerumahtanggaan DPR. Salah satu tugasnya yang berkaitan bidang keuangan/administratif anggota dewan adalah membantu pimpinan DPR dalam menentukan kebijakan kerumahtanggaan DPR, termasuk kesejahteraan Anggota dan Pegawai Sekretariat Jenderal DPR berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah.

8. Badan Kerja Sama Antar-Parlemen Badan Kerja Sama Antar-Parlemen, yang selanjutnya disingkat BKSAP, dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap. DPR menetapkan susunan dan keanggotaan BKSAP pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang. Jumlah anggota BKSAP ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR dan pada permulaan tahun sidang. Pimpinan BKSAP merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial, yang terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua, yang dipilih dari dan oleh anggota BKSAP berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan memperhatikan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.

BKSAP bertugas:

1. Membina, mengembangkan, dan meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama antara DPR dan parlemen negara lain, baik secara bilateral maupun multilateral, termasuk organisasi internasional yang menghimpun parlemen dan atau anggota parlemen negara lain.
2. Menerima kunjungan delegasi parlemen negara lain yang menjadi tamu DPR
3. Mengoordinasikan kunjungan kerja alat kelengkapan DPR ke luar negeri
4. Memberikan saran atau usul kepada pimpinan DPR tentang masalah kerja sama antarparlemen

9. Panitia Khusus

Jika dipandang perlu, DPR (atau alat kelengkapan DPR) dapat membentuk panitia yang bersifat sementara yang disebut Panitia Khusus (Pansus). Komposisi keanggotaan Pansus ditetapkan oleh rapat paripurna berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi. Pansus bertugas melaksanakan tugas tertentu yang ditetapkan oleh rapat paripurna, dan dibubarkan setelah jangka waktu penugasannya berakhir atau karena tugasnya dinyatakan selesai. Pansus bertanggungjawabkan kinerjanya untuk selanjutnya dibahas dalam rapat paripurna.

DPR dalam permulaan masa keanggotaan dan permulaan tahun sidang DPR membuat susunan dan keanggotaan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) yang beranggotakan paling sedikit tujuh orang dan paling banyak sembilan orang atas usul dari fraksi-fraksi DPR yang selanjutnya akan ditetapkan dalam rapat paripurna dengan tugas untuk penelaahan setiap temuan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK)

Anggota DPR tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, hakim pada badan peradilan, pegawai negeri sipil, anggota TNI/Polri, pegawai pada BUMN/BUMD atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD.

Keanggotaan DPR dipilih melalui pemilu. DPR bersidang sedikitnya sekali dalam setahun (Pasal 19). DPR memegang kekuasaan membentuk UU, dan setiap RUU dibahas oleh DPR dan Presiden secara bersama-sama dan selanjutnya disahkan oleh Presiden.

Fungsi DPR adalah sebagai berikut:

1. Fungsi legislasi berkaitan dengan wewenang DPR dalam pembentukan undang-undang.
2. Fungsi anggaran, berwenang menyusun dan menetapkan RAPBN bersama presiden.
3. Fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pemerintah.

DPR diberikan hak-hak yang diatur dalam pasal-pasal UUD 1945, antara lain:

1. Hak interpelasi, hak DPR untuk meminta keterangan pada presiden.
2. Hak angket, hak DPR untuk mengadakan penyelidikan atas suatu kebijakan Presiden/ Pemerintah.
3. Hak menyampaikan pendapat.
4. Hak mengajukan pertanyaan.
5. Hak imunitas, hak DPR untuk tidak dituntut dalam pengadilan.
6. Hak mengajukan usul RUU.

Anggota DPR berhak mengajukan usul RUU (Pasal 21). Dalam hal kepentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Perpu, dan pada

masa persidangan DPR berikutnya Perpu tersebut harus dimintakan persetujuan DPR. Apabila DPR tidak menyetujuinya maka Perpu harus dicabut (Pasal 22). Anggota DPR dapat diberhentikan dari jabatannya, dengan syarat-syarat dan tata cara yang diatur dengan undang-undang (Pasal 22B).

DEWAN PERWAKILAN

Visi

Terwujudnya Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) sebagai lembaga legislatif yang kuat, setara dan efektif dalam memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah menuju masyarakat Indonesia yang bermartabat, sejahtera, dan berkeadilan ualam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Misi

Berdasarkan visi tersebut, rurnusan rnisi DPD RI masa bakti 2004-2009, disepakati sebagai berikut:

1. Memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah untuk mewujudkan pemerataan pembangunan kesejahteraan rakyat dalam rangka memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia secara berkesimbangan.
2. Mendorong perhatian yang lebih besar dari pemerintah pusat terhadap isu-isu penting di daerah
3. Memperjuangkan penguatan status DPD RI sebagai salah satu badan legislatif dengan fungsi dan kewenangan penuh untuk mengajukan usul, ikut membahas, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang, terutama yang menyangkut kepentingan daerah.
4. Meningkatkan fungsi dan wewenang DPD RI untuk memperkuat sistem *check and balance* melalui arandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
5. Mengembangkan pola hubungan dan kerja sama yang sinergis dan strategis dengan pemilik kepentingan utama di daerah dan di pusat.

Anggota DPD dipilih dari setiap provinsi melalui pemilu setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota DPD tidak lebin dari 1/3 jumlah anggota DPR. DPD bersidang sedikitnya sekali dalam setahun (Pasal 22C).

DPD berhak rnengajukan RUU kepada DPR dan ikut rnembahasnya yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan SDE serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat-daerah, serta memberi pertimbangan atas RUU APBN yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama (Pasal 22D). DPD dapat melakukan pengawasan terhadap UU yang usuiian dan pembahasannya dimiliki oleh DPD.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 49 dan 50 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD bahwa Anggota DPD mempunyai hak kewajiban sebagai berikut:

Hak

1. Menyampaikan usul dan pendapat.
2. Memilih dan membela diri
3. Imunitas.
4. Protokoler
5. Keuangan dan administratif.
6. Mengamalkan Pancasila.
7. Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati segala peraturan perundang-undangan.
8. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
9. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia;
10. Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat;
11. Menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan daerah;
12. Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan.
13. Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada pemilih dan daerah pemilihannya.
14. Menaati kode etik dan Peraturan Tata Tertib DPD
15. Menjaga etika dan norma adat daerah yang diwakilinya.

Kewajiban

Berkenaan dengan kewajiban tersebut, hal itu mempertegas fungsi politik legislatif Anggota DPD RI yang meliputi representasi, legislasi dan pengawasan yang didirikan oleh sifat kekuatan mandatnya dari rakyat pemilih yaitu sifat "otoritatif" atau mandat rakyat kepada Anggota; di samping itu ciri sifat ikatan atau "binding" yaitu ciri melekatnya pemikiran dan langkah kerja Anggota DPD RI yang sernata-mata didasarkan pada kepentingan dan keberpihakan pada rakyat daerah

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Dalam rangka pelaksanaan Pemilu agar terselenggara sesuai asas (luber-judil), maka dibentuklah sebuah komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri (Pasal 22E). KPU selain ada ditingkat pusat, juga terdapat KPU daerah baik di provinsi maupun kabupaten/kota.

BANK SENTRAL

Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggungjawab, dan independensinya diatur dengan UU (Pasal 23D).

BADAN PENAWAS KEUANGAN

Pasal 23 ayat (5) UUD Tahun 1945 menetapkan bahwa untuk memeriksa tanggung jawab tentang Keuangan Negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang peraturannya ditetapkan dengan Undang-Undang. Hasil pemeriksaan itu disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

MPRS dengan Ketetapan No. X/MPRS/1966 mengembalikan kedudukan BPK RI pada posisi dan fungsi semula sebagai Lembaga Tinggi Negara. Sehingga UU yang mendasari tugas BPK RI perlu diubah dan akhirnya baru direalisasikan pada Tahun 1971 dengan UU No 5 Tahun 1971 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Dalam era Reformasi sekarang ini, Badan Pemeriksa Keuangan telah mendapatkan dukungan konstitusional dari MPR RI dalam Sidang Tahunan Tahun 2002 yang memperkuat kedudukan BPK RI sebagai lembaga pemeriksa eksternal bidang Keuangan Negara, yaitu dengan dikeluarkannya TAP MPR No. VI/MPR/2002 yang antara lain menegaskan kembali kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa eksternal keuangan negara dan peranannya perlu lebih ditingkatkan sebagai lembaga yang independen dan profesional.

Untuk lebih menantapkan tugas BPK RI, ketentuan yang mengatur BPK RI dalam UUD Tahun 1945 telah diamandemen. Sebelum amandemen BPK RI hanya diatur dalam satu ayat (pasal 23 ayat 5) kemudian dalam Perundang-Undangan Ketiga UUD 1945 dikembangkan menjadi satu bab tersendiri (Bab VIII A) dengan tiga pasal (23E, 23F, dan 23G) dan tujuh ayat.

Untuk menunjang tugasnya, BPK RI didukung dengan seperangkat Undang-Undang di bidang Keuangan Negara, yaitu;

- UU No.17 Tahun 2003 Tentang keuangan Negara.
- UU No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
- UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Visi

Menjadi lembaga pemeriksa keuangan negara yang bebas, mandiri, dan profesional serta berperan aktif dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan.

Misi

Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam rangka mendorong terwujudnya akuntabilitas dan transparansi keuangan negara, serta berperan aktif dalam mewujudkan pemerintah yang baik, bersih, dan transparan.

Tujuan Strategis

1. Mewujudkan BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara yang independen dan profesional.
2. BPK mengedepankan nilai-nilai independensi dan profesionalisme dalam semua aspek tugasnya menuju terwujudnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara.
3. Memenuhi semua kebutuhan dan harapan pemilik kepentingan BPK bertujuan memenuhi kebutuhan dan harapan pemilik kepentingan, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan masyarakat pada umumnya dengan menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu kepada pemilik kepentingan atas penggunaan, pengelolaan, keefektifan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara.
4. Mewujudkan BPK sebagai pusat regulator di bidang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
5. BPK bertujuan menjadi pusat pengaturan di bidang pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang berkekuatan hukum mengikat, yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas, wewenang dan fungsi BPK sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
6. Mendorong terwujudnya tata kelola yang baik atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
7. BPK bertujuan untuk mendorong peningkatan pengelolaan keuangan negara dengan menetapkan standar yang efektif, mengidentifikasi penyimpangan, meningkatkan sistem pengendalian intern, menyampaikan temuan dan rekomendasi kepada pemilik kepentingan dan menilai efektivitas tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Nilai-Nilai Dasar:

1. Independensi

BPK RI adalah lembaga negara yang independen di bidang organisasi, legislasi, dan anggaran serta bebas dari pengaruh lembaga negara lainnya.

2. Integritas

BPK RI menjunjung tinggi integritas dengan mewajibkan setiap pemeriksa dalam melaksanakan tugasnya, menjunjung tinggi Kode Etik Pemeriksa dan Standar Perilaku Profesional.

3. Profesionalisme

BPK RI melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesionalisme pemeriksaan keuangan negara, kode etik, dan nilai-nilai kelembagaan organisasi.

MAHKAMAH AGUNG (MA)

Mahkamah Agung adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi.

Menurut Undang-Undang Dasar 1945, kewajiban dan wewenang MA adalah:

1. Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundangundangan di bawah Undang-Undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang.
2. Mengajukan 3 orang anggota Hakim Konstitusi.
3. Memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberi grasi dan rehabilitasi.

Mahkamah Agung dipimpin oleh seorang ketua. Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung, dan diangkat oleh Presiden. Muhammad Hata All menjabat Mahkamah Agung pada periode 1 Maret 2012 hingga April 2017.

Pada Mahkamah Agung terdapat hakim agung sebanyak maksimal 60 orang. Hakim agung dapat berasal dari sistem karier (hakim), atau tidak berdasarkan sistem karier dari kalangan profesi atau akademisi.

Calon hakim agung diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat, untuk kemudian mendapat persetujuan dan ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, dan dilakukan oleh sebuah MA dan badan peradilan yang ada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, agama, militer, tata usaha Negara, dan sebuah Mahkamah Konstitusi (Pasal 24). MA berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah UU terhadap UU. Hakim Agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Calon Hakim Agung diusulkan komisi yudisial kepada DPR untuk mendapat persetujuan dan ditetapkan oleh Presiden. Ketua dan Wakil MA dipilih dari dan oleh Hakim Agung (Pasal 24A).

KOMISI YUDISIAL

Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Anggota komisi yudisial harus memiliki pengetahuan dan penga-

laman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. Anggota komisi yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR (Pasal 24B).

MAHKAMAH KONSTITUSI (MK)

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung.

Sejarah berdirinya MK diawali dengan Perubahan Ketiga UUD 1945 dalam Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B yang disahkan pada 9 November 2001. Setelah disahkannya Perubahan Ketiga UUD 1945, maka dalam rangka menunggu pembentukan Mahkamah Konstitusi, MPR menetapkan Mahkamah Agung menjalankan fungsi MK untuk sementara sebagaimana diatur dalam Pasal HI Aturan Peralihan UUD 1945 hasil Perubahan Keempat.

DPR dan Pemerintah kemudian membuat Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi. Setelah melalui pembahasan mendalam, DPR dan Pemerintah rnenyetujui secara bersama Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada 13 Agustus 2003 dan disahkan oleh Presiden pada hari itu. Dua hari kemudian, pada tanggal 15 Agustus 2003, Presiden mengambil sumpah jabatan para hakim konstitusi di Istana Negara pada tanggal 16 Agustus 2003.

Menurut Undang-Undang Dasar 1945, kewajiban dan wewenang MK adalah:

1. Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum.
2. Wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden menurut UUD 1945.

Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh Hakim Konstitusi untuk masa jabatan 3 tahun. Ketua MK periode 2013-2016 adalah Hamdan Zoelva.

Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 Hakim Konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden. Hakim Konstitusi diajukan masing-masing 3 orang oleh Mahkamah Agung, 3 orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan 3 orang oleh Presiden. Masa jabatan Hakim Konstitusi adalah 5 tahun, dan dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya.

MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran parpol dan perselisihan hasil pemilu MK wajib memberi putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil menurut UUD. MK mempunyai 9 anggota hakim konstitusi yang ditetapkan Presiden masing-masing 3 orang diajukan oleh MA, DPR, dan Presiden. Ketua dan wakil ketua MK dipilih dari dan oleh hakim konshtusi. Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercea, adil, negarawan, yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat Negara (Pasal 24C).

Sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi adalah presiden. Pemegang kekuasaan legislatif adalah DPR Untuk kekuasaan yudikatif ditentukan pelakunya adalah MA dan MK. Selain lembaga lembaga negara tersebut, terdapat lembaga negara lain yang diperlukan dalam penyelenggaraan negara dan kedudukannya sederajat. Lembaga negara lain tersebut adalah MPR yang memegang kekuasaan mengubah dan menetapkan UUD, BPK sebagai pelaksana kekuasaan auditif serta DPD yang walaupun tidak memegang kekuasaan legisiatif memiliki peran dalam proses legislasi (co-legislator).

BAHASA INDONESIA EJAAN YANG DISEMPURNAKAN (EYD)

Ejaan adalah keseluruhan peraturan bagaimana menggambarkan lambang-lambang bunyi ujaran dan bagaimana interrelasi antara lambang-lambang itu dalam sutau bahasa. Dalam sistem ejaan suatu bahasa ditetapkan (a) bagaimana fonem dilambangkan dengan huruf, (b) bagaimana satuan-satuan morfologis, seperti kata dasar, kata ulang, kata berimbuhan, dan kata majemuk dituliskan: (c) bagaimana menuliskan kalimat dan bagian-bagian kalimat; serta (d) bagaimana pemakaian tanda baca.

Penggunaan huruf, penulisan kata, dan penggunaan tanda baca tidak boleh diabaikan karena akan mengakibatkan perbedaan makna. Bandingkan contohcontoh berikut:

1. a. Saya baru saja datang dari Barat (dari Eropa).
 b. Saya baru saja datang dari barat (dari arah barat).
2. a. Ini adalah buku sejarah-baru (sejarah baru).
 b. Ini adalah buku- sejarah baru (buku sejarah yang baru).
3. a. Orang itu bernama Sarjono S.H (Sastro Hadiprawiro)
 b. Orang itu bernama Sarjono, S.H. (Sarjana Hukum)

Pemakaian Huruf

Huruf yang digunakan adalah huruf latin dari /a/ sampai dengan /z/. Huruf-huruf /q/ dan /x/ tidak digunakan untuk menuliskan kata-kata bahasa Indonesia, kecuali untuk menuliskan nama atau istilah. Huruf-huruf yang tidak dapat menempati posisi akhir adalah /c/, /ny/, /v/, /w/, dan /y/.

Pemenggalan Suku Kata

Pemenggalan suku kata digunakan jika kata terpisah oleh pergantian baris. Cara pemenggalan adalah sebagai berikut:

1. Jika ada dua vokal berurutan, pemenggalan dilakukan antara vokal pertama dengan vokal kedua; misalnya *ma-in, la-ut*.
2. Huruf diftong tidak boleh dipenggal; misalkan *sau-da-ra, au-la*.
3. Jika ada dua vokal yang mengapit sebuah konsonan, pemenggalannya dilakukan antara vokal pertama dengan konsonan; misalnya: *a-da, na-da*.
4. Jika terdapat dua konsonan atau lebih secara berurutan, pemenggalannya dilakukan antara konsonan pertama dengan konsonan kedua; misalnya *cap-lok, infra, in-truk-si*.
5. Imbuhan termasuk morfonemiknya dipenggal sebagai satu kesatuan; misalnya *pe-la-jar-an, trans-mi-g-ra-si*.
6. Kata yang terdiri atas dua unsur dipenggal atas unsur-unsurnya misalnya: *ki-lo-gram, bi-o-gra-fi*.

Catatan:

Dalam pergantian baris akhiran (-i) dan suku kata yang terdiri atas satu vokal tidak boleh dipisahkan; misalnya: *meng-a-lami, a-kan, itu*.

Penulisan Huruf Kapital

Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama:

1. Awal kalimat: *Dia mengantuk*.
2. Awal petikan langsung, misalnya Ibu berkata, "*Kapan Anda pulang?*" "*Kapan Anda pulang, tanya Ibu "sebaiknya besok saja"*.
3. Dalam ungkapan yang berhubungan dengan nama tahun dan kitab suci termasuk kata ganti untuk Tuhan, misalnya: *Yang Mahakuasa, Yang Maha Esa, Alquran, hamba-Mu*.
4. Nama gelar kehormatan, keagamaan, dan keturunan yang diikuti nama orang misalnya: *Mahaputra Yamin, Roden Ayu Murtini, Haji Agus Salim*.
5. Unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang, nama instansi dan nama tempat, misalnya: *Presiden Habibie, Menteri Agama, Gubernur Irian Jaya*.

6. Unsur nama orang, misalnya : *Amir Hamzah Dewi Sartika, Abdul Karim Al Ashari*. Jika nama itu telah berubah menjadi nama jenis atau nama satuan ukuran, nama tersebut tidak ditulis dengan huruf kapital, misalnya: 10 volt, 200 watt.
7. Nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa misalnya: *bangsa Arab, suku Sunda, bahasa Inggris*.
8. Nama tahun, bulan, hari, hari raya, dan peristiwa sejarah, misalnya: *tahun Masehi, bulan April, hari Lebaran, Perang Candu*.
9. Nama geografi, misalnya: *Sungai Citarum, Pulau Jawa*, dan sebagainya. Jika nama geografi digunakan sebagai nama jenis, nama geografi tersebut ditulis dengan huruf kecil, misalnya: *gula jawa, jeruk garut, garam inggris, salak pondoh*.
10. Unsur nama negara, lambang pemerintahan, serta nama dokumen resmi, misalnya: *Republik Indonesia, Keputusan Presiden RI*.
11. Setiap unsur bentuk ulang sempurna yang dipakai sebagai nama badan, lembaga pemerintah serta nama dokumen resmi, misalnya: *Yayasan Ilmu-Imu Sosial, Undang-Undang Dasar 1945*.
12. Semua kata di dalam nama buku, majalah, surat kabar, judul karangan, kecuali kata tugas, misalnya: *dari, ke, yang*, dan sebagainya yang tidak menduduki posisi awal, misalnya: *Dari Ave Maria ke Jalan lain ke Roma, Pelajaran Bahasa Indonesia untuk Siswa SMP Kelas VII*.
13. Unsur singkatan nama orang, gelar, dan sapaan, misalnya: *Drs, Tn.S.H*.
14. Kata penunjuk hubungan kekerabatan yang dipakai sebagai sapaan dan pengacuan, misalnya: *Ibu Lurah, Pak Guru*.

Penulisan Huruf Miring

Huruf miring adalah huruf yang dicetak miring, pada tulisan tangan atau ketikan, huruf miring ialah huruf yang digarisbawahi.

Huruf miring dipakai:

1. Untuk penulisan nama buku, majalah dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan, misalnya: *Negara Kertagama, Suara Karya*.
2. Untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, kata atau kelompok kata, misalnya: *bab ini tidak membicarakan*.
3. Untuk menuliskan kata nama ilmiah atau ungkapan asing yang belum disesuaikan ejaannya, misalnya: *politik divide et impera, gnetum gnemon, oryza saliva*.

Penulisan Kata

A. Kata Dasar

Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan, misalnya: *Ibu percaya bahwa engkau tahu*.

B. Kata Turunan

1. Imbuhan ditulis serangkai dengan kata dasarnya, misalnya: *bergeletar, penetapan, mempermainkan*.

2. Jika bentuk dasarnya berupa gabungan kata, imbuhan ditulis serangkai dengan kata mengikuti atau mendahuluinya, misalnya: *bertepuk tangan, sebar luaskan, bertanggung jawab, garis bawah, tondo tangani*.
3. Jika bentuk dasarnya berupa gabungan kata dengan sekaligus mendapat awalan dan akhiran, unsur gabungan itu harus ditulis serangkai, misalnya: *menggarisbawahi, dilipatgandakan, mempertanggungjawabkan, men galihbahasakan*.
4. Jika salah satu unsur gabungan hanya dipakai dalam kombinasi, gabungan kata itu harus ditulis serangkai, misalnya: *adipati, aerodinamika, antarkota, prasangka, purnawirawan, paccasarjana*.

Catatan:

- (1) Jika bentuk terikat tersebut diikuti oleh kata yang huruf awalnya huruf kapital diantara kedua unsur ditulis tanda hubung, misalnya: *non — Indonesia, antar-SMA*.
- (2) Bentuk terikat (maha-) ditulis terpisah jika diikuti oleh kata esa dan kata yang bukan kata dasar, misalnya: *Maha Esa, Mahn Pengasih*.

C. Bentuk Ulang

Bentuk ulang ditulis secara lengkap dengan menggunakan tanda hubung, misalnya: *anak-anak, buah-buahan, buku-buku, tunggang-langgang, dibesarbesarkan, bermain-main, buah-buahan*.

D. Gabungan Kata

1. Gabungan kata ditulis terpisah, misalnya: *duta besar, meja tulis, orang tua, rumah sakit*.
2. Gabungan kata yang mungkin dapat menimbulkan salah arti dapat ditulis dengan menggunakan tanda hubung, misalnya: *alat pandang - dengar, ibu - bapak kami, orang - tua muda*.
3. Gabungan kata berikut ditulis serangkai: *acapkali, adakalanya, bilamana, bismillah, bumiputra, kilometer, daripada, dukacita, halalbihalal, hulubalang, kacamata, kasatmata, keretabahasa, manakala, manasuka, matahari, olahraga, peribahasa, puspawarna, radioaktif saputangan, sediakala, segitiga, sukacita, sukarela, syahbandar, titimangsa*.
4. Klitik (-ku), (-mu), dan (-nya) ditulis serangkai, misalnya: *kuambil, bukuku, bajumu, dipukulnya*.
5. Kata depan ditulis terpisah, misalnya: *ke luar, ke sana, di depan*. Kata-kata keluar (antonim kata masuk), *kesamping, kemari* ditulis serangkai.
6. Kata sandang *si* dan *sang* ditulis terpisah, misalnya: *si pengirim, sang raja*.
7. Partikel (-fah), (-kah), dan (-tah) ditulis serangkai, misalnya: *apakah,*

cobalah, apatah.

8. Partikel *per* ditulis terpisah jika berarti mulai, demi, dan setiap, misalnya: *per April, satu per satu, per lembar.*

Penulisan Singkatan

Singkatan dibagi menjadi dua macam yaitu singkatan biasa (disebut singkatan) dan akronim.

- A. Singkatan adalah kata atau gabungan kata yang dipendekkan dengan satu huruf atau lebih:
- Singkatan nama-nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan titik, misalnya:
A.S. Kramawijaya
M.B.A (Master of Business Administration)
Bpk. (Bapak)
Kol. (Kolonel)
 - Singkatan nama resmi lembaga pemerintah dan ketatanegaraan badan atau organisasi, serta nama organisasi serta nama dokumen resmi yang terdiri atas huruf awal kata dituli dengan huruf kapital dan tidak diikuti dengan tanda titik, misalnya:
DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)
PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia)
MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat)
 - Singkatan umum yang terdiri atas tiga huruf atau lebih satu tanda titik, misalnya:
dll (dan lain-lain)
hlm (halaman)
Yth. Sdr. Moh. Hasan

Perhatikan singkatan yang menggunakan dua huruf berikut!

- a.n. (atas nama)
 - d.a. (dengan alamat)
 - u.b. (untuk beliau)
 - u.p. (untuk perhatian)
 - s.d. (sampai dengan)
- d. Lambang kimia, singkatan satuan ukuran, timbangan dan mata uang tidak diikuti dengan tanda titik, misalnya:
- | | |
|-------------|------------------------------------|
| Cu | (Cuprum) |
| TNT | (trinitrotoluen) |
| L | (liter) |
| cm | (centimeter dilafalkan sentimeter) |
| Rp 5.000,00 | (lima ribu rupiah) |

- B. Akronim adalah singkatan yang berupa gabungan huruf awal, gabungan suku kata, ataupun gabungan huruf dan suku kata dari deret kata yang diperlakukan sebagai kata.

- a. Akronim nama dari yang berupa gabungan huruf awal dari deret kata yang diperlakukan sebagai kata, misalnya:

TNI	(Tentara Nasional Indonesia)
LAN	(Lembaga Administrasi Negara)
MPR	(Majelis Permusyawaratan Rakyat)
DPR	(Dewan Perwakilan Rakyat)

- b. Akronim nama dari yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal huruf kapital, misalnya:

Iwapi	(Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia)
Kowani	(Kongres Wanita Indonesia)
Kowad	(Korps Wanita Angkatan Darat)

- c. Akronim yang bukan nama dari yang gabungan huruf, suku kata, ataupun gabungan huruf dan suku kata dari deret kata seluruhnya ditulis dengan huruf kecil, misalnya:

pemilu	(pemilihan umum)
rapim	(rapat pimpinan)

Penulisan Angka dan Lambang Bilangan

1. Angka dipakai untuk menyatakan lambang bilangan atau nomor. Dalam tulisan lazim digunakan angka arab atau angka romawi.

Angka arab: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Angka romawi : I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, L, C, D, M.

2. Angka digunakan untuk menyatakan (i) ukuran panjang, berat, luas dan isi, (ii) satuan waktu, (iii) nilai uang, dan (iv) kuantitas, misalnya:

(i)	0,5 sentimeter
	10 liter
(ii)	1 jam 20 menit
	pukul 15.00
(iii)	Rp5.000.000,00
	50 dolar Amerika
	2.000 rupiah
(iv)	27 orang

3. Angka lazim dipakai untuk melambangkan nomor jalan, rumah, atau kamar pada alamat, misalnya: Jalan Tanah Abang Nomor 3, *Hotel J. W. Marriot, kamar 67*

4. Angka digunakan juga untuk menomori bagian karangan dan ayat kitab suci, misalnya:

Bab X, pasal 5, halaman 252
Surat Yasin: 9

5. Penulisan lambang bilangan yang dengan huruf dilakukan sebagai berikut:
 - a. Bilangan utuh
dua belas
dua puluh dua
 - b. Bilangan pecahan
setengah
seperenam belas
seperseratus
satu dua persepuluh
6. Penulisan lambang bilangan tingkat dapat dilakukan dengan cara yang berikut. Misal:
 - Paku buwono *X*
 - Pada awal abad *XX*
 - Dalam kehidupan abad *ke-20* ini
 - Lihat bab *II*
 - Pasal *5*
 - Dalam Bab *ke-2* buku itu
 - Daerah tingkat *II* itu
 - Di tingkat *kedua* gedung itu
 - Di tingkat *ke-2* itu
 - Kantor di tingkat *II* itu
7. Penulisan lambang bilangan yang mendapat akhiran (*-an*) mengikuti cara yang berikut. Misalnya:
 - *Tahun 50-an* atau *tahun lima puluhan*
 - *Uang 5000-an* atau *uang lima ribuan*
 - *Lima uang 1000-an* atau *lima uang ribuan*
8. Lambang bilangan pada awal kalimat di tulis dengan satu atau dua kata ditulis dengan huruf kecuali jika beberapa lambang bilangan dipakai secara berurutan, seperti dalam perincian dan pemaparan, misalnya:
 - *Amir menonton drama itu sampai tiga kali.*
 - *Ayah memesan tiga ratus ekor ayam.*
9. Lambang bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Jika perlu, susunan kalimat diubah sehingga bilangan yang tidak dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata tidak terdapat pada awal kalimat. Misalnya:
 - *Lima betas orang tewas dalam kecelakaan tersebut.*
 - *Pak Joko mengundang 250 orang tamu.*

Bukan:

- *15 orang tewas dalam kecelakaan tersebut.*
 - *Dua ratus lima puluh orang tamu diundang Pak Joko.*
10. Angka yang menunjukkan bilangan utuh yang besar dapat dieja sebagian supaya mudah dibaca, misalnya:
 - *Perusahaan itu baru saja mendapat pinjaman 250 juta rupiah.*
 - *Penduduk Indonesia berjumlah lebih dari 200 juta orang.*
 11. Bilangan tidak perlu ditulis dengan angka dan huruf sekaligus dalam teks, kecuali di dalam dokumen resmi seperti akta dan kuintansi.

Misalnya:

- *Kantor kami mempunyai 20 orang pegawai.*
- *Di lemari itu tersimpan 805 buku dan majalah.*

Bukan:

- *Kantor kami mempunyai 20 (dua puluh) orang pegawai*
- *Di lemari itu tersimpan 805 (delapan ratus lima) buku dan majalah.*

12. Jika bilangan dilambangkan dengan angka dan huruf, penulisannya harus tepat, misalnya:

Saya lampirkan tondo terima uang sebesar Rp991.200,00 (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah).

Penulisan Unsur Serapan

Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia menyerap unsur dari berbagai bahasa lain, baik bahasa daerah maupun dari bahasa asing seperti bahasa Sanskerta, bahasa Arab, bahasa Portugis, bahasa Belanda, atau bahasa Inggris.

Berdasarkan taraf integrasinya, unsur pinjaman bahasa dalam bahasa Indonesia, dapat dibagi atas dua golongan besar. Pertama, unsur pinjaman yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti *reshuffle, shuttle cook, l' exploitation del homme par l' homme*. Unsur-unsur pinjaman yang pengucapannya dan penulisannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Dalam hal ini diusahakan agar ejaannya hanya diubah seperlunya sehingga bentuk Indonesianya masih dapat diperbandingkan dengan bentuk asalnya.

Kaidah yang berlaku pada unsur serapan adalah sebagai berikut:

- | | |
|------------|--|
| aa | (Belanda) menjadi a
paal--pal, baal--bal, actaaf--oktap |
| ae | jika bervariasi dengan e , menjadi e
<i>haemoglobin--hemoglobin, haematite--hematite</i> |
| au | tetap au |
| ae | tetap ae jika tak bervariasi dengan e
<i>aerobe--aerob, aerodinamics--aerodinamika</i> |
| ai | tetap ai
<i>trailer--trailer, caisson--kaison</i> |
| c | di muka a, u, o, dan konsonan menjadi k
<i>calomel--kalomel, cubic--kubik</i> |
| c | di muka e, i, oe, dan y menjadi s
<i>central--sentral, cylinder--silinder</i> |
| cc | di muka e dan i menjadi k
<i>accommodation--akomodasi, acclamation--aklamasi</i> |
| cch | dan ch di muka a, o, dan konsonan menjadi k
<i>saccharin--sakarín, chromosome--kromosom</i> |

ch	yang lafalnya s atau sy menjadi s <i>achelon--eselon, machine--mesin</i>
ch	yang lafalnya c menjadi c <i>chek--cek, China--Cina</i>
e	tetap e <i>effek--efek, synthesis--sintesis</i>
ea	tetap ea <i>idealist--idealis, habeas--habeas</i>
ee	(Belanda) menjadi e <i>stratofeer--stratosfer, systeem--sistem</i>
ei	tetap ei <i>eicosane--eikosan, eidetic--eidetik</i>
eo	tetap eo <i>stereo--stereo, geometry--geometri</i>
eu	tetap eu <i>neutron--neutron, eugenol--eugenol</i>
f	tetap f <i>fanatic--fanatik, fossil--fosil</i>
gh	menjadi g <i>sorghum--sorgum</i>
gue	menjadi ge <i>igue--ige, gigue--gige</i>
i	pada awal suku kata di muka tetap i <i>ion--ion, iambus--iambus</i>
ie	tetap i jika lafalnya bukan i <i>variety--varietas, patient--pasien</i>
kh	(Arab) tetap kh <i>khusus--khusus, akhir--akhir</i>
oe	menjadi e <i>oestrogen--estrogen, foetus--fetus</i>
oo	(Inggris) menjadi u <i>cartoon--kartun, pool--pul</i>
oo	tetap o <i>coordination--koordinasi, zoology--zoologi</i>
ou	menjadi u <i>gouvemour--gubernur, coupon--kupon</i>
ph	menjadi f <i>phase--fase, physiology--fisiologi</i>
ps	tetap ps <i>pseudo--pseudo, psychiatry--psikiatri</i>
pt	tetap pt <i>ptyalin--ptialin, pterosaur--pterosaur</i>
q	menjadi k <i>aquarium--akuarium, aquator--equator</i>
rh	menjadi r <i>rhythm--ritme, rhetoric--retorik</i>
sc	di muka a, o, u dan konsonan menjadi k <i>scenography--senografi, scyphistoma--sifistoma</i>

sch	di muka vokal menjadi sk <i>schema--skema, schizophrenia--skizofrenia</i>
t	di muka i menjadi s <i>ratio--ratio, action--aksi</i>
th	menjadi t <i>theocracy--teokrasi, method--metode</i>
u	tetap u <i>unit--unit, institute--institut</i>
ua	tetap ua <i>dualism--dualisme, quality--kualitas</i>
ue	tetap ue <i>duet--duet, suede--sued</i>
ui	tetap ui <i>conduite--konduite, equinox--ekuinox</i>
uo	tetap uo <i>quota--kuota, quorum--kuorum</i>
uu	menjadi u <i>prematuur--prematuur, vacuum--vakum</i>
v	menjadi v <i>vitamin--vitamin, television--televisi</i>
x	pada awal kata tetap x <i>xenon--xenon, xanthate--xantat</i>
x	pada posisi lain menjadi ks <i>taxi--taksi, eksektive--eksekutif</i>
xc	di muka e dan i menjadi ks <i>exception--eksepsi, excess--ekses</i>
xc	di muka a,o,u, dan konsonan ksk <i>excavation--ekskavasi, eksklusif--eksklusif</i>
y	tetap y jika lafalnya y <i>yen--yen, yuan--yuan</i>
y	menjadi i jika lafalnya i <i>dynamo--dinamo, propyl--propil</i>
z	tetap z <i>zenith--zenit, zygote--zigot</i>

Pemakaian Tanda Baca

1. Tanda Titik (.) digunakan:

- a. Pada akhir kalimat yang bukan pernyataan atau seruan, misal:
 - *Ayahku tinggal di Solo.*
 - *Mereka mengatakan bahwa dalam waktu dekat ini ayah akan membeli rumah di Surabaya.*
- b. Di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, ihtisar, atau daftar, misal:
 1. *Patokan umum*
 - 1.1 *Isi karangan*
 - 1.2 ...

- c. Untuk memisahkan angka jam, menit, detik, yang menunjukkan waktu atau jangka waktu, misal:
 - *Puku113.30.20*
 - *13.35.20 jam*
- d. Di antara nama penulis, judul karangan yang tidak berakhir dengan tanda tanya dan tanda seru, dan tempat terbit dalam daftar pustaka:
 - *Siregar, Merari. 1920. Azab dan Sengsara. Jakarta: Balai Pustaka.*
 - *Firdausi, Aulia Najwa. 2006. Statistik Modern. Surakarta: CV Merdeka.*
- e. Untuk memisahkan bilangan ribuan, atau kelipatannya, tetapi tidak dipakai jika tidak menunjukkan jumlah, misal
 - *Jumlahnya ada 24.200 orang.*
 - *Nomor teleponnya 081548514855*
 - *NIP 197305142007011012*
- f. Tanda titik tidak digunakan pada akhir judul yang merupakan kepala karangan, kepala ilustrasi, tabel, di belakang alat pengirim dan tanggal surat atau penerima surat, misal: *Acara Kunjungan Adam Malik Bandung, 1 April 1992*
Yth. Sdr. Moh. Hasan
Jl. Aril 43

2. Tanda Koma (,) digunakan:

- a. Di antara unsur-unsur suatu perincian atau pembilangan, misal:
 - *Saya membeli kenos, pena, dan tinta.*
 - *Satu, dua, tiga!*
- b. Untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara berikutnya yang didahului oleh kata seperti tetapi atau melainkan, misalnya:
 - *Saya ingin datang, tetapi hari hujan.*
 - *Didi bukan anak Saya, melainkan anak Pak Kanto.*
- c. Untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat jika anak kalimat itu mendahului induk kalimatnya, misalnya:
 - *Koichi hari hujan, saya tidak akan datang.*
 - *Ketika saya sedang membaca, tiba-tiba lampu padam.*
 - *Meskipun kedua orang tuanya sangat kaya, kedua gadis itu tidak sombong.*

Namun, tanda baca (,) tidak dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat jika anak kalimat itu rnengiringi kalimatnya, misalnya:

- *Saya tidak akan datang kalau hari hujan.*
- *Dia lupa akan janjinya karena sibuk.*
- *Kedua gadis itu tidak sombong meskipun kedua orang tuanya sangat kaya.*

- d. Di belakang kata atau ungkapan penghubung antarkalimat yang terdapat pada awal kalimat. Termasuk di dalamnya: oleh karena itu, jadi, lagi pula, meskipun begitu, misalnya :
- *Akhir-akhir ini kasus kejahatan semakin marak. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati.*
 - *Kita harus menghadapi ujian nasional dalam waktu dekat ini. Jodi, kita harus belajar lebih giat lagi.*
- e. Untuk memisahkan kata seru, seperti: o, ya, wah, aduh, kasihan dari kata yang lain yang terdapat dalam, misalnya:
- *O, begitu?*
 - *Wah, bukan main!*
 - *Amboi, indahny pemandangan itu!*
- f. Untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat, misalnya:
- *Kota Ibu, "Saya gembira sekali"*
 - *"Saya gembira sekali," kata Ibu, "karena kamu lulus"*
- g. Di antara (i) nama dan alamat, (ii) bagian-bagian alamat, (iii) tempat dan tanggal, (iv) nama dan tempat wilayah atau negeri yang ditulis berurutan, misalnya:
- *Surat-surat ini harap dialamatkan kepada Dekan Fakultas Kedokteran, Universitas Indonesia, Jalan Raya Salemba 6, Jakarta.*
 - *Sdr. Abdulah, Jalan Pisang Batu I, Bogor*
 - *Kuala Lumpur, Malaysia*
- h. Untuk menceraikan bagian nama yang dibalik susunannya dalam penulisan daftar pustaka, misalnya:
Alisjahbana, Sutan Takdir. 1949. *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia*. Jilid 1 dan 2. Djakarta: PT Pustaka Rakyat.
- i. Di antara bagian-bagian dalam catatan kaki, misalnya:
W.J.S. Purwodarminto, *Bahasa Indonesia untuk Karang-mengarang* (Yogyakarta : UP Indonesia, 1967), hal.4.
- j. Di antara nama orang dan gelar akademik yang mengikutinya untuk membedakan dari singkatan nama keluarga atau marsga, misalnya:
- *B. Ratulangi, S.E.*
 - *Ny. Khadijah, M.A.*
- k. Di muka angka persepuluhan atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka, misalnya:
- *12,5 m*
 - *Rp12,50*
- l. Untuk mengapit keterangan tambahan yang sifatnya tidak membatasi (lihat juga pemakaian tanda pisah), misalnya:
- *Guru saya, Pak Ahmad, sedang membaca koran di perpustakaan.*
 - *Di daerah kami, misalnya, masih banyak yang makan sirih.*
- m. Untuk menghindari salah baca di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat, misalnya:

Atas bantuan Agus, Susilo mengucapkan terimakasih.

Namun, tanda baca (,) tidak dipakai untuk memisahkan petikan langsung yang diakhiri dengan tanda baca tanya atau tanda seru, misalnya:

"Di mana Saudara tinggal ?" tanya Karim.

3. Tanda Titik Koma (;) digunakan:
 - a. Memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis dan setara, misalnya: *Malam makin larut; pekerjaan belum selesai juga.*
 - b. Sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat yang setara di dalam kalimat majemuk, misalnya:
Ayah mengurus tanaman; ibu sibuk bekerja didapur; adik menghafal nama-nama pahlawan.
4. Tanda Titik Dua (:) digunakan:
 - a. Pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti suatu pemberian atau rangkaian, misalnya:
 - *Kita memerlukan perabot rumah tangga: kursi, meja, dan lemari.*
 - *Kita memerlukan kursi, meja, dan lemari. (tidak memakai titik dua).*
 - b. Sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan suatu pemerian, misalnya:
Ketua : Ahmad Wijaya
Sekretaris : Susilo Hamdani
Bendahara : Bogus Hartawan
 - c. Dalam teks drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku, misalnya:
Ibu : "Bawa kopor ini, Mir .I"
Amir : "Baik, Bu !"
 - d. (i) di antara jilid atau nomor dan halaman, (ii) di antara bab dan ayat dalam kitab suci, (iii) di antara judul suatu karangan, (iv) nama kota dan penerbit buku acuan, misalnya:
 - *Tempo, I (1971), 37:7*
 - *Surat Yasin : 9*
5. Tanda Hubung (-) digunakan:
 - a. Untuk menyambung suku-suku kata dasar yang terpisah oleh pergantian baris, misalnya:
-ada juga cara baru-
 - b. Untuk menyambung awalan dengan bagian kata di belakangnya atau akhiran dengan bagian kata didepannya, misalnya:
-untuk mengukur panas-

- c. Untuk menyambung unsur-unsur kata ulang, misalnya:
anak-anak, berulang-ulang
- d. Untuk memperjelas (i) hubungan kata dengan ungkapan, (ii) penghilang bagian kelompok kata, misalnya:
ber-evolusi dua puluh lima-ribuan (20 x 5000)
- e. Untuk merangkaikan (i) (se-) dengan kata berikutnya yang mulai dengan huruf kapital, (ii) (ke-) dengan angka, (iii) angka dengan akhiran (-an), (iv) singkatan hursuf kapital dengan imbuhan atau kata, (v) jabatan rangkap, misalnya:
- *se- Indonesia*
 - *ke-2*
 - *50 —an*
 - *di—PHK-kan*
 - *Menteri — Sekretaris Negara*
- f. Untuk merangkaikan unsur bahasa Indonesia dengan unsur asing, misalnya:
di—smash, pen—tackle—an
6. Tanda Pisah (-) digunakan:
- a. Membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat, misalnya: Kernerdekaan itu-saya yakin akan dapat dicapai—harus diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri.
 - b. Untuk menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan yang lain sehingga kalimat menjadi lebih jelas, misalnya:
Temuan ini—evolusi, teori kenisbian, dan kini pembelahan atom — telah mengubah wajah dunia ilmu pengetahuan.
 - c. Di antara dua bilangan atau tanggal dengan arti 'sampai ke' atau 'sampai dengan', misalnya:
1945 — 1950, Bandung — Jakarta
7. Tanda Elipsis (...) digunakan:
- a. Dalam kalimat yang terputus— putus, misalnya:
Kalau begitu . . . ya, marilah kita berangkat!
 - b. Untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau naskah ada bagian yang dihilangkan, misalnya: *Sebab-sebab kemerosotan ... akan diteliti lebih lanjut*
8. Tanda Tanya (?) digunakan:
- a. Akhir kalimat tanya, misalnya: *Kapan Anda berangkat ?*
 - b. Di dalam kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya, misalnya: *Ia dilahirkan tahun 1883(?)*
9. Tanda Seru (!) digunakan:
Sesudah anggapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, ataupun emosi yang sangat kuat, misalnya:
- *Alangkah sempitnya kamar itu!*
 - *Merdeka!*
10. Tanda Kurung ((...)) digunakan:
- a. Untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan, misalnya:
... telah selesai menyusun DIK (Daftar Isian Kegiatan).

- b. Untuk mengagapit bagian keterangan atau penjelasan yang bukan bagian integral pokok pembicaraan, misalnya:
Keterangan itu (lihat label!) menunjukkan anus...
 - c. Untuk mengagapit huruf atau kata yang kehadirannya dapat dihilangkan, misalnya:
Pejalan kaki itu berasal dari (kota) Surabaya
 - d. Untuk mengagapit kata atau huruf yang memerinci suatu aturan atau keterangan, misalnya:
Faktor produksi menyangkut masalah (a) dana, (b) tenaga, dan (c) kemampuan.
11. Tanda Kurung siku ([...]) digunakan:
- a. Untuk mengagapit huruf, kata, kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan sebagai koreksi atau tambahan pada kalimat yang ditulis orang lain, misalnya:
Sang Supraba men[d]engar bunyi gemerisik.
 - b. Untuk mengagapit keterangan dalam kalimat penjelas yang sudah bertanda kurung misainya:
Persamaan kedua proses mi (perbedaannya dibicarakan dalam Bab II [lihat halaman 35] tidak dibicarakan) perlu.
12. Tanda Petik ("...") digunakan:
- a. Untuk mengagapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan dan naskah atau bahan tertulis lain, misalnya:
"Saya belum siap," kata Nira, " tunggu sebentar!"
 - b. Untuk mengagapit judul syair, karangan atau Bab buku yang dipakai dalam kalimat, misalnya:
Bacalah "Bola Lampu" dalam buku Dari Suatu Masa, Dari Suatu Tempat.
 - c. Untuk penutup yang mengikuti tanda baca yang mengakhiri petikan langsung, misalnya:
Kata Tono, "Saya juga minta satu".
 - d. Untuk menutup kalimat atau bagian kalimat yang ditempatkan di belakang tanda titik yang mengagapit kata atau ungkapan yang dipakai dalam arti khusus, misalnya:
Karena kulitnya hitam, Budi mendapat julukon "Si Hitam".
13. Tanda Petik Tunggal ('...') digunakan:
- a. Untuk mengagapit petikan yang tersusun dalam petikan lain, misalnya: *"Kau dengar bunyi 'kring - kring' tadi?", tanya ayah pada Kok Rita.*
 - b. Untuk mengagapit makna, terjemah, atau pemelasan kata atau ungkapan asing, misalnya:
feed back 'balikan'
14. Tanda Garis Miring (/) digunakan:
- a. Dalam nomor surat atau nomor pada alamat dan penandaan masa satu tahun yang terbagi dalam dua tahun takwin, misalnya:
No. 7/PK/1993. Tahun anggaran 2009/2010.

- b. Sebagai pengganti kata atau, tiap misalnya
Dikirim lewat darat/laut (darat atau laut) Rp 12.500.00/lembar
(tiap)
15. Tanda penyingkat atau apostrof (') digunakan untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun. misalnya:
- *Ali 'kan kusurati.* *'kan = akan*
 - *1 Januar, '92* *'92 = 1992*

KOSAKATA

Bagian tata bahasa yang mempelajari seluk beluk struktur morfem serta kemungkinan terjadinya perubahan golongan kata, anti, dan fungsi sebagai akibat perubahan strukturnya disebut morfologi. Yang menjadi objek penelitian morfologi adalah:

- a. Morfem dan proses pembentukannya menjadi kata.
- b. Pengulangar kata dan proses pembentukannya.
- c. Pemajemukan kata dan proses pembentukannya.

Morfem

Morfem adalah satuan bentuk bahasa yang terkecil yang mengandung makna dan atau fungsi yang relatif stabil sehingga tidak dibagi atas bagian yang lebih kecil. Dengan perkataan lain, morfem merupakan kesatuan yang membedakan arti dalam pembentukan kata. Secara garis besar, morfem terdiri atas dua macam, yaitu morfem bebas dan morfem terikat.

Penjelasannya sebagai berikut:

- a. Morfem bebas yaitu morfem yang dapat berdiri sendiri sebagai kata dan mengandung makna leksikal. Misalnya: meja (KB), pukul (KK), baik (KS), dsb.
- b. Morfem terikat yaitu morfem yang tidak dapat berdiri sendiri sebagai kata, dan hanya mempunyai makna gramatikal. Morfem terikat ini ada dua macam, yaitu morfem terikat morfologis; contohnya afiksasi (imbuhan); dan morfem terikat sintaksis; contohnya partikel dan kata tugas.

Di samping kedua jenis morfem tersebut masih terdapat morfem yang mempunyai makna leksikal, tetapi tidak dapat berdiri sendiri dalam kalimat, misalnya juang, temu, pukung, dsb. Morfem seperti ini disebut morfem unik.

1. Pembentukan Kata Jadian

Proses pembentukan kata jadian disebut afiksasi atau pengaglutinasian. Proses ini terjadi apabila bentuk dasar dibubuhi imbuhan. Polanya adalah sebagai berikut:

(bentuk dasar) + imbuhan

Bentuk dasar adalah bentuk bahasa tunggal maupun kompleks yang menjadi alas (dasar) pembentukan kata yang lebih luas, misalnya:

- *berperikemanusiaan* = (*ber-*) + *perikemanusiaan* (*bentuk dasar*)
- *perikemanusiaan* = (*peri-*) + *kemanusiaan* (*bentuk dasar*)
- *kemanusiaan* = (*ke - an*) + *manusia* (*bentuk dasar*)

Bentuk dasar pada manusia pada contoh di atas tidak dapat dipecahkan menjadi bentuk yang lebih kecil. Bentuk dasar yang demikian disebut bentuk asal. Bentuk asal ini pada hakikatnya adalah kata kerja berimbuhan (*me-*) atau kata kerja berimbuhan (*ber-*), misalnya:

penulis:

- *menulis* (*bentuk dasar*); (*me-*) + *tulis*

pemandangan:

- *memandang* (*bentuk dasar*); (*me-*) + *pandang*

peladang:

- *berladang* (*bentuk dasar*); (*ber-*) + *ladang*

Pada kata benda berimbuhan (*per-*) atau (*pe-an*) bentuk dasarnya adalah kata kerja berimbuhan (*per-*), misalnya: petinju:

- *bertinju* (*bentuk dasar*); (*ber-*) + *tinju perbuatan*:
- *berbuat* (*bentuk dasar*); (*ber-*) + *buat* 2. *Pembentukan Kata Ulang*

Proses pembentukan kata ulang disebut reduplikasi. Prosesnya terjadi apabila bentuk dasar diulang. Polanya adalah sebagai berikut:

(bentuk dasar) + (bentuk dasar)

Proses pengulangan itu ada dua macam, yaitu:

a. Proses pengulangan seluruhnya

Proses ini dengan atau tanpa variasi fonem dengan atau tanpa imbuhan, misalnya:

<i>kursi</i>	→ <i>kursi-kusi</i>
<i>rumah sakit</i>	→ <i>rumah sakit- rumah sakit</i>
<i>buah</i>	→ <i>buah-buahan</i>

b. Proses pengulangan sebagian, misalnya:

<i>berlarian</i>	→ <i>berlari-larian</i>
<i>rumah besar</i>	→ <i>rumah-rumah besar</i>
<i>berjalan</i>	→ <i>berjalan-jalan</i>

Prinsip proses pengulangan ada dua macam, yaitu

- a. Bentuk dasar yang diulang hendaknya bentuk berterima, yaitu bentuk yang digunakan dalam pemakaian bahasa, misalnya:

kura-kura:

- bukan kata ulang karena bentuk dasar *kura* tidak terdapat dalam pemakaian bahasa.

mengata-ngatakan:

- bentuk dasarnya mengatakan bukan *mengata*.

- b. proses pengulangan tidak mengubah golongan kata/jenis kata, misalnya:

berkata (kata kerja)

- berkata-kata (kata kerja)
- cepat (kata sifat)
- cepat-cepat (kata sifat)

Makna proses pengulangan:

- a. Menyatakan intensitas dalam arti:

- kualitas, misalnya: Ia berkata baik-baik.
- kuantitas, misalnya: Rumah-rumah terendam air.
- frekuensi, misalnya: Ia menggeleng-nggelengkan kepalanya.

- b. Melemahkan arti dalam arti:

- agak, misalnya: Ia berkata ragu-ragu.
- menyerupai, misalnya: Mobil-mobilan itu sangat kuat karena terbuat dari besi.
- menyatakan pekerjaan berbalasan (resiprok) atau saling, misalnya: Para tamu bersalam-salaman ketika menghadiri acara itu.
- menyatakan bermacam-macam, misalnya: sayur-sayuran, buah-buahan, pohon-pohonan.
- menyatakan kolektif, misalnya: dua-dua, empat-empat.

3. Proses Pembentukan Kata Majemuk Proses pembentukan kata majemuk dapat juga disebut komposisi atau pemajemukan. Prosesnya yaitu dengan menggabungkan dua kata atau lebih.

Pola kata majemuk ditentukan oleh golongan kata yang membentuk kata majemuk itu, misalnya:

- a. kb + kk = *kapal terbang*
- b. kb + kb = *buah tangan*
- c. kb + ks = *rumah sakit*
- d. ks + kb = *besar kepala*
- e. kk + kb = *naik daun*

Kata majemuk harus dibedakan dengan frasa karena proses penggabungan pada kata majemuk dapat menimbulkan makna baru, misalnya:

kamar kecil → kata majemuk karena bukan kamar yang kecil.
jalan besar → frasa karena menunjukkan jalan yang besar.

Kata majemuk yang makna barunya tidak dapat ditelusuri dari unsur-unsurnya disebut kata majemuk idiomatik atau ungkapan, misalnya:
kambing hitam → makna barunya tidak dapat dicari dari kata kambing dan hitam, tetapi bermakna orang yang disalahkan.

Ciri-ciri kata majemuk:

- a. Membentuk makna baru.
- b. Membentuk satu unsur pusat atau inti.
- c. Biasanya terdiri atas kata dasar.
- d. Mempunyai frekuensi pemakaian yang tinggi.
- e. Harus seluruhnya jika diulang.
- f. Masih dapat diberi imbuhan.

Macam-macam kata majemuk:

- a. Kata majemuk kopulatif, yaitu persenyawaan dua kata yang sederajat, misalnya: *tanah air*, *sumpah serapah*.
- b. Kata majemuk deternatif, yaitu persenyawaan yang mempunyai hubungan atributif. Kata pertama sebagai yang diterangkan dan kata yang kedua sebagai yang menerangkan, misalnya: kamar tidur, raja muda, saputangan.
- c. Kata majemuk posesif, yaitu jika kata pertama sebagai yang menerangkan, sedangkan kata kedua sebagai yang diterangkan, misalnya: panjang tangan, keras kepala (menunjukkan kiasan), panjang tangan, keras kepala. Artinya kata majemuk menunjukkan kiasan.

4. Imbuhan dalam Bahasa Indonesia Imbuhan atau afiks adalah morfem terikat morfologi yang digunakan dalam pembentukan kata. Imbuhan mempunyai bentuk, fungsi, dan makna/nosi.

- a. Menurut bentuknya afiks itu ada lima macam, yaitu:
 - 1) prefiks (awalan), misalnya: (me-), (ber-), (di-), (ter-), (pe-), (se-), dan (ke-).
 - 2) infiks (sisipan), misalnya: (-el-), (-em-), dan (-er-).
 - 3) sufiks (akhiran), misalnya: (-kan), (-i), (-an), (-nya).
 - 4) konfiks (imbuhan terputus), misalnya: (ke-an), (per-an), (pe-an), dan (ber-an).
 - 5) imbuhan gabung, misalnya: (me-kan), (di-kan), (me-i), (ber-an), (ke-an).
- b. Menurut fungsinya imbuhan itu ada dua macam, yaitu:
 - 1) afiks pembentuk kata kerja, misalnya: (*me-*), (*ber-*), (*di-*), (*ter-*).
 - 2) afiks pembentuk kata benda, misalnya: (*pe-*), (*per-*), (*-an*).

Imbuhan pembentuk kata kerja:

Kata kerja atau verba adalah kata yang mengandung makna dasar tindakan (aksi), proses, dan keadaan yang bukan sifat.

Ciri-ciri kata kerja adalah:

- a. dapat diperluas dengan sekelompok kata dengan + kata sifat.
- b. dinegasikan/diingkari dengan kata tidak.
- c. fungsi utamanya adalah sebagai predikat atau inti predikat dalam kalimat.

Bentuk kata kerja:

- a. Verba asal, berdiri sendiri tanpa afiks, misalnya: *ada, duduk*
- b. Verba turunan
 - 1) dasar bebas afiks wajib, misalnya: *mendarat, melebar*
 - 2) dasar bebas afiks manasuka, misalnya: *membaca, bekerja*
 - 3) dasar terikat afiks wajib, misalnya: *bertemu, berjuang*
 - 4) reduplikasi, misalnya: *berjalanjalan, memukul-mukul*
 - 5) majemuk, misalnya: *naik haji, campur tangan*
- c. Imbuhan yang digunakan sebagai pembentuk kata kerja adalah:
 - 1) prefiks (me-), (ber-), (ter-), (di-)
 - 2) sufiks (-kan), dan (-i)
 - 3) imbuhan gabung seperti terlihat dalam tabel di bawah ini.

Prefiks		Sufiks	
1	2	3	
(me-)	(per-)	(-kan)	
(di-)	(ber-)	(-i)	
(ter-)			
(ke-		(-an)	

Berikut imbuhan pembentuk kata kerja dengan alomorf/variasi bentuk, nosi, dan contohcontohnya.

Nama Imbuhan dengan Alomorfnya		Nosi / Makna Gramatikal	Contoh
(me-)	<ul style="list-style-type: none"> • diikuti huruf /k/, /g/, /h/, /kh/, dan semua vokal • diikuti huruf /i/, /m/, /n/, /ng/, /ny/, /r/, /y/, dan /w/ • diikuti huruf /b/, /p/, dan /f/ • diikuti huruf /d/, /t/, /c/, hil, /sy/ • menjadi (menge-) jika diikuti kata bersuku kata satu 	<ul style="list-style-type: none"> • menuju ke- • melakukan perbuatan • bekerja dengan alat • mencari/ mengumpulakn • membuat seperti • membuatjadi • membubuhi • menghasilkan/ mengeluarkan • menjadi seperti 	menepi menari mengail merotan mambabi buta membubur mengapur meratap melebaga mengecat mengelas
(be-)	<ul style="list-style-type: none"> • diikuti huruf /k/, /g/, /h/, /kh/, dan semua vokal • diikuti huruf /i/, /m/, /n/, /ng/, /ny/, /r/, /y/, dan /w/ • diikuti huruf /b/, /p/, dan /f/ • diikuti huruf /d/ It, /c/, hil, /sy/ • menjadi (menge-) jika diikuti kata bersuku kata satu 	mempunyai <ul style="list-style-type: none"> • memakai • berada dalam keadaan • kumpulan/terdin atas • mengadakan, mengerjakan • reflektif • resiprok • memanggil/ menganggap • mengeluarkan 	beristri berbatu berbahagia berdua berkebun berapat bercukur bertinju berabang berkata bekerja
(ter-)	<ul style="list-style-type: none"> • diikuti kata ajar • diikuti kata yang diawali konsonan r atau kata pertama bersuku kata /er/ 	<ul style="list-style-type: none"> • tidak sengaja • dapat di ... • tiba-tiba • sampai ke ... • superlatif • intensitas 	terambil terangkat terkejut terulang tertinggi tersipu-sipu
(per-)	alternasinya sama dengan awalan (ber-)	<ul style="list-style-type: none"> • menganggap sebagai • membuatjadi • intensitas 	perbudak perlebar perturut
(di-)	tidak mengalami alternasi	menyatakan pasif	dibawa

Berikut imbuhan pembentuk kata benda dengan alternasi/alomorf, nosi, dan contoh-contohnya.

Nama Imbuhan dengan Alomorfnya	Nosi / Makna Gramatikal	Contoh	
(peng-), (pe-), (pem-), (pen-), (peny-), (penge-)	alternasinya sama dengan awalan (meng-)	1. orang yang (meng-) 2. orang yang (di) 3. orang yang (ber-) 4. orang yang mudah ... / memiliki sifat	pembeli pesuruh petinju pemarah, pemalu
(per-)	alternasinya seperti awalan (ber-)	orang yang (ber-)	pertapa
(ke-)		1. orang yang dianggap sebagai 2. menunjukkan gabungan 3. menunjukkan tingkat	ketua, kekasih kedua orang bangku kedua
(se-)		1. menyatakan satu 2. menyatakan sama 3. menyatakan waktu	sebuah setinggi gunung sepulang
(-el-), (-em-), (-er-)		1. alat untuk 2. banyak 3. mengandung sifat	telunjuk gerigi, geligi gemuruh
(peng-an), (pe-an), (pem-an) (peng-an), (peny-an), (penge-an)		1. proses cars 2. hasil (meng-) 3. alat untuk (meng-)	pembuatan penyelesaian penghidupan
(per-an), (pe-an), (pel- an)		1. hal/keadaan (ber-) 2. wilayah yang(ber-) 3. tempat untuk (ber-)	pergerakan pegunungan persembunyian
(-an)		1. hasil 2. alat 3. sesuatu yang (di-) 4. cara/poses 5. kumpulan/banyak 6. macam-macam 7. tiap-tiap 8. yang bersifat 9. tempat	karangan timbangan makanan aturan daratan sayuran harian asinan belokan
(-wan), (-wati)		1. ahli 2. bersifat 3. mempunyai banyak	negarawan dermawan hartawan

Pronomina

Pronomina adalah kata yang dipakai untuk mengacu kepada nomina lain, misalnya nomina pesawat dapat diacu dengan pronomina ia. Dalam bahasa Indonesia, ada tiga macam pronomina yaitu pronomina persona, pronomina penunjuk, dan pronomina penanya.

1. Pronomina Persona

Pronomina persona adalah pronomina yang mengacu pada orang. Berikut adalah bagan pronomina dalam bahasa Indonesia.

Persona	Makna			
	Tunggal	Netral	Eksklusif	Inklusif
Pertama	saya, aku, daku, (ku-), (-ku)		kami	kita
Kedua	engkau, kamu, dikau (kau-), (-mu)	kalian kamu (sekalian), anda (sekalian)		
Ketiga	ia, dia beliau, (-nya)	Mereka (-nya)		

2. Pronomina Penunjuk

Pronomina penunjuk ada tiga macam, yaitu pronomina penunjuk umum, pronomina penunjuk tempat, dan pronomina penunjuk ihwal. Contoh pronomina ialah ini (mengacu kepada yang dekat), itu (mengacu kepada yang jauh), dan anu (mengacu kepada yang tidak dapat disebutkan).

Pronomina penunjuk dapat berfungsi sebagai subjek, objek, atribut/pelengkap, dan predikat, misalnya:

Ini rumah saya → ini dapat S atau P
 bergantung intonasi
 Saya membeli ini → ini = O

3. Pronomina Penanya

Pronomina penanya digunakan sebagai pertanyaan. Pada garis besarnya pronomina penanya ada dua macam yaitu apa dan mana. Berikut pronomina penanya dalam bagan.

O Si- Meng- Ber- k-n	+apa	+apa	Apa Siapa Mengapa Berapa Kapan apabila	menanyakan barang menanyakan orang menanyakan sebab menanyakan jumlah menanyakan waktu menanyakan waktu
Di Ke Dari Bagai bila		mana	di mana ke mana dari mana bagaimana bilamana	menanyakan tempat menanyakan tempat menanyakan tempat menanyakan keadaan menanyakan waktu

Numeralia

Numeralia atau kata bilangan adalah kata yang dipakai untuk menghitung banyaknya (orang, binatang, atau barang) maupun konsep. Pada dasarnya ada dua numeralia dalam bahasa Indonesia, yaitu (1) numeralia pokok, dan (2) numeralia tingkat.

1. Numeralia pokok mengacu kepada bilangan. Numeralia ini ada lima macam, yaitu:
 - a. Numeralia pokok tertentu, misalnya: satu, dua, sepuluh, dsb.
 - b. Numeralia pokok klitika, misalnya: (eka-), (catur-), (panca-), dsb.
 - c. Numeralia pokok kolektif, misalnya: ketiga, keempat
 - d. Numeralia distributif, misalnya: tiapHap, setiap, dsb.
 - e. Numeralia pokok tak tentu, misalnya banyak, sedikit, dsb.
2. Numeralia bertingkat mengacu kepada bilangan tingkat, misalnya: orang kedua, bangku ketiga, dsb.

Adjektiva

Adjektiva, yang disebut juga kata sifat atau kata keadaan adalah kata yang dipakai untuk mengungkapkan sifat atau keadaan orang, Benda, atau binatang.

1. Dapat diberi keterangan pembanding seperti lebih, kurang, paling. Misalnya: lebih baik, paling baik.
2. Dapat diberi keterangan penguat seperti sangat, amat, benar, sekali. Misalnya: *amat indah, sangat indah, indah sekali*.
3. Dapat diingkari dengan kata ingkar tidak. Misalnya: tidak benar.
4. Dapat diulang dengan (se-nya). Misalnya: sebaik-baiknya.
5. Pada unsur serapan dapat berakhir (-er), (-wi), (-if), (-ah), (-al), (-ik). Misalnya: honorer, duniawi, ilmiah, formal, elektronik, negatif, dsb.

Bentuk adjektiva ada beberapa macam, yaitu:

1. Adjektiva dasar, misalnya: anggun, lemah, rusak, murah, dsb.
2. Adjektiva turunan, misalnya:
 - a. Dengan afiksasi: alami, penakut, keibuan, kebapakan, dsb.
 - b. Dengan reduplikasi: kebarat-baratan, besar-besar, dsb.
 - c. Dengan pemajemukan: tinggi hati, lemah lembut, dsb.

Salah satu ciri utama adjektiva ialah bahwa kata tersebut dapat digunakan untuk tingkat perbandingan. Tingkat perbandingan adjektiva ada tiga macam, yaitu:

1. Tingkat perbandingan ekuatif, menyatakan bahwa satu hal itu sama atau sebanding dengan yang lainnya.
2. Tingkat perbandingan komparatif, menyatakan bahwa suatu hal itu lebih atau kurang dari yang lain.
3. Tingkat perbandingan superlatif, menyatakan bahwa dari sekian hal

yang dibandingkan satu melebihi yang lain. Caranya dengan menggunakan paling atau (ter-) + adjektiva, contohnya: paling menyedihkan, terindah, dsb.

Fungsi adjektiva dalam kalimat ada tiga macam, yaitu:

1. Sebagai predikat, misalnya: Gedung itu sangat megah
2. Sebagai atribut, misalnya: Anak rajin itu dipuji orang tuanya.
3. Sebagai nominal, misalnya: Dalam laut dapat diduga.

Adverbia

Adverbia adalah kata yang memberi keterangan dengan keterangan sebagai fungsi dalam kalimat, misalnya:

- Saya ingin lekas-lekas pulang. (lekas-lekas = adverbia)
- Orang itu sangat baik. (sangat = adverbia)

Adverbia sebagai kategori harus dibedakan dengan keterangan sebagai fungsi dalam kalimat, misalnya: Ia datang kemarin. Kemarin merupakan nomina yang berfungsi sebagai keterangan waktu dalam kalimat itu

Bentuk adverbia ada bermacam-macam:

1. Adverbia dasar, misalnya: sangat, hanya, lebih, segera, dsb.
2. Adverbia turunan, misalnya:
 - a. Dengan afiksasi (-nya): agaknya, sebaiknya, sesungguhnya, dsb.
 - b. Dengan afiksasi (se-nya): sebenarnya, sesungguhnya, dsb.
 - c. Dengan pengulangan kata dasar: diam-diam, lekas-lekas, dsb.
 - d. Dengan pengulangan kata dasar + (-an): habis-habisan.
 - e. Dengan pengulangan kata dasar + (senya): sekuat-kuatnya...

Kata Tugas

Kata tugas adalah kata yang mempunyai ciri-ciri:

1. Hanya mempunyai makna gramatikal (tidak memiliki makna leksikal).
2. Tidak mengalami perubahan bentuk, kecuali kata tugas yang sifatnya ambivalen, misalnya:
 - Kata depan di, ke, dari tidak bermakna leksikal.
 - Kata depan di, ke dari tidak dapat diberi imbuhan serta tidak dapat diulang.

Macam-macam kata tugas:

1. Preposisi atau Kata Depan

Bertugas sebagai unsur pembentuk frasa preposisional. Preposisi terletak di depan frasa yang mengikutinya berupa nomina, verba, atau adjektiva.

Bentuk preposisi bermacam-macam, yaitu:

- a. bentuk tunggal, misalnya:
bagi, untuk, guna → menandai,

		<i>hubungan</i>
		<i>peruntukan</i>
<i>di</i>	→	menandai hubungan tempat berbeda
<i>ke</i>	→	menandai hubungan arah menuju tempat
<i>dari</i>	→	menandai hubungan asal
<i>dengan</i>	→	menandai hubungan kesertaan/cara
<i>oleh</i>	→	menandai hubungan pelaku
<i>pada</i>	→	menandai hubungan ihwal peristiwa
<i>sejak</i>	→	menandai hubungan waktu dari saat

b. bentuk turunan

Dengan cara afiksasi, misalnya:

bersama,	→	menandai hubungan kesertaan
beserta		
menjelang	→	menandai hubungan waktu sesaat sebelum
menuju	→	menandai hubungan tujuan/arah
terhadap	→	
menurut	→	menandai hubungan sumber
sekeliling	→	menandai hubungan ruang lingkup geografi
sekitar	→	
selama	→	menandai hubungan kurun waktu
mengenai	→	menandai hubungan sasaran
bagaikan	→	menandai hubungan pemiripan

Dengan menggabungkan preposisi + preposisi, misalnya:

daripada	→	menandai hubungan perbandingan
kepada	→	menandai hubungan arah
oleh karena	→	menandai hubungan penyebab
oleh sebab		
sampai	→	menandai hubungan batas waktu/tempat
dengan, ke		
selain dari	→	menandai hubungan perkecualian

Dengan menggabungkan preposisi + bukan preposisi, misalnya: di otos, di dalam, ke samping, di bawah, dsb.

2. Konjungsi

Konjungsi atau kata sambung adalah kata tugas yang menghubungkan dua klausa atau lebih, seperti dan, atau, tetapi, dsb. Pada garis besarnya konjungsi itu ada dua macam, yaitu:

- a. Konjungsi koordinatif, yaitu konjungsi yang menghubungkan dua unsur atau lebih yang setara, misalnya:
 - dan → menandai hubungan penambahan
 - atau → menandai hubungan pemilihan
 - tetapi → menandai hubungan perlawanan

- b. Konjungsi subordinatif, yaitu konjungsi yang menghubungkan dua klausa atau lebih yang tidak setara, misalnya:
 - sesudah → menandai hubungan waktu
 - ketika,
 - sebelum
 - jika, kalau, → menandai hubungan syarat
 - manakala
 - andaikan, → menandai hubungan pengandaian
 - seandainya
 - agar, → menandai hubungan tujuan
 - supaya,
 - buat
 - biarpun, → menandai hubungan konsesif
 - sekalipun,
 - walaupun
 - seakan-akan, menandai hubungan pemiripan
 - seolah-olah
 - sebab, → menandai hubungan penyebab
 - karena
 - sehingga, → menandai hubungan pengakibatan
 - sampai
 - bahwa → menandai hubungan penjelasan
 - dengan → menandai hubungan cara

- c. Konjungsi korelatif, yaitu konjungsi yang menghubungkan dua kata, frasa, klausa yang setara, misalnya:
 - *baik maupun*
 - *tidak hanya tetapi juga*
 - *sedemikian + kata sifat + (-nya) sehingga*
 - *jagankan ... pun*

- d. Konjungsi antarkalimat, yaitu konjungsi yang menghubungkan satu kalimat dengan kalimat yang lain, misalnya:

"Akhir-akhir ini kasus pencurian sangat marak terjadi. Oleh karena itu,

kits harus meningkatkan kewaspadaan."

- e. Konjungsi antarparagraf, yaitu konjungsi yang melalui suatu paragraf yang mempunyai hubungan dengan paragraf lain, misalnya: adapun, akan hal itu, dsb.

3. Interjeksi

Interjeksi atau kata seru adalah kata tugas yang mengungkapkan perasaan manusia, seperti sedih, heran, sakit, jijik, dsb.

Contoh interjeksi:

- a. Bernada negatif: cis, cih, bah, idih, brengsek.
- b. Bernada positif: aduhai, amboi, asyik, syukur.
- c. Bernada keheranan: ai, lo, Masya Allah.
- d. Bernada netral: ayo, hai, halo, wah, oh.

4. Artikel

Artikel adalah kata tugas yang membatasi makna jumlah nomina. Bentuknya ada tiga macam, yaitu:

- a. Menyatakan jumlah tunggal, misalnya:
sang untuk menyatakan manusia, *bends*, yang ditinggikan.
sri untuk menyatakan manusia yang berderajat tinggi (*sri Paus*).
hang, *dang* (terdapat dalam kasusastraan lama).
- b. Menyatakan kelompok, misalnya: *para* untuk manusia yang memiliki sifat tertentu (*para ilmuwan*).
- c. Menyatakan makna netral, misalnya: *si* untuk mengiringi nama orang (*si Aminah*).
si hitam manis untuk membentuk nomina dari adjektiva.

5. Partikel

Partikel adalah kata tugas yang berbentuk klitik karena harus selalu dilekatkan pada kata yang mendahuluinya. Ada empat macam partikel, yaitu:

- a. (-kah) yang berfungsi untuk:
 - membentuk kalimat tanya, misalnya: Diakah yang datang?
 - membuat kalimat lebih formal, misalnya: Ke manakah anak itu?
 - memperjelas bahwa kalimat itu kalimat tanya, misalnya: Haruskah saya memilih jalan ini?
- b. (-Iall) yang berfungsi untuk:
 - menghaluskan nada perintah, misalnya: Pergilah sekarang!
 - mempertegas perintah, misalnya: Ambil berapa sajalah yang kau inginkan!
- c. (pun) yang berfungsi untuk menegaskan.
 - Mereka pun berkehendak seperti itu.
 - Kadang-kadang pun dipakai bersama *lah*, misalnya: Mereka pun berangkatlah.

- d. (-tah) yang digunakan untuk misalnya:
Apatah hidup ini tanpa engkau?

TATA MAKNA

Ilmu yang mempelajari makna kata serta perubahan-perubahannya disebut semantik. Makna kata ialah hubungan kata itu sebagai lambang bunyi dengan benda, perbuatan, serta sifat yang dimaksudkan. Proses pembentukan kata adalah sebagai berikut:

Kata (lambang bunyi) → makna → bendanya, tindakan, sifat

Semantik mencakup makna kata, perubahan makna kata, perpindahan makna kata, dan nilai rasa kata.

Macam-macam Makna Kata

Berdasarkan sifat hubungan antara kata dengan maknanya, makna kata dapat dibagi menjadi dua macam.

1. Makna leksikal (disebut juga makna kamus), yaitu makna kata yang langsung mengacu kepada benda, tindakan, atau sifat yang dimaksudkan oleh kata itu. Misalnya:
rumah → langsung mengacu kepada benda tertentu
pergi → langsung mengacu kepada tindakan tertentu
baik → langsung mengacu kepada sifat tertentu
2. Makna gramatikal/struktural (disebut juga makna tata bahasa), yaitu makna kata yang timbul kemudian setelah mengalami proses tata bahasa. Proses tata bahasa itu ada dua macam, yaitu proses morfologis (pembentukan kata) dan proses sintaksis (pembentukan frasa dan klausa atau kalimat).
Misalnya:
 - prefiks (ber-) pada kata berilmu → mempunyai ilmu
 - prefiks (meN-) pada kata mendarat → menuju ke darat
 - kata saya dalam kalimat: Saya membaca buku → yang melakukan

Berdasarkan ada tidaknya makna tambahan makna kata dapat dibedakan atas:

1. Makna denotatif (disebut juga makna konseptual, makna objektif, makna lugas, atau makna sebenarnya), yaitu makna kata dalam alam wajar dan sesuai dengan konsep makna kata asal. Makna denotatif merupakan makna kata apa adanya karena tidak mengandung makna tambahan, baik tambahan rasa maupun tambahan denotasi lainnya atau kiasan. Misalnya:
 - Bulan bersinar terang.
 - Anak itu jatuh dari tangga.

2. Makna konotatif (disebut juga makna kontekstual, makna subjektif atau tambahan rasa, makna kiasan), yaitu aspek makna sebuah kata atau sekelompok kata yang didasarkan atas perasaan atau pikiran yang timbul atau ditimbulkan pada pembicaraan dan pendengar atau pada penulis dan pembaca. Makna ini merupakan tambahan dari sikap sosial serta sikap pribadi yang dikemukakan pada makna konseptual.
Misalnya :
 - Pada bulan muda banyak orang bepergian.
 - Harga karet jatuh di pasar dunia.

Berdasarkan hubungan makna antara satu kata dengan kata lain, dikenal beberapa istilah:

1. Sinonim, yaitu dua kata atau lebih yang pada dasarnya mempunyai makna yang sama, tetapi berlainan bentuk luarnya. Misalnya: telah — sudah.
2. Homonim, yaitu dua kata atau lebih yang sama lafal dan ejaannya, tetapi mengungkapkan makna yang berbeda karena dari asal yang berlainan atau tidak mempunyai hubungan makna.
Misalnya :
 - bisa (dapat) bisa (racun)
 - tanggal (lepas) → tanggal (kalender)

Menurut tingkatan, homonim itu ada dua macam:

- a. Homograf, yaitu dua kata atau lebih yang sama ejaannya, tetapi berbeda lafalnya dan tidak mempunyai hubungan makna.
Misalnya
 - apel (buah) → apel (berkumpul, berkunjung)
 - serak (sebar) serak (parau)
- b. Homofon, yaitu dua kata atau lebih yang sama lafalnya, tetapi berlainan ejaannya dan tidak mengandung hubungan makna.
Misalnya
 - songs (ragu-ragu) sanksi (hukuman)
 - bank (tempat menyimpan uang) → bang (kakak)
3. Hiponim, yaitu dua kata atau lebih yang maknanya terangkum oleh sebuah kata yang makna lebih luas atau superordinatnya.
Misalnya:
 - mawar, melati, cempaka hiponim kepada bunga
 - ayam, itik, bebek → hiponim kepada unggas
4. Polisemi, kata-kata yang memiliki makna ganda, tetapi masih dalam satu alur pengertian. Kepolisemian terjadi karena pergeseran makna atau tafsiran yang berbeda.
Misalnya:
 - kepala (jawatan) → kepala (anggota tubuh)
 - jatuh (dari atas ke bawah) jatuh (nilai ujiannya) jatuh (sakit)

Perubahan Makna Kata

Berdasarkan cakupan makna yang dimiliki sebuah kata, dikenal beberapa perubahan makna kata yaitu:

1. Meluas, yaitu apabila cakupan makna kata sekarang lebih luas dibandingkan cakupan makna asalnya/semula. Misalnya:

berlayar:

- dulu : bergerak di laut dengan menggunakan kapal layar
- sekarang : mengarungi lautan dengan apa saja

bapak:

- dulu : orang tua laki-laki
- sekarang : siapa saja laki-laki yang patut dihormati

2. Menyempit, yaitu apabila cakupan makna kata sekarang lebih sempit dibandingkan cakupan makna asalnya/ semula. Misalnya:

sarjana:

- dulu : untuk menyebut semua orang cendekiawan
- sekarang : untuk menyebut lulusan universitas

pendeta:

- dulu : untuk menyebut orang yang berilmu agama
- sekarang : untuk menyebut guru agama Kristen

3. *Amelioratif*, yaitu proses perubahan makna kata yang dirasakan nilainya menjadi lebih baik atau nilai konotasinya positif. Misalnya:

wanita:

- dulu : nilai konotasinya rendah
- sekarang : nilai konotasinya tinggi

tunanetra:

- sekarang : nilai konotasinya lebih tinggi dibandingkan dengan orang buta

4. *Penyoratif*, yaitu proses perubahan makna kata yang dirasakan nilainya menjadi lebih rendah atau nilai konotasinya negatif.

Misalnya:

- gerombolan → sekarang dirasakan nilai konotasinya negatif
- oknum → nilai konotasinya negatif

5. *Sinestesia*, yaitu perubahan makna akibat pertukaran tanggapan antara dua indra yang berlainan.

Misalnya: Kalimat "Kata-katanya pedas". Kata pedas sebenarnya

merupakan tanggapan indra perasa, tetapi dalam kalimat tersebut dikaitkan dengan indra pendengar.

6. *Asosiasi*, yaitu perubahan makna kata yang terjadi karena persamaan sifat. Misalnya: Kalimat "Beni saja amplop". Kata amplop dalam kalimat tersebut bermakna memberi uang suap.

Perpindahan Makna Kata

Perpindahan makna kata terjadi jika sebuah kata menduduki nilai semantik baru dalam penggunaan bahasa umum. Beberapa macam perpindahan makna di antaranya:

1. Kata yang berasal dari tiruan bunyi (onomatope), misalnya mengetuk, menggedor, mengaum, tokek, tekukur.
2. Kata yang berasal dari nama orang (apelativa), misalnya mujair, boikot, delman, honda.
3. Majas (disebut juga kiasan), yaitu kata yang maknanya diganti dengan makna konotasi yang lain.
4. Istilah, yaitu kata atau gabungan kata yang secara tepat mengungkapkan makna konsep, proses, dan sifat dalam bidang tertentu.

Majas

Majas kadang-kadang disalahtafsirkan dengan istilah gaya bahasa. Seperti disebutkan di atas majas hanyalah sebagian dari gaya bahasa yang menggunakan katakata dalam arti kiasan atau bukan dalam arti sebenarnya. Pada garis besarnya, majas itu ada tiga macam, yaitu majas perbandingan, majas pertentangan, dan majas pertautan.

1. Majas Perbandingan

Majas perbandingan ada tiga macam, yaitu perumpamaan, metafora, dan personifikasi.

- a. Perumpamaan/simile ialah majas yang menggunakan perumpamaan atau peribahasa yang menggunakan kata seperti, umpama, sebagai, laksana, ibarat, serupa, bak . Contoh:
 - Keadaan seperti makan buah simalakama.
 - Dia berada di kota besar seperti rusa masuk kampung.
- b. Metafora ialah majas perbandingan yang menggunakan kata-kata kiasan yang tidak menggunakan kata seperti, disebut juga perbandingan langsung.
Contoh:
 - Bunga bangsa gugur di medan laga.
 - Dia adalah pelita hatiku.
- c. Personifikasi ialah majas perbandingan dengan cara meletakkan sifat-sifat insan (orang) pada benda mati.

Contoh:

- Peluit kereta api menjerit.
- Senja memanggil burung kesayangannya.

2. Majas Pertentangan

Majas pertentangan ada tiga macam, yaitu hiperbola, litotes, dan ironi.

- a. Hiperbola yaitu majas pertentangan yang menggunakan kata-kata yang mengandung makna berlebih-lebihan padahal maknanya biasa-biasa saja. Contoh:
 - Sejuta kenangan mengusik pikiranku.
 - Harga-harga bergerak naik secepat kilat.
- b. Litotes yaitu majas pertentangan yang menggunakan kata-kata yang mengandung makna merendahkan, padahal maksudnya tinggi. Contoh:
 - Sumbangan ini hanyalah setetes air pemuas dahaga.
 - Mamlrlah ke gubuk buruk kami.
- c. Ironi yaitu majas pertentangan yang menggunakan kata-kata yang bertentangan dengan yang dimaksud. Contoh:
 - Baru pukul dua dini hari, mengapa engkau sudah pulang?

3. Majas Pertautan

Majas pertautan ada empat macam, yaitu metonimia, sinekdok, alusio, dan eufemisme.

- a. Metonimia ialah majas pertautan yang menggunakan kata-kata yang berkaitan dengan hal-hal pembuat atau merek dagang benda itu. Contoh:
 - Ia sedang mengisap Gudang Garam (rokok).
 - Setiap pergi ke sekolah, ia naik Honda (mobil).
- b. Sinekdok ialah majas pertautan yang menggunakan kata-kata yang berkaitan dengan hal-hal yang dipentingkan. Contoh:
 - Indonesia hanya memenangi satu gelar dalam kejuaraan All England (sinekdok totem proparte, yaitu keseluruhan untuk menyatakan sebagian).
 - Dalam rangka memperingati HUT ke-64 RI, setiap kepala keluarga dikenat iuran Rp 25.000,00 (pars prototo, yaitu sebagian untuk menyatakan keseluruhan).
- c. Alusio ialah majas pertautan yang menggunakan kata-kata yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa umum yang terjadi atau menggunakan bahasa yang umum untuk menggunakan suatu maksud. Contoh:
 - Hati-hati jangan sampai terjadi peristiwa Madiun terjadi lagi.
 - Engkau ini hanya kura-kura dalam perahu saja.
- d. Eufemisme ialah majas pertautan yang menggunakan kata-kata yang berkaitan dengan kesopanan atau kata-kata pantang.

Contoh:

- kencing → diganti dengan kata ke belakang
- bodoh → diganti dengan kurangpandai

Misal: Maaf, Pak, saya akan ke belakang sebentar.

Istilah

Istilah adalah kata atau gabungan kata yang secara cermat mengungkapkan suatu konsep, proses, keadaan atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Perangkat peraturan pembentukan istilah dan istilah yang dihasilkannya disebut tata istilah. Adapun, perangkat peraturan penamaan beberapa cabang ilmu dan nama yang digunakan secara umum bahasa disebut istilah umum, misalnya:

- metabolisme → istilah biologi
- natrium klorida → nama zat kimia
- diagnosis → istilah khusus kedokteran
- daya → istilah umum

TATA KALIMAT

Ilmu yang mempelajari kalimat disebut sintaksis. Yang menjadi objek penelitian sintaksis adalah frasa, klausa, kalimat, dan wacana.

Frasa (Kelompok Kata)

Frasa atau kelompok kata adalah gabungan dua kata atau lebih yang membentuk satu kesatuan, tetapi tidak membentuk Subjek — Predikat dan tidak membentuk makna baru. Bentuk baru itu tidak menimbulkan makna yang berbeda dengan makna kata sebelumnya. Misalnya dalam frasa: buku saya artinya tetap, yaitu buku milik saya. Berbeda dengan mata majemuk yang dapat menimbulkan makna baru, misalnya rumah sakit bukan bermakna rumah yang sakit.

1. Macam-macam Frasa

- a. Frasa nominal yaitu frasa yang berintikan kata benda, misalnya rumah baru (inti atau yang diterangkan adalah rumah).
- b. Frasa verba yaitu frasa yang berintikan kata kerja, misalnya sudah pergi (berintikan kata kerja pergi).
- c. Frasa adjektiva yaitu frasa yang berintikan kata sifat, misalnya sangat baik (berintikan kata sifat baik).
- d. Frasa adverbial yaitu frasa yang tidak mempunyai inti, frasa ini hanyalah gabungan dua kata keterangan atau lebih, misalnya: sudah akan, hampir tidak.
- e. Frasa preposisional yaitu frasa yang didahului kata depan dan frasa ini juga tidak mempunyai inti.

2. Menurut tipe strukturnya frasa itu dapat dibagi menjadi:

- a. Frasa endosentris yaitu frasa yang salah satu atau kedua unsurnya

menjadi inti frasa itu. Frasa endosentris dibagi menjadi tiga yaitu:

- Frasa endosentris yang subordinatif yaitu apabila salah satu unsurnya sebagai inti dan unsur lainnya sebagai keterangan, misalnya:

harga pasar beberapa guru

D M M D

D = diterangkan = inti

M = menerangkan = penjelas

Mayoritas frasa dalam bahasa Indonesia berpola (D - M), frasa yang berpola (M - D) sangat sedikit.

- Frasa endosentris yang koordinatif yaitu apabila semua unsur frasa itu dapat berlaku sebagai inti, misalnya: suami istri, baik buruknya, sawah Wang, meja kursi. Frasa setara dapat disisipi konjungsi dan, atau, maupun tanpa mengubah makna.
- Frasa endosentris yang apositif apabila salah satu unsurnya sebagai keterangan, tetapi keterangan itu dapat mengganti kedudukan yang diterangkannya. Misalnya:

Pak Ahmad, guru baru di sekolah kami, melambaikan tangannya.

Frasa guru baru di sekolah kami dalam kalimat tersebut berfungsi menjelaskan Pak Ahmad.

- b. Frasa eksosentris yaitu frasa yang unsur-unsurnya tidak menjadi Inti frasa itu. Frasa eksosentris dibagi dua, yaitu:
 - Frasa eksosentris yang efektif yaitu frasa yang menunjukkan arch, misalnya di sekolah, kepada peminta-minta, dari pasar.
 - Frasa eksosentris yang objektif yaitu frasa yang salah satu unsurnya sebagai objek, misalnya melambaikan tangan.

3. Pola Pembentuk Frasa

Pola pembentukan frasa adalah sebagai berikut:

- a. Kata benda + kata benda, misalnya rumah beton, kapal layar
- b. Kata benda + kata kerja, misalnya kapal terbang, baju renang
- c. Kata benda + kata sifat, misalnya baju kotor, kitab suci
- d. Kata kerja + kata benda, misalnya pulang kampung, mandi madu
- e. Kata keterangan + kata sifat, misalnya sangat indah, what kuat

Klausa

Klausa adalah suatu konstruksi yang di dalamnya terdapat beberapa kata yang mengandung hubungan fungsional yang menurut tata bahasa tradisional dikenal sebagai Subjek dan Predikat. Klausa ini merupakan bagian dari kalimat yang luas atau kalimat majemuk. Klausa terdiri atas dua macam, yaitu:

1. Klausa utama/induk kalimat yaitu klausa yang dapat berdiri sebagai kalimat. Cirinya bahwa klausa utama tidak boleh didahului konjungsi, misalnya Bapak membaca Koran. Ibu memasak di dapur. Bapak membaca koran merupakan klausa utama. Demikian juga Ibu memasak

- di dapur.
2. Klausa bawahan/ anak kalimat yaitu klausa yang tidak dapat berdiri sebagai kalimat. Cinnya didahului oleh konjungsi, misalnya Saya datang ketika la tidur. Klausa ketika la tidur dalam kalimat itu tidak dapat berdiri sendiri.

Kalimat

Kalimat adalah bagian terkecil ujaran atau teks yang mengungkapkan pikiran yang utuh secara ketatabahasaan. Dalam wujud lisan, kalimat diiringi oleh alunan titi nada, disela oleh jeda, serta diakhiri oleh intonasi selesai. Dalam wujud tulisan, kalimat dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik (.), tanda tanya(?), atau tanda seru (!).

Menurut ahli tata bahasa tradisional, kalimat ialah satuan kumpulan kata yang mengandung pengertian yang lengkap. Kelengkapan ini merupakan keharmonisan bentuk dan tanggapan. Pola yang menentukan sempurna atau tidaknya suatu kalimat adalah

Subjek — Predikat (Objek)

Menurut ahli tata bahasa modern, kalimat ialah suatu bagian ujaran yang didahului oleh kesenyapan dan diakhiri oleh kesenyapan, sedangkan intonasinya menunjukkan bahwa bagian ujaran itu sudah lengkap. Kalimat harus mencakup beberapa segi, yaitu:

1. Unsur segmental/utama kata, frasa, dan klausa.
2. Unsur suprasegmental/prosodi berupa intonasi.
3. Makna/arti.
4. Situasi.

Sebelum membicarakan kalimat, berikut ini beberapa istilah yang berhubungan dengan kalimat, yaitu:

1. Kategori dan Fungsi

Kata yang mempunyai bentuk dan perilaku yang sama dimasukkan dalam kategori/ kelompok yang sama. Bahasa Indonesia memiliki empat kategori yang sama: (1) verba atau kata kerja, (2) nomina atau kata benda, (3) adjektiva atau kata sifat, dan (4) adverbial atau kata keterangan. Di samping itu ada satu kelompok lain yang dinamakan kata tugas yang terdiri dari atas kelompok preposisi atau kata depan, konjungsi atau kata sambung, interjeksi atau kata seru, dan partikel.

Setiap kata atau frasa dalam kalimat mempunyai fungsi yang mengaitkannya dengan kata atau frasa lain yang ada dalam kalimat itu. Fungsi sintaksis utama dalam bahasa adalah predikat, subjek, objek, pelengkap, dan keterangan. Di samping itu ada fungsi lain yaitu atributif (yang menerangkan), predikatif (yang dianggap sebagai sebutan), dan

substantif (yang dianggap sebagai kata benda).

Dalam bab ini hanya dibicarakan tentang fungsi kata atau fungsi frasa dalam kalimat.

a. Predikat

Predikat merupakan bagian yang dipentingkan dalam kalimat dan memberikan penjelasan tentang subjek. Misalnya kalimat saya makan, kata makan dalam kalimat itu merupakan intinya. Oleh karena itu, makna dalam kalimat itu adalah predikat. Contoh lain kalimat saya yang makan. Kata saya dalam kalimat itu merupakan bagian yang dipentingkan atau predikat.

b. Subjek

Subjek adalah bagian yang diterangkan dalam kalimat. Misalnya kalimat dia guru. Dia dalam kalimat itu adalah bagian yang diterangkan atau subjek. Contoh lain: Anak itu rajin. Kucing itu binatang. Ayah sedang bekerja. Kata anak, kucing dan ayah dalam kalimat itu merupakan bagian yang diterangkan atau subjek.

c. Objek

Objek adalah bagian predikat dalam kalimat yang mempunyai kedudukan yang sangat erat sehingga tidak dapat dipisahkan dalam kalimat kecuali berubah bentuk atau arti. Misalnya kalimat saya membaca buku di perpustakaan. Membaca buku dalam kalimat itu tidak dapat dipisahkan, kecuali berubah bentuk kata membaca menjadi baca atau berubah artinya. Ada fungsi lain dalam kalimat yang seperti objek yaitu pelengkap. Perbedaannya terletak pada objek dapat dijadikan subjek dalam kalimat pasif, sedangkan pelengkap tidak dapat dijadikan subjek.

d. Keterangan

Keterangan adalah bagian predikat dalam kalimat yang kedudukannya renggang sehingga dapat dipisahkan tanpa menimbulkan perubahan makna. Contoh frasa di perpustakaan dalam kalimat saya membaca buku di perpustakaan dapat dipisahkan tanpa mengubah makna kalimat menjadi di perpustakaan saya membaca buku.

2. Bagian Kalimat

Jika dilihat dari bentuk sintaksisnya, kalimat dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu bagian inti kalimat disebut juga unsur inti dalam kalimat (bagian kalimat yang tidak dapat dilepaskan) dan bagian bukan inti kalimat (bagian kalimat yang dapat dilepaskan). Bagian inti (unsur inti) kalimat

yaitu S — P — (0), dan bagian yang bukan inti yaitu keterangan, misalnya:

- Kami kemarin sore mendatangi pertemuan itu.
- Kami mendatangi pertemuan itu (bagian inti), kemarin sore (bukan bagian inti).

3. Ragam Kalimat

Menurut tata bahasa tradisional, jika dilihat dari bentuknya, kalimat dapat berupa kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Adapun menurut tata bahasa modern, kalimat itu dapat berupa kalimat mayor dan kalimat minor.

Jika ditinjau dari segi maknanya, kalimat dapat berupa kalimat deklaratif atau kalimat berita, kalimat interogatif atau kalimat tanya, kalimat imperatif atau kalimat perintah, kalimat eksklamatif atau kalimat seru, dan kalimat emfatik atau kalimat penegasan.

Kalimat Tunggal

Kalimat tunggal adalah kalimat yang mempunyai satu klausa atau satu susunan Subjek-Predikat. Kalimat tunggal terdiri atas satu kesatuan baik dengan atau tanpa bagian bukan inti, misalnya:

- Saya menulis.
- Saya menulis surat.
- Saya menulis surat untuk ibu.

- 1) Kalimat Tunggal Berpredikat Nomina Kalimat berpredikat nomina disebut juga kalimat skuatif atau kalimat persamaan. Pola pembentukannya ialah dengan menggabungkan dua nomina/frasa nomina sebagai S dan P. Jika S atau P atau kedua-duanya panjang, digunakan kata adalah. Dalam tata bahasa lama, kalimat seperti ini disebut kalimat nomina, misalnya:

Saya mahasiswa IKIP.
S P

Jika frasa nomina pertama dibubuhi partikel (—lah), frasa pertama berubah fungsinya menjadi P, misalnya:

Dialah adik saya.
P S

Jika kalimat ekuatif yang menggunakan adalah, kata adalah berfungsi sebagai P dan frasa nomina di belakangnya yang asalnya berfungsi sebagai P berubah menjadi pelengkap.

Misalnya:

Penghentian seorang karyawan
S

adalah masalah biasa.
P pelengkap

- 2) Kalimat Tunggal Berpredikat Adjektiva Kalimat berpredikat adjektiva disebut kalimat states. Dalam tata bahasa lama, sama seperti kalimat ekuatif disebut kalimat nominal. Pola pembentukannya adalah dengan menjejerkan nomina/frasa nomina dengan adjektiva/frasa adjektiva sebagai S dan P. Jika S atau P atau kedua-duanya panjang, dapat digunakan kata adalah, misalnya:

Ayahnva sakit.

S P

Pernyataan Ketua Koperasi itu

S

adalah tidak benar.

P pelengkap

- 3) Kalimat Tunggal Berpredikat Verba. Kalimat berpredikat verba disebut kalimat verbal. Kalimat verbal ada tiga macam, yaitu:

- Kalimat transitif

Kalimat transitif adalah kalimat berobjek. Kalimat transitif dibagi menjadi (1) kalimat ekatransitif, yaitu yang berobjek satu, misalnya:

Pemerintah akan memasok semua

S P

kebutuhan lebaran.

O

- Kalimat dwitransitif, yaitu kalimat yang berobjek dua misalnya:

Ia mencarikan adiknya pekerjaan.

S P O pelengkap

- Kalimat tak transitif

Kalimat tak transitif adalah kalimat tak berobjek dan tak berpelengkap. Seperti halnya dengan kalimat tunggal lain kalimat tak transitif dapat diikuti oleh keterangan. Polanya adalah S — P (Ket). Jika verba tak transitif diikuti nomina, nomina itu merupakan bagian dari verba, misalnya :

Padinya menguning.

S P

Ia berjalan kaki ke sekolah.

S P keterangan

- Kalimat semitransitif.

Kalimat semitransitif adalah kalimat tak berobjek, tetapi berpelengkap. Verba dalam kalimat semitransitif adalah verba semitransitif.

Misalnya:

Botol itu berisi airputih.

S P pelengkap

- 4) Kalimat dengan Frasa lain sebagai Predikat

Selain frasa nomina, frasa verbal, frasa adjektiva, dan frasa lainnya pun dapat berfungsi sebagai predikat. Contoh kalimat dengan P frasa lainnya:

- *Tinggalnya di Ujungpandang.* (di Ujungpandang = P = frasa preposisional).
- *Anaknya banyak.*
(banyak = P = numeralia/kata bilangan).

Kalimat Aktif dan Pasif

Kalimat aktif dan pasif dalam kalimat menyangkut beberapa hal: (1) macam verba yang menjadi predikat, (2) subjek dan objek, dan (3) bentuk verba yang dipakai. Kalimat pasif adalah perubahan kalimat aktif transitif dengan cara sebagai berikut:

- a. Pertukarkanlah S dengan O.
- b. Gantilah P yang berprefiks (me-) dengan (di-), atau hapuslah (me-) dan verbanya jika pelaku perbuatannya pronomina pertama dan pronomina kedua.
- c. Tambahkan kata oleh pada pelaku pronomina ketiga sifatnya fakultatif. Jika pelakunya pronomina pertama atau pronomina kedua, tidak perlu ditambahkan kata oleh.

Misalnya kalimat transitif berikut:

- 1) Pak Toha mengangkat asisten baru.
- 2) Mereka memperbaiki rumah itu.
- 3) Kami tidak memaksa orang lain.
- 4) Toni ingin mencium Tini.

Jika kalimat di atas diubah menjadi kalimat pasif, maka akan menjadi:

- Asisten baru diangkat (oleh) Pak Toha.
- Rumah itu diperbaiki (oleh) mereka.
- Orang lain tidak kami paksa.

Kalimat (4) tidak dapat dijadikan kalimat pasif karena akan mengubah arti asalnya. Jika dipasifkan akan menjadi Tini ingin dicium. Padahal, seharusnya Toni yang ingin mencium. Demikian juga kalimat-kalimat aktif transitif yang mengandung kata-kata yang secara kodratnya mengacu keinginan seperti senang, mau, berhasil tidak dapat dijadikan kalimat pasif.

Kalimat pasif berprefiks (ter-) menunjukkan ketidaksengajaan dan tidak memisahkan siapa yang menjadi pelakunya. Misalnya:

- Penumpang bus itu terlempar ke luar.
- Soal itu terlepas dari rasa senang dan tidak senang.

Kalimat Menurut Isinya

Ditinjau dari segi maknanya, kalimat terbagi menjadi lima kelompok, yakni:

a. Kalimat Berita

Kalimat berita ialah kalimat yang isinya memberitahukan sesuatu kepada pembaca atau pendengar. Kalimat berita tersebut juga kalimat deklaratif.

Ciri-ciri kalimat berita adalah sebagai berikut:

- 1) Isinya memberitahukan sesuatu.
- 2) Intonasinya netral (nada suara berakhir turun).
- 3) Tanggapan pembaca atau pendengar tidak ada (zero).
- 4) Dalam tulisan diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik.

Contoh kalimat berita:

- Tadi pagi terjadi tabrakan mobil di dekat Monas.
- Saya melihat orang itu memberi sesuatu kepada pengemis.

b. Kalimat Perintah

Kalimat perintah ialah kalimat yang isinya memberikan perintah untuk melakukan sesuatu. Kalimat perintah disebut juga kalimat imperatif. Ciri-ciri kalimat perintah adalah sebagai berikut:

- 1) Isinya perintah untuk melakukan sesuatu.
- 2) Intonasinya perintah (nadanya agak naik).
- 3) Tanggapannya dalam bentuk perbuatan.
- 4) Dalam tulisan, kalimat perintah diakhiri dengan tanda seru (!). Contoh kalimat perintah:
 - Berliburlah ke tempat nenekmu! (aktif tak transitif)
 - Carilah pekerjaan apa saja! (aktif transitif)
 - Dijual saja mobil setua ini, ya! (pasif)

Macam-macam kalimat perintah:

- 1) Perintah biasa: Usirlah anjing itu!
- 2) Permintaan: Coba ambilkan majalah itu!
- 3) Ajakan: Mari kita berangkat sekarang!
- 4) Syarat: Tanyakan kepadanya, tentu is mau menerangkannya!
- 5) Ejekan/cemooh: Buatlah sendiri jika engkau bisa!
- 6) Larangan: langanlah merokok di sini!

c. Kalimat Tanya

Kalimat tanya ialah kalimat yang isinya menanyakan sesuatu kepada seseorang. Kalimat tanya disebut juga kalimat interogatif.

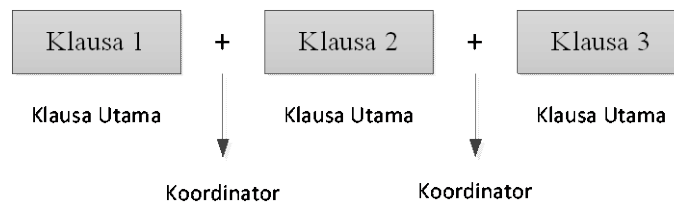
Pada garis besarnya kalimat tanya itu ada dua macam: (1) kalimat tanya total, yaitu kalimat tanya yang jawabannya ya atau tidak, (2) kalimat tanya parsial, yaitu kalimat tanya yang jawabannya ditentukan oleh kata tanyanya.

Pada garis besarnya kalimat majemuk terbagi menjadi dua macam, yaitu kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat.

a. Kalimat Majemuk Setara

Kalimat majemuk setara ialah kalimat yang terdiri atas dua klausa yang hubungannya setara. Klausa-klausa dalam kalimat majemuk setara merupakan klausa utama. Klausa satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan kata penghubung atau yang disebut koordinator. Itulah sebabnya kalimat majemuk setara disebut juga kalimat koordinasi atau kalimat gabung.

Hubungan antarklausa dalam kalimat majemuk setara dapat digambarkan sebagai berikut:

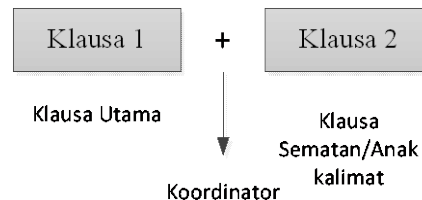


Menurut hubungan antarklausanya, kalimat majemuk setara dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

- 1) Kalimat majemuk setara dengan hubungan penjumlahan. Hubungannya ditandai oleh kata sambung *dan, serta, atau baik... maupun...* Jika dilihat konteksnya, hubungan penjumlahan itu dapat dinyatakan: (1) sebab akibat, misalnya: *Pengaruh revolusi itu tertanam dalam dirinya dan dari situ idenya tentang perjuangan berkembang cepat*; (2) urutan waktu, misalnya: *Ia hanya mengangguk-angguk dan air matanya mengalir deras*; (3) pertentangan, misalnya: *Keberhasilannya dicapai dengan kerja keras dan hanya kegagalan yang dapat diharapkan dari hidup bermalas-malas*; (4) perluasan, misalnya: *Ujian seperti itu disebut uji bakat dan terutama mengukir kemampuan intelektual seseorang*.
- 2) Kalimat majemuk setara dengan hubungan memilih. Hubungannya ditandai oleh kata atau, misalnya: *Beliau sedang melamun atau sedang memikirkon saya*.
- 3) Kalimat majemuk setara dengan hubungan perlawanan. Hubungannya ditandai oleh kata tetapi. Jika dilihat isinya, hubungan perlawanan ini dapat menyatakan (1) penguatan, misalnya: *Bapak menjadi perhatian penduduk tidak hanya dari keluarga, tapi juga menjadi perhatian penduduk di desaku*; (2) implikasi, misalnya: *Adikku belum bersekolah, tetapi dia sudah dapat membaca buku*; (3) perluasan, misalnya: *Adat dipertahankan supaya tidak berubah, tetapi unsur baru dari luar yang dianggap baik boleh dimasukkan*.

b. Kalimat Majemuk Bertingkat Kalimat majemuk bertingkat adalah

kalimat tunggal yang diperluas dan perluasan itu berbentuk klausa baru. Hubungan antara klausa satu dengan klausa lain disambung dengan subordinasi. Itulah sebabnya, kalimat majemuk bertingkat disebut juga kalimat subordinasi atau kalimat kompleks. Hubungan antarklausa dalam kalimat majemuk bertingkat dapat digambarkan sebagai berikut:



Konjungsi atau kata sambung yang digunakan dalam kalimat majemuk bertingkat adalah:

- 1) Sejak: menyatakan hubungan waktu awal.
- 2) Sewaktu, ketika: menyatakan hubungan waktu bersamaan.
- 3) Sebelum, sehabis: menyatakan hubungan waktu berurutan.
- 4) Hingga, sampai: menyatakan hubungan waktu hadir.
- 5) Jika, kalau, andaikan: menyatakan hubungan syarat.
- 6) Supaya, agar: menyatakan hubungan tujuan.
- 7) Walaupun, biarpun, kendatipun, meskipun: menyatakan hubungan konsesif/perlawanan.
- 8) Seperti, ibarat: menyatakan hubungan perbandingan.
- 9) Sebab, karena: menyatakan hubungan penyebab.
- 10) Sehingga, sampai-sampai, maka, akibatnya: menyatakan hubungan akibat.
- 11) Seakan-akan, seolah-olah: menyatakan hubungan sangkalan.
- 12) Padahal: menyatakan hubungan kenyataan.
- 13) Makanya: menyatakan hubungan hasil.
- 14) Bahwa, apa: menyatakan hubungan penjelas.
- 15) Yang: menyatakan hubungan atribut/ keterangan.

Berdasarkan klausa sematannya/anak kalimatnya, kalimat majemuk bertingkat dapat dibagi menjadi kalimat majemuk bertingkat:

- 1) Anak kalimat pengganti keterangan waktu, misalnya: *Sejak aku diserahkan orang tua kepada nenek, aku tidur di atas dipan di kamar nenek.*
- 2) Anak kalimat pengganti keterangan syarat, misalnya: *Jika anda mau mendengarkannya, saya tentu akan senang sekali.*
- 3) Anak kalimat pengganti keterangan tujuan, misalnya: *Nenekku bercerita tentang kepahlawanan agar aku memiliki keberanian seperti pahlawan itu.*
- 4) Anak kalimat pengganti keterangan konsesif, misalnya: *Walaupun hatinya sedih, dia tidak pernah menangis di hadapanku.*
- 5) Anak kalimat pengganti keterangan perbandingan, misalnya: *Daripada menganggur, cobalah engkau bekerja di kebun saya.*
- 6) Anak kalimat pengganti keterangan sebab, misalnya: *Keadaan menjadi*

- genting karena musuh akan melancarkan aksinya.*
- 7) Anak kalimat pengganti keterangan akibat, misalnya: *Biaya pengobatannya sangat mahal sehingga perhiasan istrinya habis terjual.*
 - 8) Anak kalimat pengganti keterangan cara, misalnya: *Ia mencoba bertahan dengan kedua tangannya menutup mukanya.*
 - 9) Anak kalimat pengganti keterangan sangkalan, misalnya: *Dia diam seakan-akan dia tidak mengetahui masalah itu.*
 - 10) Anak kalimat pengganti keterangan objek, misalnya: *Dia mengatakan bahwa isi buku ini belum sempurna.*
 - 11) Anak kalimat pengganti keterangan predikat, misalnya: *Ayahnya adalah orang yang mendidik siswa.*
 - 12) Anak kalimat pengganti keterangan subjek, misalnya: *Orang yang sedang bermain gitar itu ternyata penyanyi terkenal.*

c. Kalimat Efektif

Kalimat yang baik harus disusun berdasarkan kaidah-kaidah: (1) unsur-unsur penting yang ada dalam sebuah kalimat, (2) aturan-aturan tentang EYD, dan (3) cara memilih kata/diksi dalam kalimat. Kalimat yang jelas dan baik akan dengan mudah dipahami orang lain secara tepat. Kalimat yang demikian disebut kalimat efektif.

Persyaratan yang perlu diperhatikan dalam pembentukan kalimat efektif adalah:

1) Kesepadanan dan Kesatuan

Yang dimaksud dengan kesepadanan dan kesatuan dalam kalimat ialah kemampuan struktur bahasa dalam mendukung gagasan ide. Struktur tersebut paling kurang mengandung subjek dan predikat. Tanpa subjek atau predikat, kalimat tersebut tidak akan menjadi efektif, misalnya: (1) *Kepada para mahasiswa diharap mendaftarkan diri.* (2) *Di dalam keputusan itu merupakan kebijaksanaan yang dapat menguntungkan umum.*

Penjelasan:

Kalimat (1) kehadiran preposisi kepada dalam kalimat tersebut menjadikan kalimat tersebut tidak mempunyai subjek sehingga preposisi kepada harus dihilangkan. Kalimat tersebut menjadi: Para mahasiswa (S) diharap (P) mendaftarkan diri (K). Demikian juga kalimat (2) seharusnya menjadi : Keputusan itu (S) merupakan kebijaksanaan yang dapat menguntungkan umum. Dalam kalimat efektif ide pokok kalimat harus jelas. Ide pokok tersebut biasanya ditempatkan pada awal kalimat.

Perhatikan contoh kalimat berikut:

- (1) *Ia ditembak mati ketika masih dalam tugas,* (2) *Ia masih dalam*

tugas militer ketika ditembak mati.

Ide pokok atau inti kalimat (1) Ia ditembak mati, sedangkan ide pokok kalimat (2) Ia masih dalam tugas militer.

Kalimat panjang yang mengandung beberapa anak kalimat dapat menimbulkan ide pokok menjadi tidak jelas, misalnya:

Kami sependapat dan terima kasih atas saran Saudara untuk memberikan honor yang lebih banyak kepada para guru, namun honor nya sekarang ini tampaknya sudah yang paling tinggi yang dapat kami berikan dikaitkan dengan kemampuan keuangan yayasan.

Kalimat di atas dapat dipecah menjadi beberapa kalimat sehingga tampak ide pokoknya, misalnya: Kami berterima kasih atas saran untuk memberikan honor yang lebih tinggi kepada guru. Saran itu kami setuju. Namun, tampaknya honor tersebut sudah yang paling tinggi yang dapat kami berikan bila dikaitkan dengan keuangan yayasan.

2) Kesejajaran (Paralelisme)

Yang dimaksud dengan kesejajaran dalam kalimat adalah penggunaan bentuk-bentuk yang sama yang digunakan dalam secara paralel atau sejajar. Jika sebuah pikiran dinyatakan dengan frasa, pikiran lain harus dalam bentuk frasa. Jika satu gagasan dinyatakan dengan kata benda atau kata kerja, gagasan lain pun harus dinyatakan dengan kata benda atau kata kerja, misalnya:

- (1) *Penghapusan pangkalan asing dan penarikan kembali tentara AS dari Filipino akan mempercepat perwujudan cita-cita segenap bangsa Asia Afrika.*
- (2) *Dihapusnya pangkalan asing dan ditariknya tentara AS dari Filipino akan mempercepat terwujudnya cita-cita segenap bangsa Asia Afrika.*
- (3) **Penekanan Ide Pokok**

Sebuah kalimat memiliki sebuah ide pokok. Dalam bahasa lisan ide pokok yang akan ditonjolkan biasanya dilafalkan dengan intonasi tertentu, misalnya memperlambat ucapan atau meninggikan suara. Dalam bahasa tulisan terdapat beberapa cara untuk menonjolkan ide pokok itu, yaitu:

- (a) *Penempatan ide pokok pada awal kalimat, misalnya: Dia berpendapat bahwa salah satu indikator yang menunjukkan tidak efisiennya perusahaan adalah rasio yang masih timpang antara jumlah karyawan dengan produksi.*
- (b) *Penyusunan peristiwa menurut urutan yang logis, misalnya: Kehidupan anak itu susah, sulit. dan tragis.*
- (c) *Pengulangan kata, misalnya: Pembongunan mempunyai banyak dimensi, tidak hanya berdimensi ekonomi, tetapi juga dimensi politik, dimensi sosial, dan dimensi budaya*

- 4) Penghematan Penggunaan Kata
- Unsur penting dalam pembentukan kalimat efektif adalah penghematan penggunaan kata yang tidak diperlukan. Unsur-unsur penghematan yang perlu diperhatikan, yaitu:
- (1) Penghindaran pengeluaran subjek, misalnya: *Hadirin serentak berdiri setelah mereka mengetahui pejabat tinggi memasuki ruang pertemuan. Kalimat ini akan menjadi efektif jika subjek tidak diulang, menjadi: Hadirin serentak berdiri setelah mengetahui pejabat tinggi memasuki ruang pertemuan.*
 - (2) Penghindaran unsur atas dalam hiponim, misalnya: *Warna merah dan warna ungu adalah warna kesayangannya.* Kalimat ini akan menjadi efektif jika kata warna dihilangkan sehingga menjadi: *Merah dan ungu adalah warna kesayangannya.*
 - (3) Penghilangan kata depan yang tidak perlu, misalnya: *Anggota DPRD dari Jawa Barat mengadakan kunjungan ke daerah* (kata dari dihilangkan). *Presiden menekankan bahwa dalam pembangunan ini kepentingan daripada rakyat harus diutamakan.* (kata daripada dihilangkan). *Bapak guru sedang membicarakan mengenai masalah kebudayaan.* (kata mengenai dihilangkan karena setelah predikat transitif (me-) langsung diikuti objek).
- 5) Kevariasian dalam struktur kalimat. Kalimat—kalimat yang menggunakan pola dan bentuk yang sama akan menimbulkan kebosanan dan suasana monoton pada pembaca. Oleh karena itu, dalam penulisan diperlukan pola dan bentuk kalimat yang bervariasi.

Kemungkinan variasi kalimat adalah sebagai berikut:

- (1) Variasi dalam pembukaan kalimat.
- (2) Variasi dalam pola kalimat.
- (3) Variasi dalam jenis kalimat.

LATIHAN SOAL TWK: PANCASILA

Jumlah Soal : 20 butir

Waktu : 15 menit

Penilaian : Nilainya 0 jika salah dan 5 jika benar

***Petunjuk:** Untuk soal nomor 1 sampai dengan nomor 20, pilihlah salah satu jawaban yang saudara anggap paling tepat diantara 5 pilihan jawaban yang tersedia!*

1. Undang-undang Dasar 1945 dirancang oleh suatu badan yang dibentuk oleh bala tentara Jepang pada tahun 1945, yaitu...
 - A. PPKI
 - B. DPR
 - C. BPUPKI
 - D. MPR
 - E. Seikoden

2. Pangkal tolak penghayatan dan pengamalan Pancasila adalah...
 - A. Keamanan dan kemampuan mengadakan tuntutan dan kebutuhan masyarakat modern.
 - B. Kemauan dan kemampuan mengembangkan pertenggaran antar umat beragama.
 - C. Kemauan dan kemampuan manusia Indonesia dalam mengendalikan diri.
 - D. Kemauan dan kemampuan manusia Indonesia mengembangkan kebudayaan asing.
 - E. Kemauan dan kemampuan manusia Indonesia menjaga Indonesia.

3. Dalam rangka membina rasa nasionalisme di kalangan masyarakat Indonesia hendaknya dilakukan dengan menghindari hal-hal berikut, kecuali...
 - A. Patriotisme
 - B. Sukuisme Chauvimisme
 - C. Ekstrimisme
 - D. Jingoisme

4. Dalam sumber tata hukum di Indonesia, Pancasila dijadikan sebagai...
 - A. Sumber dari segala sumber hukum.
 - B. Hukum tertinggi di Indonesia.
 - C. Hukum tertulis tertinggi di Indonesia.
 - D. Setingkat dengan UUD 1945.
 - E. Hukum tidak tertulis tertinggi di Indonesia.

5. Pancasila bagi bangsa Indonesia merupakan...
 - A. Pandangan hidup
 - B. Falsafah dan dasar negara

- C. Sumber hukum
 - D. Semua benar
 - E. Semua salah
6. Dalam mempertahankan kehidupan serta mengupayakan kehidupan yang lebih baik, manusia hidup bermasyarakat. Dalam hidup bermasyarakat tersebut perlu dijaga keserasian hubungan antar manusia dan ketertiban masyarakat itu sendiri. Untuk itu perlu sikap dan perbuatan...
 - A. Menghormati hak-hak orang lain
 - B. Semangat perjuangan yang tinggi
 - C. Tekad yang bulat
 - D. Pengendalian diri
 - E. Semena-mena
 7. Tata cara mengucapkan Pancasila pada upacara-upacara resmi ditetapkan dalam...
 - A. TAP MPR RI No.II/MPR/1978
 - B. INPRES No.12 Tahun 1968
 - C. UU No.5 Tahun 1985
 - D. TAP MPR No.I/MPR/1983
 - E. UUD 1945
 8. Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila ditetapkan pada tanggal...
 - A. 2 Maret 1978
 - B. 4 Maret 1978
 - C. 12 Maret 1978
 - D. 14 Maret 1978
 - E. 22 Maret 1978
 9. Dalam kehidupan bernegara, Pancasila berperan sebagai...
 - A. Dasar negara
 - B. Dasar kenegaraan
 - C. Dasar beragama
 - D. Dasar ketatanegaraan
 - E. Dasar perjuangan bangsa
 10. Keseimbangan antara hak dan kewajiban mengandung pengertian bahwa...
 - A. Mengatur batas hak asasi manusia.
 - B. Mengatur kepentingan bersama.
 - C. Sesuai dengan harkat dan martabat manusia.
 - D. Hak asasi manusia setiap manusia.
 - E. Menuntut hak baru melaksanakan kewajiban.
 11. Kekuasaan Negara yang tertinggi berada di tangan ...
 - A. Presiden

- B. Presiden dan wakil presiden
 - C. Dewan Perwakilan Rakyat
 - D. Majelis Permusyawaratan Rakyat
 - E. Menteri
12. Rumusan Pancasila yang resmi terdapat dalam...
- A. Pidato Bung Karno
 - B. Proklamasi 17 Agustus 1945
 - C. Pembukaan UUD 1945
 - D. Piagam Jakarta
 - E. Kitab Sutasoma
13. Landasan idiil negara kita adalah...
- A. UUD 1945
 - B. Tap MPR
 - C. Pancasila
 - D. Proklamasi Kemerdekaan
 - E. Keputusan Presiden
14. Beribadah dan menganut suatu agama atau kepercayaan adalah merupakan asasi...
- A. Pribadi
 - B. Perlakuan dan perlindungan
 - C. Politik
 - D. Sosial budaya
 - E. Hukum
15. Tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan...
- A. TAP MPR
 - B. Keputusan presiden
 - C. Pancasila dan UUD 1945
 - D. Wilayah Indonesia
 - E. Undang-undang
16. Sebelum secara resmi disahkan pada tahun 1945 sebagai dasar filsafat negara, unsur-unsur Pancasila telah dimiliki dan telah melekat pada bangsa Indonesia sebagai asas dalam adat-istiadat, kebudayaan dan religius yang terangkum pada ...
- A. Ma Lima
 - B. Sutasoma
 - C. Tripakara
 - D. Gotong royong
 - E. Perundang-undangan
17. Hubungan sosial yang selaras, serasi, seimbang antara individu dan masyarakat dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, yaitu :
- A. Sila kedua

- B. Sila ketiga
 - C. Sila keempat
 - D. Sila kelima
 - E. Sila pertama
18. Pancasila sebagai dasar negara digali dari nilai-nilai budaya dan agama bangsa Indonesia, dengan demikian Pancasila memenuhi syarat empat kausalitas, sebagai mana tercantum di bawah ini, kecuali causa...
- A. Prima
 - B. Materialis
 - C. Formalis
 - D. Efisien
 - E. Finalis
19. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, oleh karena itu dikembangkan sikap hormat-menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Hal ini adalah penjabaran...
- A. Sila pertama
 - B. Sila kedua
 - C. Sila ketiga
 - D. Sila keempat
 - E. Sila kelima
20. Pembahasan dasar Negara dikaji pada dua badan, yaitu BPUPKI dan PPKI. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dibentuk pada ...
- A. 9 Agustus 1945
 - B. 1 Juni 1945
 - C. 17 Agustus 1845
 - D. 18 Agustus 1945
 - E. 1 Agustus 1945

LATIHAN SOAL TWK: UUD 1945

Jumlah Soal : 20 butir
Waktu : 15 menit

***Petunjuk:** Untuk soal nomor 1 sampai dengan nomor 20, pilihlah salah satu jawaban yang saudara anggap paling tepat diantara 5 pilihan jawaban yang tersedia!*

1. Kapan amandemen pertama dilakukan?
 - A. 19 Oktober 1999
 - B. 19 Oktober 2000
 - C. 19 Oktober 2001
 - D. 19 Oktober 1998
 - E. 19 Oktober 2002

2. Berapa kali UUD 1945 di-amandemen?
 - A. 1 kali
 - B. 2 kali
 - C. 3 kali
 - D. 4 kali
 - E. 5 kali

3. Kapan amandemen ketiga dilakukan?
 - A. 9 November 2001
 - B. 9 November 2002
 - C. 9 November 2003
 - D. 9 November 2004
 - E. 10 November 2002

4. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Hal ini tercantum dalam UUD 1945 pasal ...
 - A. 31 ayat 1
 - B. 31 ayat 2
 - C. 31 ayat 3
 - D. 31 ayat 4
 - E. 32 ayat 3

5. Yang dimaksud dengan alat bukti dalam UU no. 24 tahun 2003 adalah...
 - A. Surat atau tulisan
 - B. Keterangan saksi
 - C. Keterangan ahli
 - D. Semua jawaban benar
 - E. Semua jawaban salah

6. Di bawah ini merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi, kecuali...
 - A. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - B. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - C. Memutus pembubaran partai politik.
 - D. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum
 - E. Memutus sengketa peradilan pidana dan perdata

7. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Hal ini tercantum dalam UUD 1945 pasal ...
 - A. 31 ayat 1
 - B. 31 ayat 2
 - C. 31 ayat 3
 - D. 31 ayat 4
 - E. 22 ayat 1

8. Menurut Pasal 1 UUD 1945 amandemen, MPR tidak lagi melakukan sepenuhnya kedaulatan rakyat, karena...
 - A. Kedaulatan berada di tangan rakyat.
 - B. Kedaulatan sepenuhnya dilakukan melalui pilpres langsung.
 - C. Kedaulatan berada ditangan legislatif dan presiden/wapres yang dilakukan melalui mekanisme pemilihan langsung
 - D. Kedaulatan berada di tangan Mahkamah Konstitusi
 - E. Kedaulatan dilaksanakan oleh Presiden sebagai mandataris MPR

9. Pasal berapa saja UUD 1945 ketiga kali diamandemen?
 - A. Pasal 1, 3, 6, 11, 17, 23, dan 24.
 - B. Pasal 1, 3, 6, 11, 17, 23, dan 25.
 - C. Pasal 1, 3, 6, 11, 17, 23, dan 26.
 - D. Pasal 1, 3, 6, 11, 17, 23, dan 27.
 - E. Pasal 1, 3, 6, 11, 17, 24, dan 25.

10. Siapa yang berwenang memberi grasi dan rehabilitasi?
 - A. Presiden
 - B. DPR
 - C. MPR
 - D. Semua jawaban benar
 - E. Semua jawaban salah

11. Macam dan harga mata uang ditetapkan dalam UUD 1945 pasal...
 - A. 23A
 - B. 23B
 - C. 23C
 - D. 23D
 - E. 22A

12. Pasal berapa saja UUD 1945 pertama kali diamandemen?
 - A. Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20 dan 21.
 - B. Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20 dan 22.
 - C. Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20 dan 23.
 - D. Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20 dan 24.
 - E. Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 21 dan 24.

13. Apa yang dimaksud dengan referendum?
 - A. Referendum adalah kegiatan untuk meminta pendapat rakyat secara langsung yang menyatakan setuju atau tidak setuju terhadap kehendak MPR untuk mengubah UUD 1945.
 - B. Referendum adalah kegiatan untuk meminta pendapat rakyat secara langsung yang menyatakan setuju atau tidak setuju untuk menyatakan perang.
 - C. Referendum adalah kegiatan untuk meminta pendapat rakyat secara langsung yang menyatakan setuju atau tidak setuju untuk meminjam bantuan ekonomi.
 - D. Referendum adalah kegiatan untuk meminta pendapat rakyat secara tidak langsung yang menyatakan setuju atau tidak setuju untuk menyatakan perang.
 - E. Semua jawaban salah.

14. Kapan amandemen kedua dilakukan?
 - A. 18 Agustus 2000
 - B. 18 Agustus 2001
 - C. 18 Agustus 2002
 - D. 18 Agustus 2003
 - E. 17 Agustus 2001

15. Apa dasar hukum pembentukan Mahkamah Konstitusi?
 - A. UU Nomor 21 tahun 2003
 - B. UU Nomor 22 tahun 2003
 - C. UU Nomor 23 tahun 2003
 - D. UU Nomor 24 tahun 2003
 - E. UU Nomor 25 tahun 2003

16. Pasal berapa saja UUD 1945 kedua kali diamandemen?
 - A. Pasal 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30, dan 35.
 - B. Pasal 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30, dan 36.
 - C. Pasal 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30, dan 37.
 - D. Pasal 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30, dan 38.
 - E. Pasal 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 35, dan 36.

17. Pada waktu Indonesia berbentuk RIS, UUD 1945 ...
 - A. Tidak berlaku sama sekali di Indonesia.
 - B. Hanya berlaku beberapa pasal.
 - C. Masih berlaku di wilayah Jakarta.

- D. Masih berlaku di seluruh Indonesia.
 - E. Masih berlaku di wilayah RI yang merupakan bagian RIS.
18. Bunyi pasal 32 ayat 1 mengenai kebudayaan nasional Indonesia adalah...
- A. Setiap warga Negara berhak mendapatkan pengetahuan kebudayaan Indonesia
 - B. Negara Indonesia dilandasi oleh beragann budaya
 - C. Negara nennajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan nnenjannin kebebasan nnasyarakat dalann nnelihara dan nnengennbangkan nilai-nilai budayanya
 - D. Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional
 - E. Negara memperbolehkan masyarakat Indonesia menyerap dan mengembangkan kebudayaan asing
19. Dewan Perwakilan Rakyat nneniliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Hal ini diatur dalam pasal...
- A. 20A
 - B. 20B
 - C. 20C
 - D. 20D
 - E. 20E
20. Berkenaan dengan perubahan isi dari UUD 1945, sebenarnya telah diatur oleh TAP MPR No. IV/MPR/1983 tentang...
- A. Interpelasi
 - B. Budget
 - C. Mosi tidak percaya
 - D. Menyatakan pendapat
 - E. Referendum

LATIHAN SOAL
TWK: BHINNEKA TUNGGAL IKA

Jumlah Soal : 20 butir
Waktu : 15 menit

***Petunjuk:** Untuk soal nomor 1 sampai dengan nomor 20, pilihlah salah satu jawaban yang saudara anggap paling tepat diantara 5 pilihan jawaban yang tersedia!*

1. Seorang pemimpin seharusnya memberikan pekerjaan kepada bawahannya dengan bijaksana yaitu...
 - A. Selalu memberikan contoh pada setiap pekerjaan.
 - B. Melakukan pengecekan langsung terhadap semua hasil bawahan.
 - C. Memberikan pekerjaan sesuai dengan kodrat kemanusiannya.
 - D. Memilih dengan teliti pekerjaan yang pantas akan diberikan.
 - E. Menasehati setiap agar melakukan pekerjaan dengan baik.

2. Konsepsi Pancasila tentang hubungan antara manusia dan masyarakatnya adalah terciptanya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan yang berarti...
 - A. Meletakkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan.
 - B. Mengutamakan kepentingan umum dan mendahulukan kepentingan pribadi dan golongan.
 - C. Melepaskan diri demi kepentingan umum dan meletakkan kepentingan pribadi sebagai yang pertama.
 - D. Memperlakukan dengan sama antara kepentingan umum dan kepentingan pribadi.
 - E. Melepaskan kepentingan umum dan mengutamakan kepentingan pribadi dan golongan.

3. Cinta kepada tanah air dan bangsa dapat dibuktikan dengan cara...
 - A. Mengekspor semua hasil bumi Indonesia dan mengimpor barang luar negeri.
 - B. Tidak melakukan hubungan dengan negara lain dan melakukan proteksi.
 - C. Menggunakan produksi dalam negeri meskipun mampu membelinya.
 - D. Tidak menggunakan produksi luar negeri meskipun mampu membelinya.
 - E. Mengurangi impor barang dari luar negeri agar devisa tetap stabil.

4. Pada saat menjelang perayaan HUT Republik Indonesia sering diadakan pawai dan perlombaan untuk memeriahkannya. Bentuk keikutsertaan anda untuk memeriahkannya adalah dengan ...
 - A. Memasang bendera
 - B. Menyanvikan lagu Indonesia Raya

- C. Menikmati hari libur tanggal 17 Agustus
 - D. Menyumbang untuk kegiatan
 - E. Menonton perlombaan
5. Sikap manusia yang bertakwa dapat dibuktikan dengan cara...
 - A. Selalu melindungi kesalahan orang lain
 - B. Bekerja siang dan malam agar berbahagia
 - C. Hanya beribadah tanpa berusaha lebih baik
 - D. Bersyukur dan selalu berusaha lebih baik
 - E. Kurang bersyukur terhadap hasil yang dicapai
 6. Prinsip-prinsip dasar demokrasi telah tercermin dalam kehidupan masyarakat desa, terutama pada saat mengatasi pekerjaan yang membutuhkan tenaga bersama, yaitu dengan cara seperti di bawah ini, kecuali...
 - A. Partisipasi
 - B. Berdoa
 - C. Sumbangan
 - D. Gotong royong
 - E. Kerja bakti
 7. Putusan yang diambil dalam musyawarah mufakat serta diliputi dengan semangat kekeluargaan adalah dengan...
 - A. Mengutamakan putusan golongan yang berkuasa
 - B. Melaksanakan hasil putusan bersama
 - C. Mempertahankan pendapat golongan yang sefaham
 - D. Meninggalkan ruang rapat karena berbeda pendapat
 - E. Menghormati pendapat yang disampaikan
 8. Pasal 29 UUD 1945 ayat (2) menyatakan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Oleh karena itu, kebebasan beragama diartikan sebagai...
 - A. Kebebasan untuk menentukan dan memilih agama yang dianut serta berpindah-pindah
 - B. Kebebasan dalam menjalankan ibadah kapan saja dan dimana saja.
 - C. Kebebasan melakukan penyembahan dan membentuk aliran baru keagamaan
 - D. Kebebasan yang bersumber pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan
 - E. Kebebasan memeluk atau tidak memeluk salah satu agama resmi
 9. Proses penebangan hutan yang tidak mengindahkan keseimbangan antara alam dan manusianya akan berakibat...
 - A. Pengusaha semakin kaya dan korup
 - B. Meluaskan ozon di seluruh dunia
 - C. Kemiskinan bagi penduduk sekitar hutan
 - D. Reboisasi dan rehabilitasi hutan

- E. Bencana alam yang tak terkendali
10. Menurut pasal 1 ayat (1) UUD 1945; Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk...
- A. Republik
 - B. Presidensial
 - C. Parleментар
 - D. Demokrasi
 - E. Monarki
11. Melaksanakan sila kedua dari Pancasila, harus dilaksanakan sikap dan tingkah laku yang menggambarkan...
- A. Menghormati dan menghargai orang lain
 - B. Menilai baik hasil kerja orang lain
 - C. Suka memberi pertolongan kepada yang lain
 - D. Meminta dengan hormat melaksanakan keinginannya
 - E. Berani membela kebenaran dan keadilan
12. Demokrasi adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat, dilakukan oleh rakyat, dan untuk kepentingan rakyat sehingga kepentingan ada di tangan rakyat. Kedaulatan rakyat sepenuhnya dilakukan oleh...
- A. DPR dan MPR
 - B. DPA dan BPK
 - C. Presiden
 - D. DPR
 - E. MPR
13. Tujuan wawasan nusantara adalah menghendaki adanya persatuan dan kesatuan dalam segenap aspek kehidupan, baik sosial maupun alamiah. Yang termasuk aspek alamiah adalah keadaan...
- A. Ekonomi nasional
 - B. Flora dan fauna
 - C. Politik demokrasi
 - D. Sosial budaya
 - E. Penduduk keterampilan
14. Sisi negatif yang harus dihindari dalam menyongsong kemajuan teknologi dewasa ini adalah...
- A. Pro aktif
 - B. Eksklusivisme
 - C. Kuriositas
 - D. Adaptif
 - E. Profesionalisme
15. Perilaku demokratis diharapkan tercipta dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara seperti dewasa ini. Pengertian sikap demokratis secara sederhana adalah...
- A. Menerima dan mengajukan pendapat dengan cara manusiawi

- B. Mendengar dan menerima pendapat orang berdasarkan latar belakangnya
 - C. Menerima pendapat orang lain dengan tanpa pertimbangan
 - D. Mendesak orang lain agar menerima pendapat dan keinginannya
 - E. Memutuskan hasil rapat berdasarkan kepentingan pimpinan
16. Seorang pemimpin harus berani mendorong orang-orang yang menjadi asuhannya, agar berani mengambil inisiatif dan sanggup bertanggungjawabkannya. Pola kepemimpinan ini adalah...
- A. Ing Ngarsa Sung Tulada
 - B. Ing Madya Mangun Karsa
 - C. Tut Wuri Handayani
 - D. Idealis dan karismatik
 - E. Demokratis dan populis
17. Sikap kritis dan inovatif sangat dominant pada era perkembangan zaman seperti dewasa ini, tetapi cara penyampaiannya harus tetap pada karakteristik dan budaya bangsa yang bersumber pada norma...
- A. Hukum
 - B. Kesopanan
 - C. Susila
 - D. Filsafat
 - E. Adat istiadat
18. Mekanisme kepemimpinan nasional berlangsung secara periodik 5 tahun sekali. Sirkulasi ini didasarkan pada UUD 1945 ...
- A. Bab III pasal 4 ayat (1)
 - B. Bab IV pasal 16 ayat (2)
 - C. Bab I pasal I ayat (2)
 - D. Bab IV pasal 18
 - E. Bab II pasal 2 ayat (2)
19. Pada dasarnya UUD 1945 dapat diubah oleh MPR sesuai dengan pasal 37, dengan persyaratan...
- A. Dihadiri oleh $\frac{1}{2}$ jumlah anggota MPR dan semua anggota setuju.
 - B. Disetujui oleh $\frac{1}{2}$ jumlah anggota MPR dan dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ jumlah anggota MPR.
 - C. Dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ jumlah anggota MPR dan disetujui oleh $\frac{1}{2}$ yang hadir.
 - D. Dihadiri dan disetujui oleh $\frac{1}{2}$ jumlah anggota MPR lebih satu ($\frac{1}{2} + 1$) jumlah anggota MPR.
 - E. Dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ jumlah anggota MPR dan disetujui oleh $\frac{2}{3}$ jumlah anggota MPR yang hadir.
20. Untuk mengambil keputusan dalam suatu rapat, banyak cara yang digunakan. Cara yang cocok untuk bangsa Indonesia adalah...
- A. Suara terbanyak
 - B. Musyawarah dan mufakat

- C. Bergantung pada pemimpin
- D. Aklannasi pada kuorum
- E. Perwakilan dan utusan

LATIHAN SOAL
TWK: SEJARAH INDONESIA

Jumlah Soal : 20 butir
Waktu : 15 menit

***Petunjuk:** Untuk soal nomor 1 sampai dengan nomor 20, pilihlah salah satu jawaban yang saudara anggap paling tepat diantara 5 pilihan jawaban yang tersedia!*

1. Sejak kemerdekaan, Pemilihan Umum untuk pertama kali diselenggarakan pada tahun 1955, yaitu untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di ..
 - A. MPR dan DPR
 - B. Konstituante
 - C. Konstituante dan DPR
 - D. DPR
 - E. MPR

2. Tuntutan rakyat Indonesia melalui Trikora antara lain ...
 - A. Perkuat ketahanan revolusi Indonesia
 - B. Bubarkan PKI dan antek-anteknya
 - C. Bantu perjuangan rakyat Sabah dan Serawak
 - D. Bubarkan kabinet seratus menteri
 - E. Kibarkan sang Merah Putih di Irian Barat

3. Setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, untuk pertama kalinya Presiden dan Wakil Presiden diangkat oleh...
 - A. Majelis Permusyawaratan Rakyat
 - B. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
 - C. Komite Nasional Indonesia Pusat
 - D. Dewan Perwakilan Rakyat
 - E. Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia

4. Setelah Indonesia kembali menjadi anggota PBB pada tahun 1966, Ruslan Abdul ditunjuk sebagai...
 - A. Duta besar Indonesia di PBB
 - B. Konsultan perwakilan Indonesia di PBB
 - C. Utusan tetap Indonesia di PBB
 - D. Ketua anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB
 - E. Kepala perwakilan tetap di PBB

5. Salah satu basil yang paling menonjol dari Orde Baru yang telah mendapatkan pengakuan internasional adalah...
 - A. Pelaksanaan transmigrasi
 - B. Pembangunan industri
 - C. Swasembada pangan
 - D. Penyelenggaraan KB

- E. Pemberantasan buts huruf
6. Kabinet Juanda yang secara resmi dibentuk pada tanggal 9 April 1957 merupakan Zaken kabinet, yaitu...
- A. Kabinet yang beranggotakan partapartai politik terkuat
 - B. Kabinet yang beranggotakan tokoh politik dan militer
 - C. Kabinet yang beranggotakan tenagatenaga ahli dalam bidangnya
 - D. Kabinet tanpa menteri-menteri negara
 - E. Kabinet yang mengikutsertakan golongan oposisi
7. Konsideran yang diambil dalam memutuskan Dekrit Presiden 1959 adalah...
- A. Kembali ke UUD 1945
 - B. Dukungan rakyat Indonesia atas keadaan yang membahayakan persatuan
 - C. Dukungan partai politik terhadap kepemimpinan Soekarno
 - D. Dorongan pemerintah RRC
 - E. Soekarno terpengaruh oleh golongan komunis
8. Untuk menumpas pemberontakan DI/TII di Jawa Tengah digunakan operasi militer...
- A. Pagar Betis
 - B. Kerukunan
 - C. Corps Tjadangan Nasional (CTN)
 - D. Operasi Merdeka Timur
 - E. Komando Mandala
9. Usulan penyelesaian Irian Barat yang berisi penyerahan Irian Barat kepada Indonesia melalui PBB dalam waktu 2 tahun dilakukan oleh...
- A. U Thant
 - B. Ronald Reagen
 - C. Ellsworth Bunker
 - D. Bhoutros Ghali
 - E. JF Kennedy
10. Sistem ekonomi Gerakan Benteng merupakan gagasan Sumitro pada masa Kabinet Natsir yang menganjurkan pembangunan ekonomi baru dengan cara...
- A. Mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional
 - B. Mengubah ekonomi komunis menjadi ekonomi liberal
 - C. Menata ekonomi Indonesia ke arah yang baru
 - D. Mengubah ekonoomi liberal menjadi ekonomi campuran
 - E. Menumbuhkan perkembangan ekonomi swasta
11. Langkah-langkah yang dilakukan Deandels untuk mempertahankan Jawa dan serangan Inggris, adalah dengan berbagai upaya, kecuali...
- A. Memperbanyak jumlah tentara yang diambil dari penduduk pribumi.

- B. Mendirikan benteng-benteng pertahanan.
 - C. Membangun pabrik senjata di Semarang dan Surabaya.
 - D. Membangun jalan raya Anyer — Panarukan.
 - E. Mewajibkan penduduk pribumi memasok beras ke benteng-benteng pertahanannya.
12. Berbeda dengan organisasi pergerakan sebelumnya Muhammadiyah bergerak di bidang sosial-keagamaan karena...
- A. Perkumpulan politik kurang cepat memperbaiki kehidupan sosial masyarakat
 - B. Pimpinan pusat berkedudukan di Yogyakarta
 - C. Modernisasi Islam memberi jawaban terhadap Kepincangan sosial
 - D. Perbaikan sosial merupakan dasar perjuangan politik
 - E. Ingin memberantas kemiskinan
13. Pada masa pendudukan di Indonesia, Jepang berkepentingan untuk merangkul golongan nasionalis sekuler dan intelektual Indonesia dalam membantu usahanya menghadapi perang melawan sekutu. Untuk itu Jepang membentuk suatu organisasi yang bernama...
- A. PUTERA
 - B. Seinendan
 - C. Keibondan
 - D. PETA
 - E. Heiho
14. Propaganda Pemerintah Jepang di Indonesia dikenal dengan gerakan tiga A, yaitu Nippon pelindung, cahaya dan pemimpin Asia. Pada tahun 1943, gerakan ini berubah menjadi PUTERA dan beranggotakan tokoh-tokoh pergerakan nasional di bawah ini, kecuali...
- A. Soekarno
 - B. Muhammad Hatta
 - C. Muhammad Yamin
 - D. Ki Hajar Dewantara
 - E. Ki Haji Mas Mansyur
15. Tujuan utama Jepang mengobarkan perang Pasifik adalah...
- A. Membantu Jerman untuk memenangkan perang di kawasan Eropa
 - B. Ingin menggantikan kedudukan bangsa Barat di Asia
 - C. Membantu negara-negara Asia agar lepas dari penjajahan
 - D. Balas dendam terhadap Amerika Serikat
 - E. Menunjukkan kepada dunia bahwa Jepang negara besar
16. Pemerintah Belanda sangat gigih untuk menaklukkan Aceh, karena berkaitan dengan...
- A. Pemaksaan terhadap rakyat Aceh untuk menerima kehadiran Snouck Hurgronje.
 - B. Tujuan Belanda dalam pembulatan negeri jajahan.
 - C. Keinginan untuk menjalin hubungan yang erat dengan para ulama.

- D. Tujuan Belanda untuk membumi hanguskan kerajaan Aceh.
 - E. Keinginan untuk menguasai sumber daya alam di wilayah Aceh.
17. Kaum wanita Indonesia tidak ketinggalan ikut berjuang untuk kemerdekaan tanah air Indonesia dari penjajah Belanda. Di samping Kartini di Jawa Tengah, Dewi Sartika di Jawa Barat, Cut Nya Dhien di Aceh, maka yang mewakili pejuang Sumatera Barat adalah...
- A. Cut Meutiah
 - B. Siti Walidah Ahmad Dahlan
 - C. Maria Martina Tiahahu
 - D. Rasuna Said
 - E. Rahmah El Yunusiah
18. Pada jaman revolusi, pers nasional mempunyai andil yang besar bagi peduangan menegakkan kemerdekaan, dengan cara...
- A. Memberikan informasi tentang kelemahan musuh
 - B. Menyebarkan tentang kebohongan musuh
 - C. Mengumumkan orang-orang yang menjadi antek Belanda
 - D. Meyakinkan negara-negara lain tentang tujuan perjuangan
 - E. Mengadakan per uangan masyarakat ke arah sasaran yang dituju
19. Yang mendesak untuk dilaksanakannya politik etika di Indonesia adalah...
- A. Van Mook
 - B. Daendels
 - C. Van Deventer
 - D. Raffles
 - E. Van den Bosch
20. Cita-cita Indische Partij (SP) adalah menumbuhkan semangat nasionalisme Indonesia. Beberapa butir dalam programnya adalah...
- A. Memperbesar pengaruh pro-Hindia dalam pemerintahan
 - B. Meresapkan cita-cita kesatuan nasional Hindia
 - C. Memberantas kebencian antar suku
 - D. Berusaha untuk memperoleh persamaan hak bagi semua mua orang Hindia
 - E. Pendidikan harus ditujukan untuk kepentingan ekonomi Hindia

LATIHAN SOAL
TWK: TATA NEGARA

Jumlah Soal : 20 butir
Waktu : 15 menit

***Petunjuk:** Untuk soal nomor 1 sampai dengan nomor 20, pilihlah salah satu jawaban yang saudara anggap paling tepat diantara 5 pilihan jawaban yang tersedia!*

1. Pertimbangan dikeluarkannya POLRI dari institusi ABRI adalah...
 - A. Memperbaiki dan meningkatkan citra POLRI dalam masyarakat
 - B. Dapat menegakkan hukum lebih konsekuen dalam masyarakat
 - C. Meningkatkan profesionalisme POLRI dalam menjalankan tugas
 - D. Memperoleh keleluasaan dalam menjalankan tugas-tugasnya
 - E. Dapat bekerja sama dengan ABRI melindungi masyarakat

2. Paradigma Baru tentang peran politik TNI pada hakikatnya menunjukkan...
 - A. Peningkatan peran sosial politik TNI
 - B. Pemantapan peran sosial politik TNI
 - C. Pengurangan peran sosial politik TNI
 - D. Pembalasan peran sosial politik TNI
 - E. Penambahan peran sosial politik TNI

3. Ketentuan yang merupakan perwujudan sumber hukum urutan tertinggi adalah...
 - A. Mahkamah Agung
 - B. UUD 1945
 - C. Pancasila
 - D. TAP MPR
 - E. Keputusan Presiden

4. Yang dimaksud pemerintah pusat adalah...
 - A. Presiden dan Wakil Presiden, DPR, MPR dan MA
 - B. Presiden dan Wakil Presiden
 - C. Presiden dan Wakil Presiden, DPR, TNI
 - D. Presiden dan Wakil Presiden, MA, POLRI
 - E. Presiden dan Wakil Presiden, Menteri

5. Dalam kehidupan bernegara, Pancasila berperan sebagai...
 - A. Dasar Negara
 - B. Dasar Keimanan
 - C. Dasar Kenegaraan
 - D. Dasar Beragama
 - E. Dasar Ketatanegaraan

6. Menurut undang-undang nomor 22 tahun 1999 diantara kewenangan

- pemerintah pusat yang tidak diotonomikan adalah...
- A. Pendidikan
 - B. Agama
 - C. Sosial
 - D. Pertahanan
 - E. Kesehatan
7. Susunan pemerintah daerah otonom menurut Undang-undang nomor 22 tahun 1999 terdiri dari...
- A. Kepala Daerah dan Wakilnya.
 - B. Kepala Daerah dan DPRD.
 - C. Kepala Daerah, DPRD dan Badan Eksekutif Daerah.
 - D. Kepala Daerah dan dinas-dinas.
 - E. Kepala Daerah dan Tripida/Muspida.
8. Propenas adalah singkatan dari...
- A. Perencanaan Pembangunan Nasional
 - B. Proyek Pembangunan Nasional
 - C. Program Pembangunan Nasional
 - D. Prosedur Pembangunan Nasional
 - E. Program Pengembangan Nasional
9. Kekuasaan Kehakiman menurut UUD 1945 Amandemen, tercantum dalam...
- A. Pasal 14
 - B. Pasal 25
 - C. Pasal 24
 - D. Pasal 27
 - E. Pasal 7
10. Menurut UUD 1945 Amandemen, Indonesia menganut sistem pemerintahan...
- A. Sentralisasi
 - B. Desentralisasi
 - C. Presidensial
 - D. Parleментар
 - E. Monarki
11. Menurut UUD 1945 Amandemen, salah satu tugas MPR, kecuali...
- A. Meminta Pertanggung-jawaban Presiden sebagai mandataris.
 - B. Mengubah UUD 1945.
 - C. Memberhentikan Presiden.
 - D. Menetapkan GBHN.
 - E. Melantik Presiden dan Wakil Presiden.
12. Yang dimaksud undang-undang dasar menurut UUD 1945 adalah...
- A. Hukum dasar tertulis
 - B. Hukum adat

- C. Hukum tidak tertulis
 - D. Konvensi
 - E. Hukum Negara
13. Menurut UUD 1945 pasal 10, kekuasaan Presiden selaku kepala negara adalah...
- A. Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas AD, AL, AU.
 - B. Menyatakan negara dalam keadaan bahaya.
 - C. Memberikan grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi.
 - D. Memberikan tanda jasa dan hak-hak lain tanda kehormatan.
 - E. Memilih menteri dan melantiknya.
14. Dalam rangka pembangunan nasional yang langsung bertugas sebagai pemikir, perencanaan dan sekaligus pelaksanaan pembangunan adalah...
- A. Presider
 - B. TNI
 - C. Ahli-ahli ekonomi
 - D. Masyarakat umum
 - E. Pegawai Negeri
15. Perekonormen Nasional diselenggarakan berdasar atas ekonomi dengan prinsip sebagai berikut, kecuali...
- A. Efisiensi
 - B. Kebangsaan
 - C. Berwawasan lingkungan
 - D. Kemandirian
 - E. Kebersamaan
16. Dinas propinsi merupakan unsur pemerintahan propinsi dipimpin oleh kepala yang berada dibawah gubernur, melalui...
- A. Wakil Gubernur
 - B. Sekretarts Daerah
 - C. Unit Pelaksana Teknis
 - D. Kepala Dinas
 - E. Menteri
17. Kekuasaan kehakiman menurut UUD 1945 Amandemen adalah...
- A. Presiden
 - B. Mahkamah Konstitusi
 - C. Mahkamah Agung
 - D. Depkumham
 - E. MPR
18. Peraturan Pemerintah tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dalam pelaksanaan dekonsentrasi dalam ...
- A. PP Nomor 151
 - B. PP Nomor 150

- C. PP Nomor 105
 - D. PP Nomor 106
 - E. PP Nomor 107
9. Peraturan pemerintah tentang pedoman organisasi perangkat daerah (PP Nomor 84 tahun 2000) disahkan pada ...
- A. 25 Juli 2000
 - B. 25 Agustus 2000
 - C. 25 September 2000
 - D. 25 Oktober 2000
 - E. 25 November 2000
20. UUD 1945 telah mengalami amandemen yang ke ...
- A. Satu
 - B. Dua
 - C. Tiga
 - D. Empat
 - E. Lima

LATIHAN SOAL
TWK: PERAN NEGARA

Jumlah Soal : 20 butir
Waktu : 15 menit

***Petunjuk:** Untuk soal nomor 1 sampai dengan nomor 20, pilihlah salah satu jawaban yang saudara anggap paling tepat diantara 5 pilihan jawaban yang tersedia!*

1. Sistem kebijakan meliputi 3 unsur yang saling berkaitan yaitu sebagai berikut, kecuali...
 - A. Pelaku publik
 - B. Kebijakan publik
 - C. Lingkungan publik
 - D. Dana kebijakan
 - E. Tidak ada yang benar

2. Apabila diperhatikan dengan seksama, kunci utama bagi keberhasilan berbagai upaya dan kebijakan pemerintah dalam mengatasi masalah ekonomi yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini adalah...
 - A. Pembinaan kesadaran warga negara
 - B. Pengembangan proyek-proyek yang strategis
 - C. Pungutan pajak yang proporsional
 - D. Penegakan hukum secara konsisten
 - E. Peningkatan kesejahteraan rakyat

3. Berikut ini adalah unsur-unsur utama dari program stabilisasi dan reformasi ekonomi nasional yang mendesak dan perlu dilakukan oleh pemerintah yang Baru adalah kecuali...
 - A. Pembangunan lembaga keuangan
 - B. Penyelesaian utang dunia usaha
 - C. Mewujudkan efisiensi ekonomi
 - D. Meningkatkan keterbukaan
 - E. Menegakkan hukum dengan adil

4. Undang-undang terbaru tentang ketenagalistrikan adalah...
 - A. UU No.21 tahun 2009
 - B. UU No.22 tahun 2008
 - C. UU No.21 tahun 2009
 - D. UU No.30 tahun 2009
 - E. UU No.21 tahun 2010

5. Pembentukan Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggaraan Negara (KPKPN) berdasarkan...
 - A. Keppres No.27 tahun 1999
 - B. UU nomor 2 tahun 1999
 - C. TAP MPR No.II/MPR/1978

- D. TAP MPR NO.IV/MPR/1978
 - E. TAP MPR NO.V/MPR/1978
6. Kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom diatur dalam...
- A. TAP NOV/MPR/2000
 - B. PP No.25 tahun 2000
 - C. Keppres No.30 tahun 2003
 - D. Keppres No. 102 tahun 2001
 - E. PP No.30 tahun 2003
7. Kekuasaan kepala negara dalam sistem pemerintahan negara adalah...
- A. Otoriter
 - B. Tidak terbatas
 - C. Tidak tak terbatas
 - D. Absolut
 - E. Mutlak
8. Asas pemerintahan yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara disebut...
- A. Asas keterbukaan
 - B. Asas proporsionalitas
 - C. Asas profesionalitas
 - D. Asas akuntabilitas
 - E. Asas hukum
9. Dasar-dasar pemerintahan yang baik adalah mencakup hal-hal diantaranya sebagai berikut, kecuali...
- A. Partisipasi
 - B. Aturan hukum
 - C. Transparansi
 - D. Individualis
 - E. Keadilan
10. Kebijakan pemerintah paling tidak dalam bentuknya yang positif pada umumnya dibuat berdasarkan...
- A. Adat istiadat
 - B. Hukum dan kewenangan tertentu
 - C. Agama dan kepercayaan
 - D. Musyawarah untuk mufakat
 - E. Keinginan masyarakat
11. Semua pilihan atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam arti pilihan-pilihan apapun baik untuk dilakukan ataupun untuk tidak dilakukan biasa disebut dengan...
- A. Keadilan pemerintah
 - B. Kebijakan pemerintah
 - C. Peraturan pemerintah
 - D. Strategi pemerintah

- E. Keputusan pemerintah
12. Kebijakan pemerintah sehubungan dengan upaya privatisasi BUMN pada saat ini, apabila dikaji secara mendalam dapat dipahami bahwa tujuan utamanya adalah ...
- A. Mewujudkan efisiensi birokrasi
 - B. Mencapai peningkatan produksi
 - C. Mengatasi kelemahan manajemen
 - D. Mengoptimalkan penggunaan tenaga
 - E. Meningkatkan sumber daya manusia
13. Undang-undang terbaru tentang minyak dan gas bumi adalah...
- A. UU No.21 tahun 2001
 - B. UU No.22 tahun 2002
 - C. UU No.21 tahun 2002
 - D. UU No.21 tahun 2001
 - E. UU No.22 tahun 2001
14. Waktu beban puncak sistem kelistrikan JAMALI terjadi pada jam ...
- A. Antara 18:00 WIB sampai 22:00 WIB
 - B. Antara 19:00 WIB sampai 22:00 WIB
 - C. Antara 17:00 WIB sampai 21:00 WIB
 - D. Antara 18:00 WIB sampai 21:00 WIB
 - E. Antara 17:00 WIB sampai 22:00 WIB
15. Visi kebijakan energi nasional adalah...
- A. Terjaminnya penyediaan energi untuk kepentingan nasional
 - B. Menurunnya intensitas penggunaan energi
 - C. Menerapkan struktur pasar yang kompetitif
 - D. Menciptakan open access pada sistem penyaluran energi, khususnya untuk BBM, gas dan listrik
 - E. Meningkatkan konsumsi listrik oleh publik
16. Pelaksanaan Demand Side Management (DSM) melalui peningkatan efisiensi pemanfaatan listrik, penerapan standard dan pengendalian pemakaian energi, pada dasarnya bertujuan untuk...
- A. Peningkatan efisiensi energi
 - B. Peningkatan penguasaan teknologi energi
 - C. Peningkatan usaha penunjang energi nasional
 - D. Peningkatan kualitas jasa penunjang energi nasional
 - E. Peningkatan penggunaan energi
17. Langkah kebijakan energi yang dilakukan dengan meningkatkan efisiensi pemakaian energi dengan mengembangkan dan memanfaatkan teknologi hemat energi baik di sisi hulu maupun di sisi hilir
- A. Intensifikasi
 - B. Diversifikasi
 - C. Konversi

- D. Regulasi
 - E. Kooperasi
18. Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika tahun 2005 diadakan di ...
- A. Kuala Lumpur
 - B. Bangkok
 - C. Bandung
 - D. Mesir
 - E. Singapura
19. Teori atau model kebijakan pemerintah yang memandang kebijakan sebagai variasi terhadap kebijakan pemerintah masa lampau disebut...
- A. Teori institusionalisme
 - B. Teori kelompok
 - C. Teori inkrementalisme
 - D. Teori rasionalisme
 - E. Teori chauvinisme
20. Indonesia keluar dari OPEC pada tahun...
- A. 2004
 - B. 2006
 - C. 2009
 - D. 2012
 - E. 2000

LATIHAN SOAL
TAW: BAHASA INDONESIA

Jumlah Soal : 20 butir
Waktu : 15 menit

***Petunjuk:** Untuk soal nomor 1 sampai dengan nomor 20, pilihlah salah satu jawaban yang saudara anggap paling tepat diantara 5 pilihan jawaban yang tersedia!*

1. Pernyataan berikut ini yang termasuk ragam bahasa dalam surat keputusan resmi adalah...
 - A. Direktur Bank Buana Cipta menetapkan nama-nama berikut ini sebagai panitia lelang untuk tahun 2007.
 - B. Berkenaan dengan hasil rapat ketua organisasi mahasiswa, kami sampaikan putusan hasil rapat sebagai berikut.
 - C. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan nomor 15/UP/J36.1.1/2007, setiap kegiatan mahasiswa harus diketahui oleh dosen kokurikuler.
 - D. Yang bertanda tangan di bawah ini kedua belah pihak dan sepakat menetapkan hal-hal sebagai berikut.
 - E. Ketua panitia lomba menerangkan bahwa nama-nama mahasiswa berikut ini telah melaksanakan tugas sebagai juri.

2. *Gadis cantik itu ... masa kecilnya di Kota Bukit Tinggi.*

Konstruksi yang tepat untuk mengisi bagian yang kosong adalah...

- A. Bercerita
- B. Bercerita perihal
- C. Menceritakan tentang Bercerita tentang
- D. Menceritakan mengenai

3. *Pelayanan kesehatan di berbagai tempat di tanah air belum berorientasi kepada pasien. Hal ini ditandai oleh maraknya pemberian obat antibiotik yang tidak sesuai dengan kondisi Pemakaian antibiotik yang melebihi kebutuhan bisa mengakibatkan resistansi dalam tubuh pasien. Kuman penyakit dalam tubuh menjadi kebal. Oleh karena itu,...*

Kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf di atas adalah...

- A. Pasien harus selalu mematuhi semua instruksi dari dokter
- B. Pasien harus pasrah pada layanan kesehatan yang diterima
- C. Perlu ditumbuhkan sikap kritis masyarakat terhadap layanan kesehatan
- D. Pasien harus diberi antibiotik di atas kebutuhan supaya daya tahan tubuh lebih tinggi
- E. Setiap penyakit harus diobati dengan antibiotik

4. Bentuk perulangan yang menyatakan makna resiprokal terdapat dalam kalimat...

- A. Kita perlu mewaspadaai gerak-gerik orang asing yang baru datang ke desa ini.
 - B. Hormat-menghormati sesama tetangga merupakan perilaku yang baik untuk menciptakan kedamaian dalam bermasyarakat
 - C. Sesama tetangga yang tinggal dalam satu kawasan diharapkan dapat saling membantu
 - D. Polisi mematai-matai kegiatan kelompok itu selama satu tahun
 - E. Ketika ditanya, orang itu memberikan jawaban yang berbelit-belit sehingga penduduk di sana menjadi marah
5. *Bangsa Indonesia dan bangsa Jepang sama-sama memiliki sistem feodalisme yang berorientasi vertikal. Namun, bangsa Jepang memiliki budaya malu yang tinggi. Mereka sangat malu jika melakukan kesalahan atau pelanggaran. Di Indonesia, penerapan kedisiplinan kita saat ini masih terdorong oleh rasa takut terhadap sanksi atau kerugian yang akan diterimanya apabila melanggar peraturan. Rasa malu cenderung timbul apabila kesalahannya diketahui orang lain dan menyebabkan harga dirinya berkurang. Orang Jepang dan orang Indonesia sama-sama memiliki daya tahan dalam menjalankan kehidupan yang sulit dan penuh rintangan. Bedanya orang Indonesia menerjemahkan tahan menderita itu sebagai kepasrahan pada nasib, hanya menjalani dan menerima hidup apa adanya, sedangkan orang Jepang melakukan usaha nyata untuk mengubah kondisi yang kurang menguntungkan itu nilai budaya yang mengutamakan kedamaian dan keselarasan menyebabkan masyarakat Indonesia, seperti halnya masyarakat Jepang, dikenal sebagai masyarakat yang ramah tamah. Namun, apabila dikaitkan dengan segi ekonomis, orang Jepang dikenal sangat hemat, cenderung sulit untuk mengeluarkan uangnya untuk hal-hal yang di luar rencana.*

Ringkasan perbandingan yang sesuai dengan isi teks di atas adalah...

- A. Bangsa Jepang dan bangsa Indonesia memiliki persamaan dalam hal sistem feodalisme, daya tahan tinggi terhadap penderitaan, dan sifat keramahannya. Bangsa Jepang dan bangsa Indonesia berbeda dalam hal budaya malu, cara menyikapi penderitaan, dan segi ekonominya.
- B. Bangsa Jepang dan bangsa Indonesia memiliki persamaan dalam hal sistem feodalisme, sama-sama Asia dan sifat keramahannya, bangsa Jepang dan bangsa Indonesia berbeda dalam hal budaya malu, cara menyikapi penderitaan, dan segi ekonominya.
- C. Bangsa Jepang dan bangsa Indonesia memiliki persamaan dalam hal sistem feodalisme, daya tahan tinggi terhadap penderitaan, dan sikap dalam menghadapi kesulitan. Bangsa Jepang dan bangsa Indonesia berbeda dalam hal budaya malu, cara menyikapi penderitaan, dan segi ekonominya.
- D. Bangsa Jepang dan bangsa Indonesia memiliki persamaan dalam hal sistem feodalisme, tetapi berbeda dari segi sistem ekonominya.

- E. Bangsa Jepang dan bangsa Indonesia memiliki persamaan dalam hal sistem kebudayaan, tetapi berbeda dari segi sistem ekonominya.
6. *Semua masalah penting telah dibahas dalam majelis itu. Beberapa masalah yang dikemukakan Pak Zakaria tidak dibahas dalam majelis itu.*

Simpulan dari kedua pernyataan itu adalah...

- A. Beberapa masalah yang penting dikemukakan oleh Pak Zakaria, tetapi tidak dibahas
- B. Semua masalah yang dikemukakan dalam majelis tidak dikemukakan oleh Pak Zakaria
- C. Beberapa masalah yang dikemukakan Pak Zakaria tidak penting
- D. Semua masalah yang dikemukakan Pak Zakaria tidak penting
- E. Majelis itu tidak membahas semua masalah yang dikemukakan oleh Pak Zakaria
7. Pola gabungan kata sikat gigi sama dengan pola gabungan kata...
- A. Sepasang sepatu
- B. Rumah sakit
- C. Tenda biru
- D. Angkat kaki
- E. Ikan asin
8. Pemakaian tanda baca yang benar terdapat pada kalimat...
- A. Teknik bernyanyi Rossa, diva musik Indonesia, selama konser tunggalnya sangat memukau penonton
- B. Data mahasiswa Baru yang diterima di perguruan tinggi itu antara tahun 2005 s/d 2007 telah disimpan dalam dokumen
- C. Anton, Wawan, dan Agnes bersahabat sejak mereka masih duduk dibangku SMP
- D. Semua keputusan kepala sekolah tentang tata tertib sekolah telah diumumkan kepada seluruh siswa tetapi ada beberapa siswa yang belum mengetahuinya
- E. Sahabat saya, yang tinggal di Plaju, sekarang sudah pindah ke Bandung
9. *Kedatangan tamu disambut dengan upacara adat.*

Fungsi imbuhan (ke-an) pada kalimat di atas sama dengan fungsi (-nya) pada kalimat...

- A. Dia mengecat rumahnya dengan cat putih.
- B. Hasil kebunnya cukup untuk membiayai hidup keluarga.
- C. Buku itu berjudul Lahirnya Pancasila.
- D. Sakitnya tidak tertahankan olehku.
- E. Obat itu bukan main mahalnyanya.

10. Kata yang bercetak miring berikut yang tepat adalah...
- A. Jika tidak ada permintaan dari atasan untuk mengubah butirbutir anggaran, kita tidak perlu mengadakan perubahan butir-butir tersebut.
 - B. Meskipun berlatih di arena yang telah disiapkan sebelumnya, is selalu tidak mendapatkan hasil dari kegiatan perlatihannya itu.
 - C. Keputusan itu dirumuskan oleh para ahli dari berbagai bidang ilmu sehingga perumusannya benar-benar dapat dipertanggung jawabkan.
 - D. Pemandu diskusi telah menyimpulkan hasil pembahasan. Berkesimpulan tersebut disusun berdasarkan hasil presentasi dan tanggapan peserta.
 - E. Tadi pagi ayah mempertinggikan tiang jemuran.

11. *Bersama dengan ini kami mengundang seluruh pengurus OSIS untuk mengikuti acara rapat pada ...*

Kalimat pembuka surat undangan di atas sebaiknya diubah menjadi

- A. Bersama ini kami mengundang seluruh pengurus OSIS untuk mengikuti acara rapat pada ...
 - B. Dengan ini datangnya, surat ini kami mengundang seluruh pengurus OSIS untuk mengikuti acara rapat pada ...
 - C. Berhubung ada hal yang harus dibicarakan, dengan datangnya surat ini kami mengundang seluruh pengurus OSIS untuk mengikuti acara rapat pada ...
 - D. Dengan ini adanya surat ini, kami bermaksud mengundang seluruh pengurus OSIS untuk mengikuti acara rapat pada ...
 - E. Dengan surat ini kami mengundang seluruh pengurus OSIS untuk mengikuti acara rapat yang akan diselenggarakan pada ...
12. *Sebagai ... dan juga sebagai dokter yang membuka ... di rumahnya, Ridwan meyakini kota berperan penting dalam membangkitkan warga. Ekonomi kreatif di sejumlah negara dengan Inggris sebagai pelop' or, terbukti membangkitkan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja lebih besar daripada ekonomi berbasis industri gelombang kedua.*

Kata serapan yang tepat untuk melengkapi paragraf di atas adalah...

- A. Arsitektur, praktek, kreatifitas
 - B. Arsitek, praktikum, kreatif
 - C. Arsitek, praktik, kreativitas
 - D. Arsitektur, praktisi, kreatif
 - E. Arsitek, praktisi, kreator
13. Kalimat berikut yang seluruhnya ditulis dengan menggunakan ejaan yang benar adalah...
- A. Sastrawan selaku subyek sangat penting peranannya di dalam perkembangan kesusastraan
 - B. Pernyataan diatas menunjukkan bahwa Kesusastraan Indonesia

- memiliki perkembangan yang sangat menggembirakan
- C. Perbedaan pendapat Sastrawan akan jelas terlihat keberadaannya dari segi apapun dalam kesusastraan
 - D. Oleh karena itu, setiap pelajar yang belajar menganalisis karya sastra harus selalu memperhatikan latar belakang budaya sastrawannya
 - E. Perbedaan pendapat antar sastrawan Indonesia tidak menutup kemungkinan menjadi penyebab terjadinya perselisihan
14. *Pelayanan kesehatan di berbagai tempat di tanah air belum berorientasi kepada pasien. Hal ini ditandai oleh maraknya pemberian obat antibiotik yang tidak sesuai dengan kondisi klinis. Pemakaian antibiotik yang melebihi kebutuhan bisa mengakibatkan resistansi dalam tubuh pasien. Kuman penyakit dalam tubuh menjadi kebal. Oleh karena...*

Kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf di atas adalah...

- A. Perlu ditumbuhkan sikap kritis masyarakat terhadap layanan kesehatan
 - B. Pasien harus diberi antibiotik di atas kebutuhan supaya daya tahan tubuh lebih tinggi
 - C. Setiap penyakit harus diobati dengan antibiotik
 - D. Pasien harus selalu mematuhi semua instruksi dari dokter
 - E. Pasien harus pasrah pada layanan kesehatan yang diterima
15. *Kedatangan tamu disambut dengan upacara adat.*

Fungsi imbuhan (ke-an) pada kalimat di atas sama dengan fungsi (-nya) pada kalimat...

- A. Dia mengecat rumahnya dengan cat putih.
 - B. Sakitnya tidak tertahankan olehku.
 - C. Obat itu bukan main mahalnnya.
 - D. Hasil kebunnya cukup untuk membiayai hidup keluarga.
 - E. Buku itu berjudul Lahirnya Pancasila.
16. *Setelah pernancor televisi swasta menayangkan sinetron berseri, ibu saya selalu mengikuti tayangan tersebut, demikian pula dengan ibu Nina, tetangga saya. Di rumah sakit, baik karyawan maupun pasien tompak sering menyaksikan acara tersebut. Para pedagang pun menyempatkan diri untuk menontonnya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa semua orang menggeran acara sinetron.*

Wacana di atas menarik simpulan dengan cara...

- A. Silogisme
- B. Kausal
- C. Analogi
- D. Entimem
- E. Generalisasi

17. Unsur serapan dalam kalimat berikut ini yang tepat terdapat dalam kalimat...
- A. Kataloog disediakan untuk mencari buku di perpustakaan.
 - B. Kakakku diterima di Fakultas Teknik UI.
 - C. Anak-anak kecil menyukai film kartun.
 - D. Saya pernah melihat ikan arwana di aquarium.
 - E. Siapakah nama gupernur yang baru itu?
18. *Usaha perladangan telah menyebabkan timbulnya tanah kritis. Tanah kritis ini selanjutnya menimbulkan berbagai bencana besar yang mengancam ketenteraman hidup manusia dan menghalangi tercapainya tujuan pembangunan ekonomi. Seluruh curah uang pemerintah dengan satuan hitung miliar itu tidak ada gunanya dituangkan dalam bentuk waduk, dam, dan bendungan di Pulau Jawa kalau hutan-hutan tidak ada. Seluruh bangunan mahal itu hanyalah merupakan mekanisme fisik pencegah banjir dan jaminan buat hidup pertanian yang tidak akan mencapai sasaran. Dengan demikian, bangunan yang mahal itu merupakan pemborosan besar bila daerah-daerah aliran sungai di hulu-hulu dan di gunung-gunung tidak terlindung oleh selimut hutan. Di samping itu tanah kritis menyebabkan erosi dan banjir kronis di Pulau Jawa dan Madura sehingga setiap tahun menimbulkan kerugian bernilai 1,3 juta ton beras.*

Hubungan sebab — akibat yang dapat diringkaskan dari seluruh isi teks di atas adalah...

- A. Usaha perladangan menyebabkan timbulnya tanah
 - B. Usaha perladangan menyebabkan timbulnya tanah kritis dan bencana alam.
 - C. Usaha perladangan menyebabkan terancamnya pembangunan ekonomi.
 - D. Usaha perladangan menyebabkan timbulnya tanah kritis dan pemborosan besar.
 - E. Usaha perladangan menyebabkan timbulnya tanah kritis sehingga merugikan pembangunan ekonomi dan menimbulkan berbagai bencana alam.
19. *Kusta dikenal sebagai penipu ulung. Gejalanya kerap meniru-niru penyakit kulit lain sehingga agak sulit membedakannya. Bedanya adalah bahwa kulit yang mengidap kusta akan mati rasa. Penyakit ini sering diderita oleh masyarakat yang ekonominya rendah.*

Pernyataan di atas mengungkapkan...

- A. Kusta sama dengan penyakit lain.
- B. Antara kusta dan penyakit kulit tidak dapat dibedakan.
- C. Penyakit kusta dapat juga diderita orang kaya.
- D. Penderita kusta rentan pada pars orang miskin.

- E. Orang yang tingkat ekonominya tinggi kebal terhadap kusta.
20. *Terumbu karang juga merupakan habitat sejumlah biota. Ikon kerabu, kakap merah, udang, dan ikon hias banyak berlindung di sana. Perusakan terumbu karang oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab mengakibatkan biota-biota itu terancam punah.*

Kalimat tanggapan yang sesuai dengan isi paragraf tersebut untuk menyelamatkan terumbu karang adalah...

- A. Boleh saja mereka mengambil terumbu karang itu asal untuk membantu perekonomian mereka
- B. Kalau mereka merusak terumbu karang, mereka berkewajiban untuk memulihkan kembali
- C. Yang bertanggung jawab terhadap perusakan itu adalah orang atau nelayan yang tinggal di sekitar laut
- D. Sebaiknya yang merusak diberi pekerjaan baru yang mereka inginkan
- E. Perusak terumbu karang harus diberantas dengan cara diberi sanksi yang berat

KUNCI JAWABAN

Kunci Jawaban
TWK: UUD 1945

No	Jawab	No	Jawab
1	A	11	B
2	D	12	A
3	A	13	A
4	B	14	A
5	D	15	D
6	E	16	B
7	A	17	E
8	A	18	C
9	A	19	A
10	A	20	E

Kunci Jawaban
TWK: TATA NEGARA

No	Jawab	No	Jawab
1	C	11	A
2	C	12	D
3	B	13	A
4	E	14	B
5	A	15	B
6	D	16	B
7	B	17	C
8	B	18	D
9	C	19	C
10	B	20	D

Kunci Jawaban
TWK: BTI

No	Jawab	No	Jawab
1	C	11	A
2	A	12	A
3	E	13	B
4	A	14	B
5	D	15	A
6	B	16	C
7	B	17	C
8	D	18	B
9	E	19	C
10	A	20	B

Kunci Jawaban
TWK: SEJARAH

No	Jawab	No	Jawab
1	C	11	E
2	E	12	A
3	B	13	A
4	A	14	C
5	B	15	B
6	C	16	C
7	B	17	D
8	D	18	D
9	C	19	C
10	A	20	B

Kunci Jawaban
TWK: PERAN NEGARA

No	Jawab	No	Jawab
1	D	11	B
2	D	12	A
3	A	13	E
4	D	14	A
5	A	15	A
6	B	16	A
7	A	17	C
8	B	18	C
9	D	19	C
10	B	20	C

Kunci Jawaban
TWK: BAHASA INDONESIA

No	Jawab	No	Jawab
1	C	11	E
2	D	12	C
3	D	13	D
4	B	14	A
5	D	15	E
6	D	16	E
7	D	17	C
8	A	18	E
9	C	19	B
10	A	20	E